



PEMERINTAH
KABUPATEN
PASURUAN

RENJA 2025

**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN**





BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 20 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja di Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Republik Indonesia Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 290) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 347);
20. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 12);
21. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 Nomor 16).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2025

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKAPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

Pasal 2

Renja PD Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 3

Renja PD Tahun 2025 berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah dan hasil evaluasi Renja PD tahun lalu.

Pasal 4

(1) Renja PD Tahun 2025 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN,

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU,

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH,

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH,

BAB V : PENUTUP.

(2) Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun RKA PD.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 5 Agustus 2024
Pj. BUPATI PASURUAN,

ttd.

ANDRIYANTO

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 5 Agustus 2024
SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024 NOMOR 20

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 20 TAHUN 2024
TANGGAL : 5 AGUSTUS 2024

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2025

- I. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN;
- II. DINAS KESEHATAN;
- III. DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG;
- IV. DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI;
- V. DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN;
- VI. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA;
- VII. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH;
- VIII. DINAS SOSIAL;
- IX. DINAS KETENAGAKERJAAN;
- X. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA;
- XI. DINAS LINGKUNGAN HIDUP;
- XII. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL;
- XIII. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA;
- XIV. DINAS PERHUBUNGAN;
- XV. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA;
- XVI. DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH;
- XVII. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYAN TERPADU SATU PINTU;
- XVIII. DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA;
- XIX. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN;
- XX. DINAS PERIKANAN;
- XXI. DINAS PARIWISATA;
- XXII. DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN;
- XXIII. DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN;
- XXIV. DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN;
- XXV. SEKRETARIAT DAERAH;
- XXVI. SEKRETARIAT DPRD;
- XXVII. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH;
- XXVIII. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH;
- XXIX. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA;
- XXX. INSPEKTORAT DAERAH;
- XXXI. KECAMATAN BANGIL;
- XXXII. KECAMATAN BEJI;
- XXXIII. KECAMATAN GEMPOL;
- XXXIV. KECAMATAN GONDANG WETAN;
- XXXV. KECAMATAN GRATI;
- XXXVI. KECAMATAN KEJAYAN;
- XXXVII. KECAMATAN KRATON;

- XXXVIII. KECAMATAN LEKOK;
- XXXIX. KECAMATAN LUMBANG;
- XL. KECAMATAN NGULING;
- XLI. KECAMATAN PANDAAN;
- XLII. KECAMATAN PASREPAN;
- XLIII. KECAMATAN POHJENTREK;
- XLIV. KECAMATAN PRIGEN;
- XLV. KECAMATAN PURWODADI;
- XLVI. KECAMATAN PURWOSARI;
- XLVII. KECAMATAN PUSPO;
- XLVIII. KECAMATAN REJOSO;
- XLIX. KECAMATAN REMBANG;
- L. KECAMATAN SUKOREJO;
- LI. KECAMATAN TOSARI;
- LII. KECAMATAN TUTUR;
- LIII. KECAMATAN WINONGAN;
- LIV. KECAMATAN WONOREJO; DAN
- LV. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK.

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah SWT. Karena berkat rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan tugas pembuatan Rancangan Awal Rencana Kerja (Ranwal Renja) Tahun 2025 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD).

Rencana kerja merupakan wujud dari implementasi program yang telah dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis 2024-2026, oleh sebab itu Rencana Kerja memuat seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang telah ditetapkan. Seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan tentunya telah disesuaikan dan diarahkan pada pencapaian tujuan serta sasaran yang hendak dicapai. Sebagai OPD yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan keuangan daerah maka kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan diharapkan akan memberikan dampak terhadap akuntabilitas kinerja keuangan daerah yang pada gilirannya nanti akan berpengaruh terhadap kinerja Pemerintah Daerah dalam meningkatkan layanan publik.

Harapan kami bahwa dengan tersusunnya Rancangan Awal Rencana kerja tahun 2025, seluruh kegiatan yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan baik dan tentunya saran dan kritik akan selalu menjadi perhatian kami demi kesempurnaan program kegiatan kedepan, kami menyadari dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini masih terdapat kekurangan di dalam penyajiannya. Kepada pihak yang terlibat dalam penyusunan Renja ini kami ucapkan terimakasih. Demikian Rancangan Awal Rencana Kerja (Ranwal Renja)

kami untuk tahun 2025 mudah – mudahan berguna dan bermanfaat
serta dalam penyusunan Renja ini mendapatkan Ridho dari Allah SWT.
Amin.

Pasuruan,

2024

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI	4
BAB I PENDAHULUAN	6
1.1. Latar Belakang.....	6
1.1.1 Renja Badan Pengeolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2025	6
1.2.1 Proses Penyusunan Renja BPKPD Tahun 2025.....	7
1.2. Landasan Hukum	10
1.3. Maksud dan Tujuan.....	13
1.3.1. Maksud.....	13
1.3.2. Tujuan	14
1.4. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II HASIL EVALUASI RENJA BPKPD TAHUN 2024	19
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BPKPD Tahun 2024 dan Capaian Renstra BPKPD.....	19
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BPKPD	60
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi BPKPD	74
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	77
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	103
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	107
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	107
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja BPKPD.....	111

3.3. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	128
3.3.1. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2025.....	128
3.3.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Prioritas Daerah Tahun 2025	175
3.3.2. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Proyek Strategis	177
3.3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Inovasi BPKPD...	180
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .	183
BAB V PENUTUP	253
5.1 Catatan Penting yang Perlu Mendapat Perhatian	253
5.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan.....	254
5.3 Rencana Tindak Lanjut	255

XXVIII. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

RENCANA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2025

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.1.1 Renja Badan Pengeolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2025

Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen perencanaan untuk periode satu tahun. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pasal 11 ayat (3) huruf b, Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) disusun dengan tahapan:

- a. persiapan penyusunan; penyusunan rancangan awal;
- b. penyusunan rancangan;
- c. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- d. perumusan rancangan akhir; dan
- e. penetapan.

Perangkat Daerah menyusun rancangan awal Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam paling lambat minggu pertama bulan Desember. Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah, mencakup:

- a. analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah; dan
- b. hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu.

1.2.1 Proses Penyusunan Renja BPKPD Tahun 2025

Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah. Rancangan Renja Perangkat Daerah dibahas dan sempurnakan dalam forum perangkat Daerah/lintas perangkat Daerah. Rancangan Renja Perangkat Daerah disajikan dengan

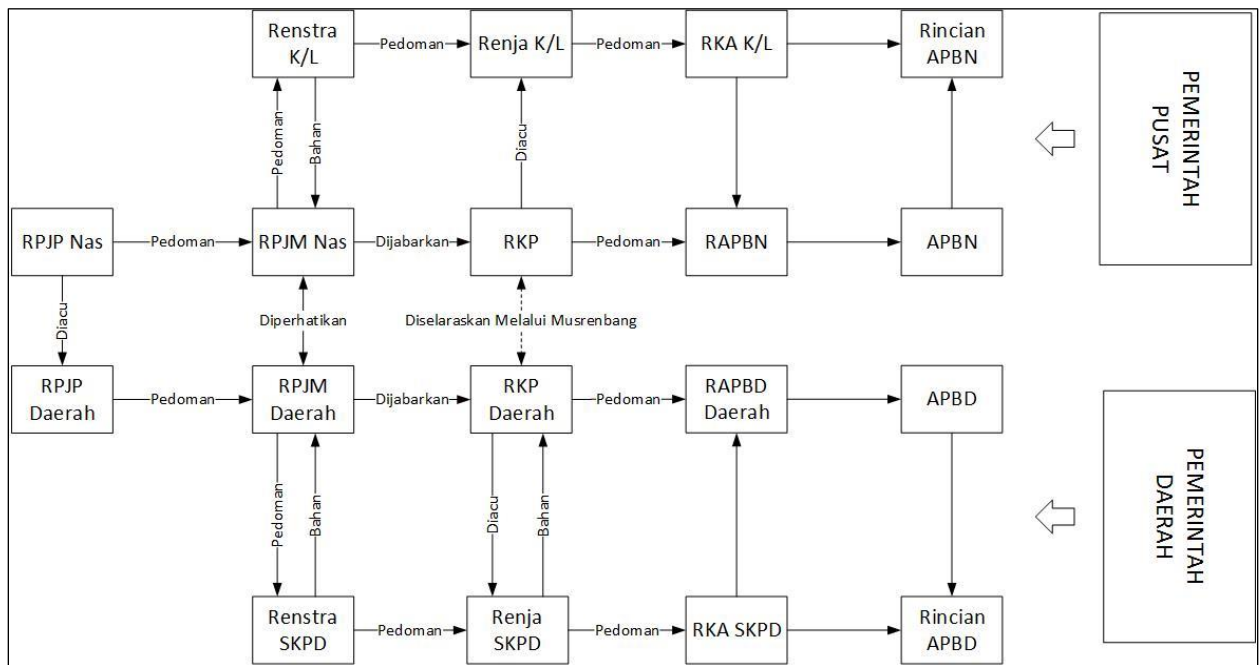
sistematika dari hasil perumusan rancangan awal Renja Perangkat Daerah. Rancangan Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota disampaikan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) kabupaten/kota untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD.

Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dilaksanakan oleh kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan BAPPELITBANGDA. Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Hasil pembahasan rancangan Renja Perangkat Daerah dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah.

Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD. Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD. Keterkaitan Renja dengan dokumen RKPD dijelaskan bahwa dasar untuk menyempurnakan rancangan akhir

Renja Perangkat Daerah mengacu dari Perkada tentang RKPD yang sudah ditetapkan.

Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan Renja Kementerian/Lembaga dan Renja provinsi/Kabupaten/kota hingga penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diuraikan dalam bagan berikut:



Gambar 1.2.1 Bagan Keterkaitan Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah Dan Pemerintah

Penyusunan Rancangan Renja BPKPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan Renja BPKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rancangan Awal RKPD. Penyusunan Renja dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terhadap kondisi terkini, evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra yang ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan dalam

melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Selanjutnya dilakukan penyusunan dokumen Renja BPKPD sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum dalam RPJPD, RPD atau RPJMD serta Renstra. Sejalan dengan hal tersebut pembuatan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah tahun 2025 mempertimbangkan arah dan kebijakan umum dalam RPJPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2005–2025, RPD Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan 2024-2026 serta Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah tahun 2024-2026. Dalam renja juga BPKPD juga mencantumkan hal-hal mendasar atas rencana pelaksanaan program prioritas daerah. Penetapan Renja BPKPD dilakukan setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan serta Renja tersebut menjadi pedoman BPKPD dalam menyusun RKA.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2020 tentang Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengeolaan Keuangan Daerah.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor xx tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
18. Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

19. Perbup Nomor 12 Tahun 2023 Tentang RPD Kab Pasuruan.
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah.
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
23. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 188 Tahun 2021 Tentang kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan.
24. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan.
25. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 43 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2024-2026.
26. Perbup Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan Renja BPKPD adalah sebagai arah dan acuan dalam evaluasi perencanaan dan penganggaran di

BPKPD. Selain itu, memberikan informasi pencapaian hasil tahun sebelumnya serta kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan. Menjabarkan rencana strategis perencanaan pembangunan yang telah dituangkan dalam Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan tahun 2024-2026 dalam bentuk rencana kerja dan anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan rencana kerja.

1.3.2. Tujuan

Tujuan dalam menyusun Renja BPKPD adalah:

- a. Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan BPKPD untuk mewujudkan tujuan dan sasaran BPKPD. Tujuan yang akan dicapai oleh BPKPD yaitu untuk meningkatkan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dengan indikator Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, Indeks Pengelolaan Aset dan untuk mencapai target presentase kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah. Selain itu untuk meningkatkan perencanaan penganggaran keuangan daerah, penatausahaan keuangan daerah, manajemen aset yang akuntabel dan akuntabilitas kinerja PD berdasarkan nilai SAKIP yang diperoleh
- b. Sebagai pedoman penyusunan RKA-DPA Tahun 2025 dan sebagai pedoman dalam pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan dan penganggaran dengan memperhatikan kerangka regulasi dan kerangka anggaran Badan Pengelolaan

Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan yang telah ditetapkan pagu dana indikatifnya.

1.4. Sistematika Penulisan

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Sistematika penulisan Renja tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan, proses penyusunan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan, keterkaitan antara Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan dengan dokumen RKPD dan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Badan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan.

1.3 Maksud Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Daerah Kabupaten Pasuruan.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Daerah Kabupaten Pasuruan, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA BPKPD TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BPKPD Tahun 2024 dan Capaian Renstra BPKPD

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan terhadap capaian Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BPKPD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM (bagi perangkat daerah yang melaksanakan SPM), maupun terhadap Indikator Kinerja Utama. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPKPD

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Berisikan uraian mengenai:

1. Tingkat kinerja pelayanan dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi;
3. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan; dan
4. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review Rancangan Awal RKPD

Pada subbab ini berisi data yang membandingkan data awal RKPD yang didapat dari data Renstra dengan hasil analisis kebutuhan BPKPD untuk tahun 2025.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada Sub Bab ini berisi usulan-usulan masyarakat serta pokok pikiran dari DPRD yang ditujukan kepada BPKPD.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sub Bab menjelaskan kebijakan-kebijakan nasional yang mempengaruhi kinerja pelaksanaan Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja BPKPD

Berisikan tujuan dan sasaran yang tercantum pada Renstra sesuai tahun berkenaan. Tujuan dan Sasaran dilengkapi dengan indikator tujuan dan indicator sasaran beserta target tahun 2025.

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

A. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025

- B. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Prioritas Daerah Tahun 2025
- C. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Proyek Strategis
- D. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Inovasi BPKPD
- E. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung IK RPJPD

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Disajikan dalam bentuk matriks rencana program dan kegiatan disertai penjelasan diluar tabel mengenai uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:

- A. Jumlah program dan jumlah kegiatan yang direncanakan
- B. Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan renja, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA BPKPD TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BPKPD Tahun 2024 dan Capaian Renstra BPKPD

Pada tahun 2024, dokumen perencanaan jangka menengah BPKPD Kabupaten Pasuruan memiliki dokumen dengan periode 2024 – 2026 berupa Renstra BPKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2004 – 2026. Periode ini merupakan periode baru dari Renstra sebelumnya yang berakhir di tahun 2023. Renstra periode 2024 – 2026 memiliki beberapa perubahan pada tujuan, sasaran dan indikator BPKPD jika dibandingkan dengan Renstra Tahun 2018 – 2023. Untuk memantapkan perencanaan pembangunan Tahun 2025 diperlukan evaluasi dari pelaksanaan tahun sebelumnya. Evaluasi dilakukan terhadap hasil Pelaksanaan Renja BPKPD Tahun 2024 dan Capaian Renstra BPKPD. Hasil tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.1 (T-C.29).

Tabel 2.1 (T-C.29)

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BPKPD dan Pencapaian Renstra BPKPD s/d Tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Akhir Periode Renstra 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Subkegiatan s/d tahun n-3 (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun n-2 (2023)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Tahun n-1 (2024))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Perangkat Daerah Tahun n-2 (2023)	Realisasi Perangkat Daerah Tahun n-2 (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun n-1 (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= 7/6	9	10= 5+7+9	11= 10/4
5	Urusan Penunjang									
5.02	Keuangan									
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	1. Persentase penyusunan dokumen penganggaran yang baik secara tepat waktu dan sesuai regulasi yang berlaku 2. Pengelolaan pendapatan dan belanja daerah sesuai ketentuan yang berlaku 3. Persentase kelengkapan	1. 100% 2. 100% 3. 100%					1. 95% 2. 100% 3. 100%	1. 95% 2. 100% 3. 100%	1. 95% 2. 100% 3. 100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Akhir Periode Renstra 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Subkegiatan s/d tahun n-3 (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun n-2 (2023)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Tahun n-1 (2024))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Perangkat Daerah Tahun n-2 (2023)	Realisasi Perangkat Daerah Tahun n-2 (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun n-1 (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= 7/6	9	10= 5+7+9	11= 10/4
		dokumen LKPD yang selesai tepat waktu								
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Penyelesaian verifikasi penyusunan dokumen anggaran daerah tepat waktu	100%					100%	100%	100%
5.02.02.2.01.00 01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	12 Dokumen					4 Dokumen	4 Dokumen	33%
5.02.02.2.01.00 02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	12 Dokumen					4 Dokumen	4 Dokumen	33%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Akhir Periode Renstra 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Subkegiatan s/d tahun n-3 (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun n-2 (2023)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Tahun n-1 (2024))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Perangkat Daerah Tahun n-2 (2023)	Realisasi Perangkat Daerah Tahun n-2 (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun n-1 (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= 7/6	9	10= 5+7+9	11= 10/4
5.02.02.2.01.00 03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	180 Dokumen					60 Dokumen	60 Dokumen	33%
5.02.02.2.01.00 04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	240 Dokumen					60 Dokumen	60 Dokumen	25%
5.02.02.2.01.00 07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	6 Dokumen					2 Dokumen	2 Dokumen	33%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Akhir Periode Renstra 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Subkegiatan s/d tahun n-3 (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun n-2 (2023)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Tahun n-1 (2024))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Perangkat Daerah Tahun n-2 (2023)	Realisasi Perangkat Daerah Tahun n-2 (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun n-1 (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= 7/6	9	10= 5+7+9	11= 10/4
5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	6 Dokumen					2 Dokumen	2 Dokumen	33%
5.02.02.2.01.0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	6 Dokumen					2 Dokumen	2 Dokumen	33%
5.02.02.2.01.0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah	300 Orang					100 Orang	100 Orang	33%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Akhir Periode Renstra 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Subkegiatan s/d tahun n-3 (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun n-2 (2023)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Tahun n-1 (2024))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Perangkat Daerah Tahun n-2 (2023)	Realisasi Perangkat Daerah Tahun n-2 (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun n-1 (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= 7/6	9	10= 5+7+9	11= 10/4
		Pemerintah Kabupaten/Kota								
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase dokumen pendapatan dan belanja daerah yang terselesaikan	100%					100%	100%	100%
5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	36 Dokumen					12 Dokumen	12 Dokumen	33%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Akhir Periode Renstra 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Subkegiatan s/d tahun n-3 (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun n-2 (2023)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Tahun n-1 (2024))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Perangkat Daerah Tahun n-2 (2023)	Realisasi Perangkat Daerah Tahun n-2 (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun n-1 (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= 7/6	9	10= 5+7+9	11= 10/4
5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	150 Dokumen					50 Dokumen	50 Dokumen	33%

5.02.02.2.02.00 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pe motongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pe motongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	6 Laporan					2 Laporan	2 Laporan	33%
-----------------------	---	---	-----------	--	--	--	--	-----------	-----------	-----

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Akhir Periode Renstra 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Subkegiatan s/d tahun n-3 (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun n-2 (2023)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Tahun n-1 (2024))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Perangkat Daerah Tahun n-2 (2023)	Realisasi Perangkat Daerah Tahun n-2 (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun n-1 (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= 7/6	9	10= 5+7+9	11= 10/4
5.02.02.2.02.00 09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	804 Dokumen					268 Dokumen	268 Dokumen	33%
5.02.02.2.02.00 10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	3 Dokumen					1 Dokumen	1 Dokumen	33%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Akhir Periode Renstra 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Subkegiatan s/d tahun n-3 (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun n-2 (2023)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Tahun n-1 (2024))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Perangkat Daerah Tahun n-2 (2023)	Realisasi Perangkat Daerah Tahun n-2 (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun n-1 (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= 7/6	9	10= 5+7+9	11= 10/4
5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	300 Orang					100 Orang	100 Orang	33%
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Laporan Keuangan disusun tepat waktu dan sesuai standar	100%					100%	100%	100%
5.02.02.2.03.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	36 Laporan					12 Laporan	12 Laporan	33%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Akhir Periode Renstra 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Subkegiatan s/d tahun n-3 (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun n-2 (2023)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Tahun n-1 (2024))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Perangkat Daerah Tahun n-2 (2023)	Realisasi Perangkat Daerah Tahun n-2 (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun n-1 (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= 7/6	9	10= 5+7+9	11= 10/4
5.02.02.2.03.00 02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	12 Dokumen					4 Dokumen	4 Dokumen	33%
5.02.02.2.03.00 04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	21 Laporan					7 Laporan	7 Laporan	33%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Akhir Periode Renstra 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Subkegiatan s/d tahun n-3 (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun n-2 (2023)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Tahun n-1 (2024))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Perangkat Daerah Tahun n-2 (2023)	Realisasi Perangkat Daerah Tahun n-2 (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun n-1 (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= 7/6	9	10= 5+7+9	11= 10/4
5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	12 Dokumen					4 Dokumen	4 Dokumen	33%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Akhir Periode Renstra 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Subkegiatan s/d tahun n-3 (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun n-2 (2023)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Tahun n-1 (2024))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Perangkat Daerah Tahun n-2 (2023)	Realisasi Perangkat Daerah Tahun n-2 (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun n-1 (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= 7/6	9	10= 5+7+9	11= 10/4
5.02.02.2.03.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	12 Dokumen					4 Dokumen	4 Dokumen	33%
5.02.02.2.03.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	3 Dokumen					1 Dokumen	1 Dokumen	33%
5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi,	171 Orang					57 Orang	57 Orang	33%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Akhir Periode Renstra 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Subkegiatan s/d tahun n-3 (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun n-2 (2023)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Tahun n-1 (2024))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Perangkat Daerah Tahun n-2 (2023)	Realisasi Perangkat Daerah Tahun n-2 (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun n-1 (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= 7/6	9	10= 5+7+9	11= 10/4
	Pemerintah Kabupaten/Kota	Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota								
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase dokumen urusan kewenangan pengelolaan keuangan daeran	100%					100%	100%	100%
5.02.02.2.04.00 02	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	6 Laporan					2 Laporan	2 Laporan	33%
5.02.02.2.04.00 08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	21 Laporan					7 Laporan	7 Laporan	33%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Akhir Periode Renstra 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Subkegiatan s/d tahun n-3 (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun n-2 (2023)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Tahun n-1 (2024))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Perangkat Daerah Tahun n-2 (2023)	Realisasi Perangkat Daerah Tahun n-2 (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun n-1 (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= 7/6	9	10= 5+7+9	11= 10/4
5.02.02.2.04.00 09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	30 Laporan					10 Laporan	10 Laporan	33%
5.02.02.2.04.00 10	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	9 Laporan					3 Laporan	3 Laporan	33%
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase penggunaan BMD SKPD yang berstatus	100%					100%	100%	100%
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase penyusunan Dokumen dan Laporan Barang Milik Daerah yang sesuai standar	100%					100%	100%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Akhir Periode Renstra 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Subkegiatan s/d tahun n-3 (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun n-2 (2023)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Tahun n-1 (2024))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Perangkat Daerah Tahun n-2 (2023)	Realisasi Perangkat Daerah Tahun n-2 (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun n-1 (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= 7/6	9	10= 5+7+9	11= 10/4
5.02.03.2.01.00 03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	336 Dokumen					112 Dokumen	112 Dokumen	33%
5.02.03.2.01.00 04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	36 Dokumen					12 Dokumen	12 Dokumen	33%
5.02.03.2.01.00 05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	12 Laporan					4 Laporan	4 Laporan	33%
5.02.03.2.01.00 07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1500 Laporan					500 Laporan	500 Laporan	33%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Akhir Periode Renstra 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Subkegiatan s/d tahun n-3 (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun n-2 (2023)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Tahun n-1 (2024))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Perangkat Daerah Tahun n-2 (2023)	Realisasi Perangkat Daerah Tahun n-2 (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun n-1 (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= 7/6	9	10= 5+7+9	11= 10/4
5.02.03.2.01.00 09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	36 Laporan					12 Laporan	12 Laporan	33%
5.02.03.2.01.00 10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	678 Dokumen					226 Dokumen	226 Dokumen	33%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Akhir Periode Renstra 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Subkegiatan s/d tahun n-3 (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun n-2 (2023)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Tahun n-1 (2024))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Perangkat Daerah Tahun n-2 (2023)	Realisasi Perangkat Daerah Tahun n-2 (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun n-1 (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= 7/6	9	10= 5+7+9	11= 10/4
5.02.03.2.01.00 11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	12 Laporan					4 Laporan	4 Laporan	33%
5.02.03.2.01.00 12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	12 Laporan					4 Laporan	4 Laporan	33%
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Peningkatan Pendapatan pajak dan retribusi Daerah	2,20%					2%	2%	91%
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1. Jumlah Wajib Pajak 2. Peningkatan kontribusi pajak dan retribusi terhadap PAD	1. 700 2. 2%					1. 150 2. 1%	1. 150 2. 1%	1. 21% 2. 50%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Akhir Periode Renstra 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Subkegiatan s/d tahun n-3 (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun n-2 (2023)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Tahun n-1 (2024))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Perangkat Daerah Tahun n-2 (2023)	Realisasi Perangkat Daerah Tahun n-2 (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun n-1 (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= 7/6	9	10= 5+7+9	11= 10/4
5.02.04.2.01.00 01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	6 Dokumen					2 Dokumen	2 Dokumen	33%
5.02.04.2.01.00 02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	47 Dokumen					12 Dokumen	12 Dokumen	26%
5.02.04.2.01.00 03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	24 Laporan					8 Laporan	8 Laporan	33%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Akhir Periode Renstra 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Subkegiatan s/d tahun n-3 (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun n-2 (2023)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Tahun n-1 (2024))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Perangkat Daerah Tahun n-2 (2023)	Realisasi Perangkat Daerah Tahun n-2 (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun n-1 (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= 7/6	9	10= 5+7+9	11= 10/4
5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	36 Laporan					12 Laporan	12 Laporan	33%
5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	36 Laporan					12 Laporan	12 Laporan	33%
5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	24805 Obyek Pajak					7.868 Obyek Pajak	7.868 Obyek Pajak	32%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Akhir Periode Renstra 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Subkegiatan s/d tahun n-3 (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun n-2 (2023)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Tahun n-1 (2024))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Perangkat Daerah Tahun n-2 (2023)	Realisasi Perangkat Daerah Tahun n-2 (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun n-1 (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= 7/6	9	10= 5+7+9	11= 10/4
5.02.04.2.01.00 08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	3032487 Dokumen					918.744 Dokumen	918.744 Dokumen	30%
5.02.04.2.01.00 09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	2 Layanan					2 Layanan	2 Layanan	100%
5.02.04.2.01.00 10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	36 Laporan					12 Laporan	12 Laporan	33%
5.02.04.2.01.00 11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	27240 Dokumen					8990 Dokumen	8990 Dokumen	33%
5.02.04.2.01.00 12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian	33 Dokumen					11 dokumen	11 dokumen	33%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Akhir Periode Renstra 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Subkegiatan s/d tahun n-3 (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun n-2 (2023)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Tahun n-1 (2024))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Perangkat Daerah Tahun n-2 (2023)	Realisasi Perangkat Daerah Tahun n-2 (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun n-1 (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= 7/6	9	10= 5+7+9	11= 10/4
		Keberatan Pajak Daerah								
5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	159 Dokumen					53 Dokumen	53 Dokumen	33%
5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	6 Laporan					2 Laporan	2 Laporan	33%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Akhir Periode Renstra 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Subkegiatan s/d tahun n-3 (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun n-2 (2023)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Tahun n-1 (2024))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Perangkat Daerah Tahun n-2 (2023)	Realisasi Perangkat Daerah Tahun n-2 (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun n-1 (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= 7/6	9	10= 5+7+9	11= 10/4
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen administrasi PD yang baik	100%					95%	95%	95%
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase konsistensi indikator kinerja program/kegiatan/subkegiatan pada dok. Rencana, anggaran, dan evaluasi	100%					97%	97%	97%
5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	36 Dokumen					12 Dokumen	12 Dokumen	33%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Akhir Periode Renstra 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Subkegiatan s/d tahun n-3 (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun n-2 (2023)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Tahun n-1 (2024))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Perangkat Daerah Tahun n-2 (2023)	Realisasi Perangkat Daerah Tahun n-2 (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun n-1 (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= 7/6	9	10= 5+7+9	11= 10/4
5.02.01.2.01.00 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan					2 Laporan	2 Laporan	33%
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan ysng ssuai dengan keentuan dan dapat dipertanggungjawabkan	100%					98%	98%	98%
5.02.01.2.02.00 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	294 Orang/Bulan					98 Orang/bulan	98 Orang/bulan	33%
5.02.01.2.02.00 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi	225 Dokumen					75 Dokumen	75 Dokumen	33%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Akhir Periode Renstra 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Subkegiatan s/d tahun n-3 (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun n-2 (2023)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Tahun n-1 (2024))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Perangkat Daerah Tahun n-2 (2023)	Realisasi Perangkat Daerah Tahun n-2 (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun n-1 (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= 7/6	9	10= 5+7+9	11= 10/4
		Pelaksanaan Tugas ASN								
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase dokumen kepegawaian yang akurat dan sesuai ketentuan	100%					100%	100%	100%
5.02.01.2.05.00 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	480 Orang					160 Orang	160 Orang	33%
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan umum PD	100%					100%	100%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Akhir Periode Renstra 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Subkegiatan s/d tahun n-3 (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun n-2 (2023)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Tahun n-1 (2024))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Perangkat Daerah Tahun n-2 (2023)	Realisasi Perangkat Daerah Tahun n-2 (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun n-1 (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= 7/6	9	10= 5+7+9	11= 10/4
5.02.01.2.06.00 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	60 Paket					20 Paket	20 Paket	33%
5.02.01.2.06.00 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	90 Paket					30 Paket	30 Paket	33%
5.02.01.2.06.00 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	150 Paket					50 Paket	50 Paket	33%
5.02.01.2.06.00 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	150 Paket					50 Paket	50 Paket	33%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Akhir Periode Renstra 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Subkegiatan s/d tahun n-3 (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun n-2 (2023)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Tahun n-1 (2024))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Perangkat Daerah Tahun n-2 (2023)	Realisasi Perangkat Daerah Tahun n-2 (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun n-1 (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= 7/6	9	10= 5+7+9	11= 10/4
5.02.01.2.06.00 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	60 Paket					20 Paket	20 Paket	33%
5.02.01.2.06.00 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	80 Laporan					30 Laporan	30 Laporan	33%
5.02.01.2.06.00 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	540 Laporan					180 Laporan	180 Laporan	33%
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan BMD yag terealisasi	100%					100%	100%	100%
5.02.01.2.07.00 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	3 Unit					1 Unit	1 Unit	33%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Akhir Periode Renstra 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Subkegiatan s/d tahun n-3 (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun n-2 (2023)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Tahun n-1 (2024))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Perangkat Daerah Tahun n-2 (2023)	Realisasi Perangkat Daerah Tahun n-2 (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun n-1 (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= 7/6	9	10= 5+7+9	11= 10/4
	atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Jabatan yang Disediakan								
5.02.01.2.07.00 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	12 Unit					4 Unit	4 Unit	33%
5.02.01.2.07.00 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	60 Unit					20 Unit	20 Unit	33%
5.02.01.2.07.00 06	Pengadaan Peralatan Mesin dan lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	60 Unit					20 Unit	20 Unit	33%
5.02.01.2.07.00 10	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	umlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan	30 Unit					10 unit	10 unit	33%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Akhir Periode Renstra 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Subkegiatan s/d tahun n-3 (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun n-2 (2023)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Tahun n-1 (2024))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Perangkat Daerah Tahun n-2 (2023)	Realisasi Perangkat Daerah Tahun n-2 (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun n-1 (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= 7/6	9	10= 5+7+9	11= 10/4
		lainnya yang disediakan								
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang operasional kantor yang tersedia	98%					98%	98%	98%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15 Laporan					5 Laporan	5 Laporan	33%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	90 Laporan					30 Laporan	30 Laporan	33%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Akhir Periode Renstra 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Subkegiatan s/d tahun n-3 (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun n-2 (2023)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Tahun n-1 (2024))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Perangkat Daerah Tahun n-2 (2023)	Realisasi Perangkat Daerah Tahun n-2 (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun n-1 (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= 7/6	9	10= 5+7+9	11= 10/4
5.02.01.2.08.00 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30 Laporan					10 Laporan	10 Laporan	33%
5.02.01.2.08.00 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	150 Laporan					50 Laporan	50 Laporan	33%
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD kondisi baik	100%					100%	100%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Akhir Periode Renstra 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Subkegiatan s/d tahun n-3 (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun n-2 (2023)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Tahun n-1 (2024))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Perangkat Daerah Tahun n-2 (2023)	Realisasi Perangkat Daerah Tahun n-2 (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun n-1 (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= 7/6	9	10= 5+7+9	11= 10/4
5.02.01.2.09.00 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajakny	75 Unit					25 unit	25 unit	33%
5.02.01.2.09.00 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	240 Unit					80 Unit	80 Unit	33%
5.02.01.2.09.00 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	60 Unit					20 Unit	20 Unit	33%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Akhir Periode Renstra 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Subkegiatan s/d tahun n-3 (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun n-2 (2023)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Tahun n-1 (2024))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Perangkat Daerah Tahun n-2 (2023)	Realisasi Perangkat Daerah Tahun n-2 (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun n-1 (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= 7/6	9	10= 5+7+9	11= 10/4
5.02.01.2.09.00 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	300 Unit					100 Unit	100 Unit	33%
5.02.01.2.09.00 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Unit					5 unit	5 unit	33%

Berdasarkan tabel 2.1 (T-C.29), Capaian kinerja pada tahun 2024 sebagian besar sejumlah sepertiga dari target renstra 2024 – 2026. Hal ini dikarenakan dari formula perhitungan adalah realisasi pada tahun 2024 dibandingkan dengan kinerja pada Renstra yang berlaku 3 tahun. Jumlah kineja pada kolom akhir periode renstra seharusnya didapat dari Renstra tahun 2024 – 2026, namun dikarenakan terdapat kekurangan kolom pada Renstra BPKPD tahun 2024 – 2026, sehingga data akhir periode renstra diisi dengan menjumlahkan target kinerja pada Tahun 2024 – 2026.

Tingkat capaian kinerja sub kegiatan pada tahun 2024 berjumlah 33% kecuali pada sub kegiatan berikut:

1. Sub kegiatan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Target capaian kinerja sub kegiatan pada tahun 2024 berjumlah 32%, hal ini dikarenakan adanya kenaikan target pada setiap tahun sehingga pada tahun 2024 capaian kinerjanya jika dibandingkan dengan total Renstra sejumlah 32%.
2. Sub kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah. Target capaian kinerja sub kegiatan pada tahun 2024 adalah 100%. Pencapaian kinerja ini bisa terhitung 100% dikarenakan kinerja yang dilaksanakan bukan merupakan kinerja yang dapat dikumulatitkan pada setiap tahun, sehingga jumlah kinerja pada tahun 2024 jika dibandingkan dengan capaian Renstra akan mendapat nilai 100%.
3. Sub Kegiatan Penetapan Wajib Pajak Daerah. Target capaian kinerja sub kegiatan pada tahun 2024 berjumlah 30%. Hal ini

dikarenakan adanya kenaikan target pada setiap tahun sehingga pada tahun 2024 capaian kinerjanya jika dibandingkan dengan total Renstra sejumlah 32%.

Dari Tabel 2.1 (T-C.29) Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BPKPD dan Pencapaian Renstra BPKPD s/d Tahun 2024 Kabupaten Pasuruan dapat dilihat pencapaian renstra sampai dengan tahun 2024. Untuk Analisis kinerja pencapaian Renstra 2024 – 2026 sampai dengan tahun 2024 beserta faktor pendorong/penghambat dan rencana tindak lanjutnya dapat dilihat pada tabel 2.1.A berikut.

Tabel 2.1.A

Analisis Kinerja Pencapaian Renstra 2024-2026 sampai dengan Tahun 2024

No	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Target capaian renstra s/d Tahun 2024	Perkiraan Capaian Renstra s/d Tahun 2024	Faktor pendorong/ penghambat	Rencana Tindak Lanjut
1	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	0,95	1. Tidak memenuhi target	koordinasi yang baik untuk pencapaian kinerja	mempertahankan kinerja dengan melakukan koordinasi yang baik
		1	2. Memenuhi target		
		1	3. Memenuhi target		
2	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1	Memenuhi Target	koordinasi yang baik untuk pencapaian kinerja	mempertahankan kinerja dengan melakukan koordinasi yang baik
3	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	0,33	Tidak Memenuhi Target	koordinasi dengan SKPD dan pihak-pihak terkait penyusunan KUA dan PPAS	pendampingan dengan SKPD dan koordinasi mendalam dengan stakeholder
4	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	0,33	Tidak Memenuhi Target	koordinasi dengan SKPD dan pihak-pihak terkait penyusunan perubahan KUA dan perubahan PPAS	pendampingan dengan SKPD dan koordinasi mendalam dengan stakeholder

No	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Target capaian renstra s/d Tahun 2024	Perkiraan Capaian Renstra s/d Tahun 2024	Faktor pendorong/ penghambat	Rencana Tindak Lanjut
5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD	0,33	Tidak Memenuhi Target	melakukan koordinasi dan mendampingi proses penyusunan RKA SKPD hingga verifikasi	pendampinga n dengan SKPD
6	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA- SKPD	0,33	Tidak Memenuhi Target	melakukan koordinasi dan mendampingi proses penyusunan perubahan RKA SKPD hingga verifikasi	pendampinga n dengan SKPD
7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	0,33	Tidak Memenuhi Target	melakukan koordinasi dengan pihak terkait serta memperhatik an peraturan terkait penyusunan peraturan terkait APBD	koordinasi mendalam dengan stakeholder
8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	0,33	Tidak Memenuhi Target	melakukan koordinasi dengan pihak terkait serta memperhatik an peraturan terkait penyusunan peraturan terkait perubahan APBD	koordinasi mendalam dengan stakeholder
9	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	0,33	Tidak Memenuhi Target	koordinasi yang baik untuk pencapaian kinerja	Evaluasi berkala atas kendala yang sering dihadapi SKPD
10	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	1	Memenuhi Target	koordinasi yang baik untuk pencapaian kinerja	mempertahan kan kineja dengan melakukan koordinasi yang baik
11	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	0,33	Tidak Memenuhi Target	Rekonsiliasi dengan Bank Jatim	melakukan evaluasi berkala dengan SKPD dan Bank Jatim

No	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Target capaian renstra s/d Tahun 2024	Perkiraan Capaian Renstra s/d Tahun 2024	Faktor pendorong/ penghambat	Rencana Tindak Lanjut
12	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	0,33	Tidak Memenuhi Target	koordinasi dengan penerima dana perimbangan dan dana transfer serta dengan KPPN Malang selaku penyalur dana	Koordinasi berkala dengan stakeholder dana perimbangan dan dana transfer
13	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	0,33	Tidak Memenuhi Target	melakukan rekonsiliasi data secara berkala	evaluasi berkala
14	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	0,33	Tidak Memenuhi Target	melakukan rekonsiliasi data secara berkala dengan instansi- instansi yang terlibat	rekonsiliasi berkelanjutan
15	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawa ban Sub Kegiatan	0,33	Tidak Memenuhi Target	koordinasi yang baik untuk pencapaian kinerja	mengikuti peraturan- peraturan baru serta mengikuti perkembangan keadaan yang ada
16	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	0,33	Tidak Memenuhi Target	melakukan evaluasi atas progres pekerjaan dan kendala yang sering dialami oleh SKPD	pembinaan berkala

No	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Target capaian renstra s/d Tahun 2024	Perkiraan Capaian Renstra s/d Tahun 2024	Faktor pendorong/ penghambat	Rencana Tindak Lanjut
17	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	1	Memenuhi Target	koordinasi yang baik untuk pencapaian kinerja	mempertahankan kineja dengan melakukan koordinasi yang baik
18	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	0,33	Tidak Memenuhi Target	melakukan rekonsiliasi berkala dengan seluruh SKPD	rekonsiliasi berkelanjutan
19	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	0,33	Tidak Memenuhi Target	melakukan rekonsiliasi berkala dengan seluruh SKPD	rekonsiliasi berkelanjutan
20	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	0,33	Tidak Memenuhi Target	Melakukan koordinasi dengan SKPD dan BLUD untuk sinkronisasi data laporan keuangan	sikronisasi bertahap dan berkelanjutan
21	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	0,33	Tidak Memenuhi Target	koordinasi yang baik untuk pencapaian kinerja	mempertahankan kineja dengan melakukan koordinasi yang baik
22	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	0,33	Tidak Memenuhi Target	koordinasi yang baik untuk pencapaian kinerja	sikronisasi bertahap dan berkelanjutan

No	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Target capaian renstra s/d Tahun 2024	Perkiraan Capaian Renstra s/d Tahun 2024	Faktor pendorong/ penghambat	Rencana Tindak Lanjut
23	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	0,33	Tidak Memenuhi Target	melakukan evaluasi atas progres pekerjaan dan kendala yang sering dialami oleh SKPD	Evaluasi berkala atas kendala yang sering dihadapi SKPD
24	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1	Memenuhi Target	koordinasi yang baik untuk pencapaian kinerja	mempertahankan kineja dengan melakukan koordinasi yang baik
25	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	0,33	Tidak Memenuhi Target	Koordinasi dengan <i>stakeholder</i> terkait investasi Pemerintah Daerah	rekonsiliasi berkelanjutan dengan pihak yang terlibat
26	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	0,33	Tidak Memenuhi Target	melakukan revidu berkala dan rekonsiliasi dengan penerima bantuan keuangan	rekonsiliasi berkelanjutan dengan pihak yang terlibat
27	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	0,33	Tidak Memenuhi Target	melakukan koordinasi dengan SKPD penyalur dana darurat dan mendesak	rekonsiliasi berkelanjutan dengan pihak yang terlibat
28	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	0,33	Tidak Memenuhi Target	melakukan revidu berkala dan rekonsiliasi dengan penerima DBH	rekonsiliasi berkelanjutan dengan pihak yang terlibat
29	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1	Memenuhi Target	koordinasi yang baik untuk pencapaian kinerja	mempertahankan kineja dengan melakukan koordinasi yang baik
30	Pengelolaan Barang Milik Daerah	1	Memenuhi Target	koordinasi yang baik untuk pencapaian kinerja	mempertahankan kineja dengan melakukan koordinasi yang baik

No	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Target capaian renstra s/d Tahun 2024	Perkiraan Capaian Renstra s/d Tahun 2024	Faktor pendorong/ penghambat	Rencana Tindak Lanjut
31	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	0,33	Tidak Memenuhi Target	melakukan koordinasi dan rekonsiliasi dengan Pengurus Barang SKPD	menginforma sikan jadwal penyusunan perencanaan kebutuhan BMD
32	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	0,33	Tidak Memenuhi Target	melakukan reviu atas kebutuhan kebijakan pengelolaan BMD dan membuat kebijakan yang dibutuhkan	mengikuti situasi terbaru dan membuat kebijakan yang diperlukan berdasarkan situasi terbaru
33	Penatausahaan Barang Milik Daerah	0,33	Tidak Memenuhi Target	melakukan rekonsiliasi berkala dengan Pengurus Barang	melakukan penatausaha an secara berkala dengan SKPD
34	Pengamanan Barang Milik Daerah	0,33	Tidak Memenuhi Target	Melakukan koordinasi atas BMD yang perlu diamankan, baik secara fisik maupun secara hukum	melakukan pendataan atas BMD yang harus diamankan
35	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	0,33	Tidak Memenuhi Target	melakukan pengawasan secara berkala dan pengendalian atas pengelolaan BMD	melakukan evaluasi berkala atas kebutuhan pengawasan dan pengendalian
36	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangan an, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	0,33	Tidak Memenuhi Target	koordinasi yang baik dengan pengurus barang	evaluasi berkala dengan pengurus barang
37	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	0,33	Tidak Memenuhi Target	rekonsiliasi berkala dengan pengurus barang atas penyusunan laporan BMD	rekonsiliasi berkala

No	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Target capaian renstra s/d Tahun 2024	Perkiraan Capaian Renstra s/d Tahun 2024	Faktor pendorong/ penghambat	Rencana Tindak Lanjut
38	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	0,33	Tidak Memenuhi Target	rekonsiliasi berkala dengan pengurus barang atas penyusunan laporan BMD	mmebuat jadwal penyusunan laporan dan melakukan rekonsiliasi secara bertahap dan berkelanjutan
39	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	0,91	Tidak Memenuhi Target	koordinasi yang baik untuk pencapaian kinerja	mempertahan kan kineja dengan melakukan koordinasi yang baik
40	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	0,21	Tidak Memenuhi Target	koordinasi yang baik untuk pencapaian kinerja	mempertahan kan kineja dengan melakukan koordinasi yang baik
		0,5			mempertahan kan kineja dengan melakukan koordinasi yang baik
41	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	0,33	Tidak Memenuhi Target	Melakukan reviu atas capaian pajak periode sebelumnya	koordinasi terkait target kinerja
42	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	0,26	Tidak Memenuhi Target	melakukan koordinasi untuk mencari sumber baru atas pajak daerah	evaluasi berkala atas objek pajak baru
43	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	0,33	Tidak Memenuhi Target	koordinasi dengan pihak terkait informasi pajak daerah	proaktif atas perbaruan pajak
44	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	0,33	Tidak Memenuhi Target	melakukan koordinasi dengan pihak terkait	evaluasi dan sinkronisasi data pajak secara bertahap
45	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	0,33	Tidak Memenuhi Target	melakukan reviu berkala atas data pajak	evaluasi dan sinkronisasi data pajak secara bertahap

No	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Target capaian renstra s/d Tahun 2024	Perkiraan Capaian Renstra s/d Tahun 2024	Faktor pendorong/ penghambat	Rencana Tindak Lanjut
46	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	0,32	Tidak Memenuhi Target	melakukan koordinasi	evaluasi dan sinkronisasi data pajak secara bertahap
47	Penetapan Wajib Pajak Daerah	0,3	Tidak Memenuhi Target	melakukan koordinasi dengan pihak terkait atas wajib pajak	melakukan koordinasi dengan wajib pajak
48	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	1	Tidak Memenuhi Target	melakukan pelayanan prima kepada masyarakat	memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat
49	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	0,33	Tidak Memenuhi Target	melakukan rekonsiliasi berkala dengan pemungut pajak dan wajib pajak	evaluasi dan sinkronisasi data pajak secara bertahap
50	Penagihan Pajak Daerah	0,33	Tidak Memenuhi Target	melakukan reviu berkala terhadap wajib pajak	reviu berkala
51	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	0,33	Tidak Memenuhi Target	melakukan koordinasi dengan wajib pajak terkait pengusulan keberatan pajak	koordinasi dengan wajib pajak dan pengambil keputusan keringanan pajak
52	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	0,33	Tidak Memenuhi Target	koordinasi yang baik untuk pencapaian kinerja	evaluasi dan sinkronisasi data pajak secara bertahap
53	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	0,33	Tidak Memenuhi Target	koordinasi yang baik untuk pencapaian kinerja	evaluasi dan sinkronisasi data pajak secara bertahap

Berdasarkan tabel diatas, kinerja BPKPD atas perkiraan capaian renstra sampai dengan tahun 2024 hampir keseluruhan kurang dari 100% sehingga dapat dikatakan sebagai “Tidak memenuhi target”. Hal

ini dikarenakan formulasi perhitungan membandingkan perkiraan capaian tahun 2024 dengan kinerja total pada Renstra Tahun 2024-2026. Terdapat beberapa indikator yang memenuhi target dikarenakan target setiap tahun sama dengan target total kinerja Renstra 2024-2026, indikator tersebut ada pada:

- Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
- Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
- Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
- Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
- Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah
- Sub Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BPKPD

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi sebagai Organisasi Perangkat Daerah. Oleh karena itu, tugas pokok dan fungsinya merupakan leading sector dalam pengelolaan keuangan seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Pasuruan. Sebagai leading sector tersebut terjabarkan dalam fungsi :

- a. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),
- b. Penghimpunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Pasuruan,
- c. Penghimpunan Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Pasuruan,
- d. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pasuruan,
- e. Penyusunan Pertanggungjawaban APBD

- f. Pengelolaan Aset Daerah,
- g. Pengelolaan Investasi Daerah,
- h. Pengelolaan Pajak Daerah,
- i. Sebagai Leading Sektor OPD Kabupaten Pasuruan Penghasil Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dalam melaksanakan kinerjanya Tujuan BPKPD pada Renstra 2024-2026 yaitu:

“Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah”

Indikator tujuan dari tujuan renstra 2024-2026 tersebut adalah:

- 1. Indikator Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah,
- 2. Indeks Pengelolaan Aset
- 3. Presentase kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah

Terkait sasaran renstra juga mengalami perubahan. Sasaran pada renstra 2024-2026 yaitu:

- 1. Meningkatnya Perencanaan penganggaran keuangan daerah

Indikator: Persentase hasil verifikasi dokumen perencanaan SKPD yang berkualitas.

- 2. Meningkatnya penatausahaan keuangan daerah

Indikator: Persentase laporan keuangan daerah SKPD yang sesuai SAP dan terkumpul selesai tepat waktu

- 3. Meningkatnya manajemen aset yang akuntabel

Indikator: Persentase SKPD yang melakukan pengelolaan aset sesuai ketentuan

- 4. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Indikator: Persentase SKPD yang melakukan pengelolaan aset sesuai ketentuan

- 5. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD

Indikator: Nilai SAKIP.

Pencapaian kinerja pelayanan BPKPD diuraikan dalam target dan realiasi hingga proyeksi pada tabel 2.2 (T-C.30) berdasarkan indikator tujuan dan sasaran, SPM/standar nasional, dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK).

Tabel 2.2 (T-C.30)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Kabupaten Pasuruan

No	Indikator	SPM/ Standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun n-2 (2023)	Tahun n-1 (2024)	Tahun n (2025)	Tahun n+1 (2026)	Tahun n-2 (2023)	Tahun n-1 (2024)	Tahun n (2025)	Tahun n+1 (2026)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Tujuan											
	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah				71,05	72	73	71,048		72	73	realisasi tahun 2023 lebih besar dari target kinerja tahun 2024 sehingga kinerja dinaikan menjadi 71,05
	Indeks Pengelolaan Aset				85	90	95			90	95	
	Persentase kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah				22,6	21,65	22,5	22,54		22,65	22,70	realisasi tahun 2023 lebih besar dari target kinerja tahun 2024 sehingga kinerja dinaikan menjadi 22,60
	Sasaran											

No	Indikator	SPM/ Standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun n-2 (2023)	Tahun n-1 (2024)	Tahun n (2025)	Tahun n+1 (2026)	Tahun n-2 (2023)	Tahun n-1 (2024)	Tahun n (2025)	Tahun n+1 (2026)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Persentase hasil verifikasi dokumen perencanaan SKPD yang berkualitas.				90%	95%	100%		96%	96%	100%	
	Persentase laporan keuangan daerah SKPD yang sesuai SAP dan terkumpul selesai tepat waktu				95%	97%	100%		100%	100%	100%	
	Persentase SKPD yang melakukan pengelolaan aset sesuai ketentuan				96%	98%	100%		100%	98%	100%	
	Persentase peningkatan PAD				3.5%	3.75%	4%			3.75%	4%	

No	Indikator	SPM/ Standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun n-2 (2023)	Tahun n-1 (2024)	Tahun n (2025)	Tahun n+1 (2026)	Tahun n-2 (2023)	Tahun n-1 (2024)	Tahun n (2025)	Tahun n+1 (2026)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah				83,5	84	84,5			84	84,5	
			IKK									
			Rasio belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan		9,17%	9,26%	9,38%	6,06%		9,26%	9,38%	alokasi belanja pegawai diluar tunjangan guru dialokasikan paling tinggi 30% dari total belanja APBD. Untuk target yang diatur dalam mandatory spending yaitu batas atas.
			Rasio PAD		20,04%	20,23%	20,48%	22,56%		20,23%	20,48%	Rasio PAD pada renstra dihitung berdasarkan anggaran proyeksi awal tahun 2024-2026
			Rasio belanja urusan pemerintahan umum (dikurangi transfer expenditure)		77,08%	77,34%	78,99%	65,58%		77,34%	78,99%	pada target terdapat perbedaan formula perhitungan. Formula yang benar untuk komponen belanja

No	Indikator	SPM/ Standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun n-2 (2023)	Tahun n-1 (2024)	Tahun n (2025)	Tahun n+1 (2026)	Tahun n-2 (2023)	Tahun n-1 (2024)	Tahun n (2025)	Tahun n+1 (2026)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
												urusan umum seharsnya dikurangi dengan belanja modal.
			Opini Laporan Keuangan		WTP	WTP	WTP	WTP		WTP	WTP	
			Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD		-7,85%	-7,50%	-8,06%	-4,58%		-7,50%	-8,06%	deviasi dinilai sebagai angka mutlak. Target yang baik seharusnya menurun. Target renstra dihitung berdasarkan proyeksi awal anggaran sementara. Pada saat penyusunan renstra, sudah ada proyeksi anggaran tahun 2024 yang lebih sesuai namun untuk 2025 dan 2026 masih proyeksi sementara,.
			Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD		-1,50%	1,85%	2,25%	21,26%		1,85%	2,25%	deviasi dinilai sebagai angka mutlak. Target yang baik seharusnya

No	Indikator	SPM/ Standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun n-2 (2023)	Tahun n-1 (2024)	Tahun n (2025)	Tahun n+1 (2026)	Tahun n-2 (2023)	Tahun n-1 (2024)	Tahun n (2025)	Tahun n+1 (2026)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
												menaik. Target renstra dihitung berdasarkan proyeksi awal anggaran sementara. Pada saat penyusunan renstra, sudah ada proyeksi anggaran tahun 2024 yang lebih sesuai namun untuk 2025 dan 2026 masih proyeksi sementara,.
			Manajemen Aset		2790105	2851487	2914219	4	4	2851487	2914219	ada perbedaan maksud dari pengartian manajemen aset. Target yang diaang merupakan jumlah aset yang dikelola namun target maksimal berjumlah 4 dari sub indikator dibawahnya.
			Apakah ada daftar aset tetap? (Ya/Tidak)		ya	ya	ya	ya	ya	ya	ya	

No	Indikator	SPM/ Standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun n-2 (2023)	Tahun n-1 (2024)	Tahun n (2025)	Tahun n+1 (2026)	Tahun n-2 (2023)	Tahun n-1 (2024)	Tahun n (2025)	Tahun n+1 (2026)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Apakah ada manual untuk menyusun daftar aset tetap? (Ya/Tidak)		ya	ya	ya	ya	ya	ya	ya	
			Apakah ada proses inventarisasi aset tahunan? (Ya/Tidak)		ya	ya	ya	ya	ya	ya	ya	
			Apakah nilai aset tercantum dalam laporan anggaran? (Ya/Tidak)		ya	ya	ya	ya	ya	ya	ya	
			Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya		1,98%	2,14%	2,12%	7,9586		2,14%	2,12%	Target yang baik seharusnya menurun. Target renstra dihitung berdasarkan proyeksi awal anggaran sementara. Pada saat penyusunan renstra, sudah ada proyeksi anggaran tahun 2024 yang lebih sesuai namun untuk 2025 dan 2026 masih proyeksi sementara.

No	Indikator	SPM/ Standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun n-2 (2023)	Tahun n-1 (2024)	Tahun n (2025)	Tahun n+1 (2026)	Tahun n-2 (2023)	Tahun n-1 (2024)	Tahun n (2025)	Tahun n+1 (2026)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			IKK tambahan									
			Persentase realisasi belanja urusan pelayanan dasar tahun 2022					93,88%				Indikator ini merupakan indikator tambahan. Target tidak tercantum pada renstra dikarenakan indikator ini muncul setelah penyusunan renstra.
			Persentase Penurunan SILPA					-27,166				Indikator ini merupakan indikator tambahan. Target tidak tercantum pada renstra dikarenakan indikator ini muncul setelah penyusunan renstra.
			Pertambahan Nilai Aset Tetap					5,4571				Indikator ini merupakan indikator tambahan. Target tidak tercantum pada renstra dikarenakan indikator ini muncul

No	Indikator	SPM/ Standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun n-2 (2023)	Tahun n-1 (2024)	Tahun n (2025)	Tahun n+1 (2026)	Tahun n-2 (2023)	Tahun n-1 (2024)	Tahun n (2025)	Tahun n+1 (2026)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
												setelah penyusunan renstra.

Dari tabel 2.2 dapat dilihat target dan realisasi atas tujuan, sasaran dan indikator Kinerja Kunci dari BPKPD atas kinerja tahun 2023-2026. Berdasarkan tabel tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Indikator IPKD pada tahun 2023, mendapat nilai 71,048. Nilai ini sudah lebih tinggi dari target awal tahun 2024, yaitu sebesar 70. Dikarenakan hal tersebut, target untuk 2024 dinaikkan diatas realisasi tahun 2023, yaitu menjadi 71,05.
- Realisasi Indikator persentase kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah pada tahun 2023 yaitu sebesar 22,56%. Nilai tersebut lebih tinggi dari target 2024 yang sebesar 20,65%. Dikarenakan hal tersebut, target untuk 2024 dinaikkan diatas realisasi tahun 2023, yaitu menjadi 22,60%.
- Realisasi Indikator Nilai Sakip pada tahun 2023 sebesar 23,05. Untuk tahun 2024 target atas indikator ini senilai 23,50. Realisasi rasio belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan pada tahun 2023 adalah sebesar 6.06%. Nilai ini kurang dari target 2023. Hal ini dikarenakan jumlah belanja pada APBD tahun 2023 lebih tinggi dari tahun 2022 serta kebutuhan gaji non guru dan tenaga kesehatan pada tahun 2023 lebih kecil daripada tahun 2022.
- Realisasi Rasio PAD pada tahun 2023 sebesar 22.56%. nilai ini lebih besar dari target 2023.
- Realisasi Rasio belanja urusan pemerintahan umum (dikurangi transfer expenditure) pada tahun 2023 sebesar 65.58%. Nilai ini kurang dari target. Hal ini dikarenakan pada formula perhitungan terdapat perubahan pengartian substansi

komponen perhitungannya. Formula perhitungan atas indikator ini adalah jumlah belanja urusan pemerintahan dikurangi transfer expenditure lalu dibagi jumlah belanja APBD. Pada target 2023 substansi belanja urusan pemerintahan dihitung atas belanja APBD total namun pada realisasinya substansi tersebut dihitung atas realisasi belanja total dikurangi dengan total belanja modal. Subtansi transfer expenditure pada target 2023 dihitung atas belanja transfer, namun pada realisasi, substansi tersebut dihitung atas belanja hibah, belanja sosial, belanja subsidi, belanja bunga, belanja Bagi Hasil, belanja Bantuan Keuangan dan belanja Bantuan Tidak Terduga.

- Realisasi indikator Opini Laporan Keuangan pada tahun 2023 sama dengan target 2023, yaitu mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian.
- Realisasi Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD pada tahun 2023 yaitu -4.58%. Nilai ini melebihi target 2023 yang sebesar -5,35%.
- Realisasi Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD pada tahun 2023 yaitu 21,43%. Nilai ini melebihi target 2023.
- Realisasi manajemen aset pada tahun 2023 sebesar 4. Nilai ini kurang dari target dikarenakan terdapat perubahan pengartian substansi komponen perhitungannya. Pada target 2023 komponen ini dihitung atas jumlah aset yang dipelihara oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan, namun pada realisasinya nilai ini merupakan penambahan realisasi atas komponen manajemen aset dibawahnya.

- Realisasi Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya, pada tahun 2023 sebesar 7.95%. Nilai ini melebihi target 2023.
- Pada pertengahan tahun 2023, BPKPD mengampu IKK tambahan atas indikator Persentase realisasi belanja urusan pelayanan dasar tahun 2022, Persentase Penurunan SILPA dan Pertambahan Nilai Aset Tetap. Realisasi indikator Persentase realisasi belanja urusan pelayanan dasar tahun 2022 adalah senilai 93.88%. Realisasi indikator Persentase Penurunan SILPA adalah senilai -27.166%. Realisasi indikator Pertambahan Nilai Aset Tetap adalah sebesar 5.4571%.

Indikator tujuan dan sasaran BPKPD kecuali dalam pelaksanaan SAKIP, baru digunakan pada tahun 2024 ini. Pada tahun sebelumnya, indikator-indikator tersebut belum digunakan oleh BPKPD Kabupaten Pasuruan. Kendala yang dihadapi oleh BPKPD Kabupaten Pasuruan terkait dengan Pencapaian target tujuan dan sasaran yaitu :

- Indikator IPKD dan indeks pengelolaan Aset memiliki banyak unsur yang harus dilengkapi.
- Pelaksanaan indikator IPKD melibatkan banyak pihak diluar OPD BPKPD sendiri.
- Penggunaan Indikator IPKD dan Indeks pengelolaan Aset baru pertama kali dilakukan sehingga memerlukan proses penyesuaian dan koordinasi lebih lanjut.
- Terdapat perubahan regulasi terkait pajak daerah. Pada regulasi tersebut terdapat perubahan pada tarif pajak serta nomenklatur pajak.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi BPKPD

Isu-isu penting merupakan fokus permasalahan pokok yang harus mendapatkan jawaban melalui prioritas program yang akan dijalankan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Isu penting yang ingin diangkat oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD), diantaranya dengan merevitalisasi kebijakan terkait pajak daerah dan retribusi daerah serta meningkatkan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah melalui pemeriksaan Pajak Daerah kepada Wajib Pajak Daerah.
2. Kurangnya tertib Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan melakukan inventarisasi aset yang belum tercatat dan mengidentifikasi penggunaan/pemanfaatannya serta pengamanan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Kurangnya pengelolaan peluang atas objek baru yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan daerah.
4. Memperhatikan Mandatory Spending dalam penganggaran APBD. Anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% dari total belanja daerah. Anggaran Kesehatan dialokasikan sesuai ketentuan perundang-undangan. Anggaran infrastruktur paling rendah 40% dari total belanja daerah diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepala daerah dan/atau desa.
5. Dalam mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Bidang Aset melaksanakan optimalisasi pemanfaatan aset daerah. Optimalisasi dilakukan dengan beberapa upaya yaitu:

- Pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) berupa sewa dan pinjam pakai dibuatkan perjanjian dan masa berlakunya.
- Hasil penarikan sewa disetorkan ke kas daerah sebagai penambah PAD
- Pelaksanaan lelang atas barang yang sudah tidak digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan
- Hasil lelang BMD disetorkan ke kas daerah sebagai penambah PAD
- Perencanaan pendanaan melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)

REKAPITULASI ASET TETAP PER RINCIAN OBJEK

Kode	Uraian	Jumlah	Jumla h Sewa	Nilai total KIB
01.03.00	Aset Tetap	2,712,870		7,946,756,933,321.32
01.03.01.00	Tanah	3,063	152	1,242,108,717,192.08
01.03.02.00	Peralatan dan Mesin	711,646		1,723,863,670,766.94
01.03.03.00	Gedung dan Bangunan	6,087		2,263,373,288,625.14
01.03.04.00	Jalan, Jaringan dan Irigasi	5,523		2,645,367,364,499.98
01.03.05.00	Aset Tetap Lainnya	1,986,401		68,622,678,802.18
01.03.06.00	Konstruksi dalam Pengerjaan	150		3,421,213,435.00
01.03.00	Aset Lainnya	61,471		90,503,068,483.01
01.03.03.00	Aset tidak berwujud	43		4,693,311,285.50
01.03.04.00	Aset Lain-lain	61,428		85,809,757,197.51
JUMLAH		2,774,341		8,037,260,001,804.33

Dengan memunculkan isu-isu penting sebagaimana dikemukakan diatas, diharapkan dapat meningkatkan kinerja dalam mencapai tujuan-tujuan yang dituangkan dalam program kerja.

Berkaitan dengan prioritas pembangunan daerah di tahun 2025, BPKPD berperan dalam prioritas pembangunan daerah ke-4 yaitu "Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Berdampak" dengan fokus sebagai pendukung peningkatan tata kelola aset pemda (tanah dan bangunan) serta Peningkatan RB tematik serta akuntabilitas kinerja dan keuangan. Sebagai pendukung peningkatan tata kelola aset pemda (tanah dan bangunan), lebih khususnya hal ini dilakukan oleh Bidang Aset. Sebagai pendukung Peningkatan RB tematik serta akuntabilitas kinerja dan keuangan, dilakukan oleh bidang Anggaran dan Belanja serta bidang Akuntansi.

Untuk meningkatkan pengelolaan aset pemda, bidang aset telah melakukan beberapa kegiatan. Kegiatan tersebut yaitu penatausahaan Barang Milik Daerah, pengamanan Barang Milik Daerah, pengawasan dan pengendalian pengelolaan Barang Milik Daerah serta optimalisasi terkait penggunaan Barang Milik Daerah, pemanfaatan Barang Milik Daerah, pemindahtanganan Barang Milik Daerah, pemusnahan Barang Milik Daerah dan penghapusan Barang Milik Daerah. Diluar hal tersebut, bidang aset juga melakukan kontrol melalui pelaksanaan penyusunan kebutuhan Barang Milik Daerah dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah. Sejalan dengan bidang aset, baik bidang akuntansi maupun bidang anggaran dan belanja turut serta berperan dalam mendukung terlaksananya Peningkatan RB tematik serta akuntabilitas kinerja dan keuangan. Bidang anggaran dan belanja berperan dalam proses pengelolaan APBD serta kas daerah daerah, sedangkan bidang akuntansi berperan secara umum dalam mengontrol keuangan daerah.

BPKPD merupakan OPD penunjang yang memegang kewenangan terkait aset daerah, keuangan serta pendapatan daerah. Sebagai unsur penunjang, BPKPD mendukung pelaksanaan proyek strategis. BPKPD, dalam hal ini bidang Aset, akan melakukan pengukuran tanah dengan BPN serta melakukan verifikasi ke lokasi/perangkat desa terkait status tanah. Proyek strategis yang didukung oleh BPKPD yaitu:

- a. Pengelolaan Kawasan Pariwisata AATP
- b. Revitalisasi Bang Kodir untuk co-working space industri kreatif
- c. Pembangunan Infrastruktur Perkotaan

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah. Rancangan awal RKPD Kabupaten Pasuruan disusun berpedoman pada RPD Kabupaten Pasuruan 2024 – 2026 dan RPJPD 2005-2025 serta mengacu pada RPJMD 2025 – 2029 Provinsi Jawa Timur. Rancangan awal RKPD Kabupaten Pasuruan mencakup: Pendahuluan, evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu. Adapun Penyusunan Rancangan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan pendapatan Daerah Tahun 2025 telah mengacu pada rancangan awal RKPD Kabupaten Pasuruan. Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2025 Badan Pengelolaan Keuangan dan pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan disajikan pada Tabel 2.4 (T-C.31).

Tabel 2.4 (T-C.31)
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kab. Pasuruan	Persentase dokumen administrasi PD yang baik	97%	15.000.000.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kab. Pasuruan	Persentase dokumen administrasi PD yang baik	97%	447.070.053.185	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Pasuruan	Persentase konsistensi indikator kinerja program/kegiatan/ subkegiatan pada dok. Rencana, anggaran, dan evaluasi	100%	104.900.040	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Pasuruan	Persentase konsistensi indikator kinerja program/kegiatan/ subkegiatan pada dok. Rencana, anggaran, dan evaluasi	100%	86.556.478	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	58.563.120	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	65.920.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	46.336.920	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	20.636.478	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Pasuruan	Persentase laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan	98%	13.902.310.082	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Pasuruan	Persentase laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan	100%	444.881.503.299	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pasuruan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	98 Orang/bln	13.485.887.642	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pasuruan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	81 Orang/bln	444.378.523.299	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	75 Dokumen	416.422.440	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	75 Dokumen	502.980.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Pasuruan	Persentase dokumen kepegawaian yang akurat dan sesuai ketentuan	100%	103.852.088	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Pasuruan	Persentase dokumen kepegawaian yang akurat dan sesuai ketentuan	100%	134.852.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Pasuruan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	160 Orang	103.852.088	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Pasuruan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	160 Orang	134.852.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Pasuruan	Persentase pemenuhan kebutuhan umum PD	100%	231.583.905	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Pasuruan	Persentase pemenuhan kebutuhan umum PD	100%	195.117.120	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Pasuruan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket	9.236.821	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor	Kab. Pasuruan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket	10.733.700	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Pasuruan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30 Paket	26.015.695	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Pasuruan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30 Paket	25.941.000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Pasuruan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	50 Paket	78.393.309	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Pasuruan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	50 Paket	19.102.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Pasuruan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	50 Paket	16.266.228	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Pasuruan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	50 Paket	21.128.080	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Pasuruan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	20 Paket	18.915.695	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Pasuruan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	20 Paket	18.689.490	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	30 Laporan	7.471.170	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	30 Laporan	8.892.850	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	180 Laporan	75.284.987	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	180 Laporan	90.630.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Pasuruan	Persentase pengadaan BMD yang terealisasi	100%	235.529.029	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Pasuruan	Persentase pengadaan BMD yang terealisasi	100%	7.265.000	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Pasuruan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	63.000.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Pasuruan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0	0	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Pasuruan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	126.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Pasuruan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	0	
	Pengadaan Mebel	Kab. Pasuruan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit	18.782.499	Pengadaan Mebel	Kab. Pasuruan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	7.265.000	Target Kinerja pada tahun 2025 menyesuaikan dengan keadaan anggaran
	Pengadaan Peralatan Mesin dan lainnya	Kab. Pasuruan	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	20 Unit	7.746.530	Pengadaan Peralatan Mesin dan lainnya	Kab. Pasuruan	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	0	0	
	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Kab. Pasuruan	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	10 Unit	20.000.000	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Kab. Pasuruan	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	0	0	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Pasuruan	Persentase jasa penunjang operasional kantor yang tersedia	98%	82.277.812	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Pasuruan	Persentase jasa penunjang operasional kantor yang tersedia	98%	1.516.908.288	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5 Laporan	94.500	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0	0	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	30 Laporan	49.584.812	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	30 Laporan	1.465.455.288	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Laporan	598.500	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Laporan	600.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	50 Laporan	32.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	50 Laporan	50.853.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Pasuruan	Persentase BMD kondisi baik	100%	339.547.045	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Pasuruan	Persentase BMD kondisi baik	100%	247.851.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Pasuruan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	25 Unit	17.737.356	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Pasuruan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	25 Unit	15.570.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Pasuruan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	80 Unit	150.096.492	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Pasuruan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	80 Unit	124.229.500	
	Pemeliharaan Mebel	Kab. Pasuruan	Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 Unit	5.040.000	Pemeliharaan Mebel	Kab. Pasuruan	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0	0	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Pasuruan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 Unit	42.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Pasuruan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 Unit	38.051.500	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Pasuruan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	124.673.197	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Pasuruan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	70.000.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Kab. Pasuruan	1. Porsentase penyusunan dokumen penganggaran yang baik secara tepat waktu dan sesuai regulasi yang berlaku	95%	738.108.926.323	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Kab. Pasuruan	1. Porsentase penyusunan dokumen penganggaran yang baik secara tepat waktu dan sesuai regulasi yang berlaku	95%	670.868.039.784	
		Kab. Pasuruan	2. Pengelolaan pendapatan dan belanja daerah sesuai ketentuan yang berlaku	100%			Kab. Pasuruan	2. Pengelolaan pendapatan dan belanja daerah sesuai ketentuan yang berlaku	100%	-	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Kab. Pasuruan	3. Porsentase kelengkapan dokumen LKPD yang selesai tepat waktu	100%			Kab. Pasuruan	3. Porsentase kelengkapan dokumen LKPD yang selesai tepat waktu	100%	-	
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Kab. Pasuruan	Prosentase Penyelesaian verifikasi penyusunan dokumen anggaran daerah tepat waktu	100%	5.795.249.430	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Kab. Pasuruan	Prosentase Penyelesaian verifikasi penyusunan dokumen anggaran daerah tepat waktu	100%	588.903.298	
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	4 Dokumen	707.110.698	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	4 Dokumen	124.413.925	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	4 Dokumen	521.541.978	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	4 Dokumen	51.707.967	
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Kab. Pasuruan	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	60 Dokumen	308.066.000	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Kab. Pasuruan	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	57 Dokumen	30.917.827	jumlah target menyesuaikan dengan jumlah

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											SKPD yang ada di Kab. Pasuruan
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Kab. Pasuruan	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	60 Dokumen	348.439.960	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Kab. Pasuruan	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	57 Dokumen	32.858.767	jumlah target menyesuaikan dengan jumlah SKPD yang ada di Kab. Pasuruan
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kab. Pasuruan	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	2.567.833.166	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kab. Pasuruan	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	242.152.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kab. Pasuruan	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	572.013.318	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kab. Pasuruan	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	54.801.071	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	2 dokumen	307.999.956	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	0	0	
	Pembinaan Perencanaan Panganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Panganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	100 Orang	462.244.354	Pembinaan Perencanaan Panganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Panganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	100 Orang	52.051.741	
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Kab. Pasuruan	Prosentase dokumen pendapatan dan belanja daerah yang terselesaikan	100%	3.179.257.410	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Kab. Pasuruan	Prosentase dokumen pendapatan dan belanja daerah yang terselesaikan	100%	356.794.800	
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12 Dokumen	592.882.698	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12 Dokumen	84.386.046	
	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi,	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi,	50 Dokumen	1.884.647.712	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi,	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi,	50 Dokumen	207.335.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya		Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya			Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya		Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil	2 Laporan	105.497.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil	2 Laporan	6.884.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)					Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)			
	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	268 Dokumen	89.770.000	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	268 Dokumen	8.094.754	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Kab. Pasuruan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 Dokumen	119.960.000	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Kab. Pasuruan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 Dokumen	10.683.000	
	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	100 Orang	386.500.000	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	100 Orang	39.412.000	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Kab. Pasuruan	Persentase Laporan Keuangan disusun tepat waktu dan sesuai standar	100%	2.146.418.416	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Kab. Pasuruan	Persentase Laporan Keuangan disusun tepat waktu dan sesuai standar	100%	283.517.401	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	12 Laporan	228.228.096	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	12 Laporan	13.368.873	
	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	4 Dokumen	233.309.680	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	4 Dokumen	17.299.850	
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	7 Laporan	554.001.950	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	7 Laporan	75.833.890	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	4 Dokumen	494.784.700	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	4 Dokumen	40.931.950	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	4 Dokumen	133.569.640	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	4 Dokumen	38.917.838	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyusunan kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintah daerah	Kab. Pasuruan	Jumlah Kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintah daerah	1 dokumen	55652960	Penyusunan kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintah daerah	Kab. Pasuruan	Jumlah Kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintah daerah	0	0	
	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	57 Orang	502.434.350	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	57 Orang	97.165.000	
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Kab. Pasuruan	Prosentase dokumen urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah	100%	725.597.001.066	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Kab. Pasuruan	Prosentase dokumen urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah	100%	669.638.824.285	
	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	2 Laporan	647.210.668	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	2 Laporan	70.698.200	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	7 Laporan	601.557.238.43 0	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	7 Laporan	584.893.706.68 0	
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	10 Laporan	77.776.844.601	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	10 Laporan	30.000.000.000	
	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	3 Laporan	47.007.207.368	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	3 Laporan	54.674.419.405	
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Kab. Pasuruan	Persentase penggunaan BMD SKPD yang berstatus	100%	1.391.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Kab. Pasuruan	Persentase penggunaan BMD SKPD yang berstatus	100%	909.496.325	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab. Pasuruan	Persentase penyusunan Dokumen dan Laporan Barang Milik Daerah yang sesuai standar	100%	1.391.000.000	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab. Pasuruan	Persentase penyusunan Dokumen dan Laporan Barang Milik Daerah yang sesuai standar	100%	909.496.325	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kab. Pasuruan	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	112 Dokumen	35.392.480	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kab. Pasuruan	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	112 Dokumen	22.250.000	
	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab. Pasuruan	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	12 Dokumen	33.000.000	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab. Pasuruan	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	12 Dokumen	21.384.000	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	4 Laporan	274.754.271	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	4 Laporan	209.853.490	
	Pengamanan Barang Milik Daerah	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	500 Laporan	823.853.449	Pengamanan Barang Milik Daerah	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	500 Laporan	531.068.764	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	12 Laporan	52.800.000	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	12 Laporan	9.293.821	
	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	226 Dokumen	104.817.877	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	226 Dokumen	65.897.000	
	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	4 Laporan	30.386.546	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	4 Laporan	21.693.250	
	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	4 Laporan	35.995.377	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	4 Laporan	28.056.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kab. Pasuruan	Prosentase Peningkatan Pendapatan pajak dan retribusi Daerah	1,50%	5.315.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kab. Pasuruan	Prosentase Peningkatan Pendapatan pajak dan retribusi Daerah	2%	2.563.736.512	
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kab. Pasuruan	1. Jumlah Wajib Pajak	150 Orang	5.315.000.000	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kab. Pasuruan	1. Jumlah Wajib Pajak	250 Orang	2.563.736.512	
		Kab. Pasuruan	2. Peningkatan kontribusi pajak dan retribusi terhadap PAD	1%			Kab. Pasuruan	2. Peningkatan kontribusi pajak dan retribusi terhadap PAD	2%	-	
	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Dokumen	48.999.993	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Dokumen	29.044.694	
	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	12 Dokumen	212.022.202	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	20 Dokumen	135.919.500	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	8 Laporan	231.018.834	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	8 Laporan	139.684.224	
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	1.245.629.305	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	568.523.020	
	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	12 Laporan	175.759.459	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	12 Laporan	164.236.834	
	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan	Kab. Pasuruan	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	7868 Objek Pajak	1.010.650.568	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah	Kab. Pasuruan	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	8262 Objek Pajak	413.013.990	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Bangunan (BPHTB)					dan Bangunan (BPHTB)					
	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	918744 Dokumen	615.633.653	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	1.007.902 Dokumen	159.325.894	
	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Kab. Pasuruan	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	2 Layanan	76.519.800	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Kab. Pasuruan	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	2 Layanan	75.678.878	
	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Kab. Pasuruan	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	12 Laporan	480.659.598	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Kab. Pasuruan	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	12 Laporan	235.210.917	
	Penagihan Pajak Daerah	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	8990 Dokumen	664.225.768	Penagihan Pajak Daerah	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	9100 Dokumen	322.289.940	
	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	11 Dokumen	25.199.975	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	11 Dokumen	16.135.950	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	53 Dokumen	467.768.664	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	55 Dokumen	269.569.818	
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	2 Laporan	60.912.180	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	2 Laporan	35.102.853	
	TOTAL				759.814.926.323	TOTAL				1.121.411.325.806	

Dari tabel 2.4 (T-C.31) Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025, terdapat perubahan kebutuhan anggaran antara rancangan awal RKPD dan hasil analisis kebutuhan. Pada rancangan awal RKPD, pagu indikatif yang dituliskan merujuk pada anggaran pada Renstra. Pada hasil analisis kebutuhan, sudah disesuaikan dengan rancangan kebutuhan pada tahun 2025. Pada Renstra Tahun 2024-2026, proyeksi anggaran tahun 2025 adalah Rp759.814.926.323,00. Berdasarkan analisis kebutuhan anggaran BPKPD untuk tahun 2025 adalah sebesar Rp1.121.411.325.806,00.

Penjelasan atas pertambahan anggaran pada rancangan kebutuhan tahun 2025 adalah sebagai berikut.

- Hasil kebutuhan anggaran untuk gaji dan tunjangan ASN serta administrasi pelaksanaan tugas ASN mempertimbangkan jumlah ASN pada tahun 2025.
- Anggaran untuk pendidikan dan pelatihan pegawai lebih rendah dari realisasi tahun 2023 dikarenakan adanya penyesuaian keadaan dan anggaran. Anggaran pada 2025 direncanakan sebesar Rp134.852.000,00 dengan kinerja sebanyak 160 orang.
- Untuk Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah hasil analisis kebutuhan anggaran juga menurun dari rancangan awal RKPD menjadi Rp195.117.120,00. Anggaran ini lebih kecil dari realisasi anggaran tahun 2023.
- Hasil kebutuhan anggaran untuk Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp247.851.000,00. Anggaran ini lebih rendah jika dibandingkan dengan realisasi anggaran tahun 2023.

- Untuk Program Pengelolaan Keuangan Daerah, hasil analisis kebutuhan anggaran kurang dari anggaran rancangan awal RKPD.
- Untuk Program Pengelolaan Barang Milik Daerah, terdapat 2 sub kegiatan baru yaitu Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan BMD serta Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah. Anggaran yang diperoleh juga lebih kecil dari realisasi anggaran pada tahun 2023 yang berjumlah Rp 909.496.325,00.
- Untuk Program Pengelolaan Pendapatan Daerah, anggaran pada hasil analisis kebutuhan anggaran tahun 2025 juga lebih kecil dari anggaran pada rancangan awal RKPD menjadi Rp2.563.736.512,00.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

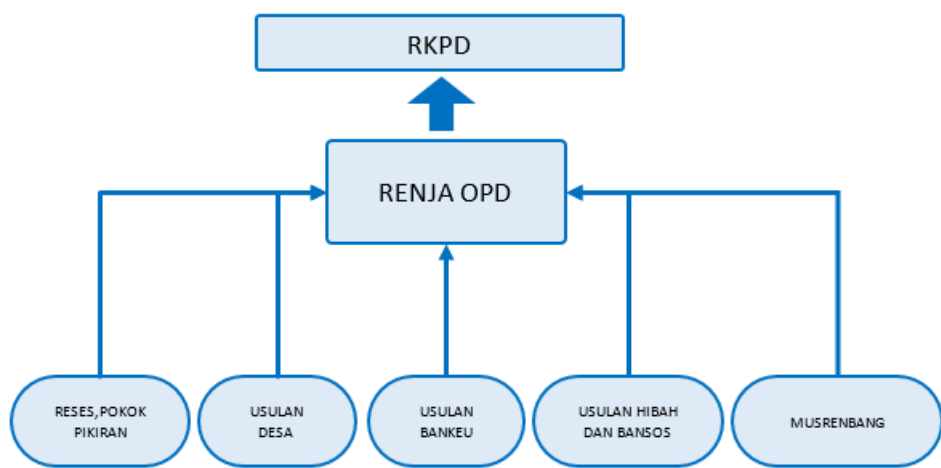
Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 memuat Program dan Kegiatan yang bersifat pelayanan baik dari Internal maupun eksternal bukan melaksanakan kegiatan yang bersumber dari usulan masyarakat serta pemangku kepentingan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah. Namun Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Daerah tetap mempunyai usulan Program dan kegiatan yang berkaitan dengan masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat maupun para pemangku kepentingan.

Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah yang terdiri atas RPJPD, RPJMD, dan RKPD serta rencana perangkat daerah yang terdiri atas Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah. Penyusunan Renstra BPKPD

berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif, sedangkan Renja BPKPD disusun berpedoman kepada Renstra BPKPD dan RKPD Kabupaten Pasuruan. BAPPELITBANGDA menyusun RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

Renstra BPKPD dab Renja BPKPD disusun dengan tahapan :

- a. Persiapan penyusunan;
- b. Penyusunan rancangan awal;
- c. Penyusunan rancangan;
- d. Pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah;
- e. Perumusan rancangan, dan
- f. Penetapan.



Gambar 1.3.2.5 Penyusunan Renja PD

Dalam penyusunan Renstra dan Renja BPKPD, BPKPD melaksanakan forum perangkat daerah. Pelaksanaan forum perangkat daerah BPKPD, memiliki sedikit perbedaan yaitu BPKPD tidak menghimpun pokok pikiran dari DPRD, serta usulan desa. Forum yang dilaksanakan sebagai sarana menjabarkan tujuan, sasaran serta target yang akan dicapai oleh BPKPD kepada stakeholder BPKPD.

BPKPD melalui pelaksanaan Forum OPD, mendapatkan beberapa usulan peningkatan kinerja BPKPD. Usulan ini diberikan oleh stakeholder BPKPD dan atas pelaksanaan kinerja yang melibatkan stakeholder BPKPD. Usulan tersebut adalah usulan atas percepatan penerbitan PBB dan BPHTB pada awal tahun 2024, usulan atas penertiban pengelolaan aset daerah agar dapat meningkatkan pendapatan daerah dan usulan atas sinkronisasi kebutuhan renja OPD dengan Bappeda.

Dalam melaksanakan kinerjanya, BPKPD juga melaksanakan kegiatan yang ditujukan kepada 24 kecamatan di Kabupaten Pasuruan yang diuraikan dalam tabel 2.5 (T-C.32) berikut.

Tabel 2.5 (T-C.32)
Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dari Para Pemangku
Kepentingan Tahun 2025

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	24 Kecamatan	Persentase Peningkatan Pendapatan pajak dan retribusi Daerah	2,20%	
	Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	24 Kecamatan	Peningkatan kontribusi pajak dan retribusi terhadap PAD	2,00%	
	Penagihan Pajak Daerah	24 Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	9100 Dokumen	Penagihan Pajak
	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	24 Kecamatan	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	8262 Obyek Pajak	Sosialisasi SPPT

Berdasarkan tabel usulan program. Kegiatan, dan sub kegiatan dari para pemangku kepentingan pada tahun 2025 diatas, kegiatan yang terlampir merupakan kegiatan terkait pengelolaan pendapatan daerah. Kegiatan pertama yaitu kegiatan penagihan pajak daerah yang dilakukan kepada wajib pajak. Salah satu pajak yang ditagih yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). BPKPD akan melakukan penagihan PBB terutama pada desa dengan realisasi rendah. Kegiatan selanjutnya yaitu kegiatan penyampaian SPPT melalui sosialisasi. Pelaksanaan penyampaian SPPT ini dilakukan kepada 24 kecamatan dengan pelaksanaan di 8 kecamatan, sehingga pada 1 kali pelaksanaan, disampaikan SPPT untuk 3 kecamatan. Kegiatan ini dilaksanakan pada awal tahun.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pelaksanaan proses pelayanan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan tidak lepas dari pelaksanaan kebijakan nasional. Merujuk pada renstra Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024, terdapat isu penting dan strategis yaitu:

- Isu strategis terkait alokasi anggaran belanja dalam rangka mandatory spending dan yang diamanatkan oleh Peraturan perundang-undangan lainnya menunjukkan bahwa alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan telah memenuhi ketentuan sekurang-kurangnya 20% dari total belanja daerah. Sedangkan alokasi anggaran untuk infrastruktur pelayanan publik, alokasi anggaran belum memenuhi ketentuan, oleh karena itu perlu dilakukan penyesuaian porsi belanja infrastruktur pelayanan publik daerah secara bertahap dalam waktu 5 tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 atau sekurang-kurangnya 40% sampai dengan tahun 2027.
- Isu strategis terkait pelaksanaan fungsi pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara (BMN), meliputi isu terkait redesign sistem penganggaran, akselerasi penyesuaian kebijakan penganggaran dampak new normal, mitigasi temuan pemeriksaan atas LK BA 015 yang berulang, masih adanya BMN Kementerian Keuangan yang terindikasi idle, dan penggunaan aset secara bersama.

- Isu strategis terkait pelaksanaan fungsi pengelolaan komunikasi publik, meliputi isu terkait perkembangan tren komunikasi yang cepat berubah dan viralitas isu negatif pada medsos, tata kelola kehumasan Kementerian Keuangan (struktur/fungsi) yang belum standar, dan strategi komunikasi antar Unit Eselon I yang belum optimal.
- Isu strategis terkait pelaksanaan fungsi pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), meliputi isu terkait keamanan TIK, integrasi TIK, pembangunan Data Center permanen, dan pembangunan portal layanan digital Kementerian Keuangan.
- Isu strategis terkait pelaksanaan fungsi legislasi dan advokasi, meliputi isu terkait policy innovation, simplifikasi regulasi, perlindungan hukum bagi institusi dan ASN Kementerian Keuangan, dan pembentukan Pusat Ahli Hukum Keuangan Negara.
- Isu strategis terkait pelaksanaan fungsi tata kelola dan sumber daya ke-Sekretariat Jenderal-an, meliputi isu terkait penyediaan dukungan sarana & prasarana kantor yang sesuai dengan protokol kesehatan, penguatan tata kelola Sekretariat Jenderal, dan penguatan Unit Kepatuhan Internal Sekretariat Jenderal.
- Isu strategis terkait pelaksanaan fungsi dukungan pengambilan kebijakan (decision support), meliputi isu terkait pemanfaatan big data dalam penyusunan rekomendasi kebijakan, kerahasiaan informasi, dan pengembangan dashboard pimpinan.
- Isu strategis terkait pelaksanaan fungsi tugas khusus (special mission), meliputi isu terkait penguatan fungsi pembinaan dan pengawasan profesi keuangan melalui pemanfaatan teknologi

informasi, pengukuhan pengelolaan Dana Abadi Pendidikan (DAP) melalui mekanisme Endowmen Fund guna menjaga likuiditas penyaluran dana pendidikan, dan simplifikasi proses bisnis Sekretariat Pengadilan Pajak.

BPKPD ikut melaksanakan kebijakan berdasarkan isu strategis Kementerian Keuangan dengan lingkup Kabupaten Pasuruan yaitu terkait dengan isu pengelolaan keuangan dan Barang Milik Daerah.

Berdasarkan Renstra Kementerian Keuangan Tahun 2020 – 2024, sasaran strategis yang ingin dicapai yaitu berkaitan dengan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan yang diukur dengan indikator rata-rata indeks opini BPK dan persentase pengelolaan Barang Milik Negara. Sasaran ini juga sejalan dengan tujuan serta sasaran dari BPKPD Kabupaten Pasuruan. Tujuan dari BPKPD Kabupaten Pasuruan yaitu “Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah”.

Dalam mendukung terlaksananya Sustainable Development Goals (SDG's) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, BPKPD tidak berperan secara langsung namun tetap memiliki peran yang penting dalam tercapainya tujuan tersebut. Sebagai OPD yang bertanggung jawab atas keuangan Kabupaten Pasuruan, BPKPD mendukung terlaksananya SDG's dalam bentuk penunjang unsur keuangan dan pendapatan. Bentuk peran BPKPD diuraikan dalam beberapa program berikut :

- Melalui program Pengelolaan Keuangan Daerah, kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah, BPKPD berperan dalam melakukan verifikasi SPM dan mengeluarkan anggaran dana yang diminta oleh OPD. Pada proses tersebut

BPKPD menunjang pemenuhan anggaran kegiatan OPD terkait. Sehubungan dengan program pemerintah yang berkaitan dengan SDG's, anggaran untuk mendukung tercapainya hal tersebut akan dicairkan melalui BPKPD khususnya pada program Pengelolaan Keuangan Daerah, kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah.

- Melalui program Pengelolaan Keuangan Daerah, kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah, BPKPD berperan dalam verifikasi dokumen penganggaran Kabupaten Pasuruan serta mengendalikan anggaran Kabupaten Pasuruan. Dokumen anggaran OPD yang didalamnya termasuk program mengenai SDG's akan melewati verifikasi oleh BPKPD. Anggaran yang dibutuhkan dalam mencapai suatu program, juga melewati verifikasi oleh BPKPD khususnya pada program Pengelolaan Keuangan Daerah, kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah.
- Melalui program Pengelolaan Keuangan Daerah, kegiatan Penunjang urusan kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah, BPKPD bertanggung jawab atas penyaluran bantuan keuangan, pengelolaan dana darurat dan mendesak serta pengelolaan Dana Bagi Hasil kabupaten/kota. Di dalam dana tersebut terdapat dana yang dapat menunjang tercapainya Sustainable Development Goals, seperti dalam bantuan keuangan terdapat dana desa. Berdasarkan Permendes 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Dana Desa Tahun 2023, Dana Desa diprioritaskan untuk percepatan tujuan SDG's yang meliputi pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa, program prioritas nasional

sesuai kewenangan desa, serta mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan desa. Program prioritas nasional sesuai kewenangan desa diantaranya meliputi perbaikan dan konsolidasi data SDG's desa, perluasan akses layanan kesehatan dan penanggulangan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem.

- Melalui program Pengelolaan Barang Milik Daerah, terdapat kegiatan yang menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD tersebut dapat digunakan dalam membiayai keperluan terlaksananya SDG's.
- Melalui program Pengelolaan Pendapatan Daerah, pajak dan retribusi daerah yang diterima akan menjadi PAD. PAD dapat digunakan untuk membiayai keperluan terlaksananya SDG's.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja BPKPD

Dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Pasuruan maka tujuan yang hendak dicapai oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut :

"Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah."

Indikator kinerja untuk tujuan tersebut adalah:

1. Indeks Pengelolaan Keuangan daerah
2. Indeks Pengelolaan Aset
3. Presentase kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah

Adapun sasaran utama yang hendak dicapai dalam rangka merealisasikan tujuan dimaksud adalah:

1. Meningkatnya Perencanaan penganggaran keuangan daerah, dengan indikator kinerja persentase hasil verifikasi dokumen perencanaan SKPD yang berkualitas.
2. Meningkatnya penatausahaan keuangan daerah, dengan indikator kinerja Persentase laporan keuangan daerah SKPD yang sesuai SAP dan terkumpul selesai tepat waktu.
3. Meningkatnya Manajemen aset yang akuntabel, dengan indikator kinerja persentase SKPD yang melakukan pengelolaan aset sesuai ketentuan.
4. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) , dengan indikator kinerja persentase peningkatan PAD, dan
5. Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD, dengan indikator kinerja nilai SAKIP.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah memiliki Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang diampu yaitu terkait manajemen keuangan serta terkait perencanaan dan keuangan. IKK BPKPD yaitu:

1. Perencanaan dan Keuangan

- a. Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan

Formula:

$$\frac{\text{Jumlah belanja pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan}}{\text{Jumlah APBD}} \times 100 \%$$

Dokumen pendukung:

- Rekap data belanja pegawai non guru dan kesehatan Kabupaten Pasuruan tahun terkait

- LRA Kabupaten Pasuruan tahun terkait

b. Rasio PAD

Formula:

$$\frac{\text{Jumlah PAD}}{\text{jumlah PDRB non migas}} \times 100 \%$$

Dokumen pendukung:

- LRA Kabupaten Pasuruan tahun terkait

c. Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)

Formula:

$$\frac{\text{Jumlah belanja urusan pemerintahan - transfer expenditures}}{\text{Jumlah belanja APBD}} \times 100\%$$

Dokumen pendukung:

- LRA menurut urusan pemerintah daerah dan organisasi Kabupaten Pasuruan tahun terkait

d. Opini Laporan Keuangan

Dokumen pendukung:

- Dokumen opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun terkait

2. Manajemen Keuangan

a. Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD

Formula:

$$\frac{\text{Nilai absolut dari Total belanja dalam realisasi}}{\text{total belanja APBD dikurangi satu}} \times 100\%$$

Dokumen pendukung:

- Rekap anggaran tahun terkait dan tahun n-1
- LRA Kabupaten Pasuruan tahun terkait

- b. Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD

Formula:

$$\frac{\text{Nilai absolut dari Total PAD dalam realisasi}}{\text{total PAD dalam APBD dikurangi satu}} \times 100\%$$

Dokumen pendukung:

- Rekap anggaran tahun terkait dan tahun n-1
- LRA Kabupaten Pasuruan tahun terkait

- c. Assets management

Formula:

- 1) Berapa jumlah aset yang dikelola?
- 2) Apakah ada daftar aset tetap? (Ya/Tidak)
- 3) Apakah ada manual untuk menyusun daftar aset tetap?
(Ya/Tidak)
- 4) Apakah ada proses inventarisasi aset tahunan?
(Ya/Tidak)
- 5) Apakah nilai aset tercantum dalam laporan anggaran?
(Ya/Tidak)

Dokumen pendukung:

- Rekapitulasi aset
- Laporan inventarisasi aset
- Data manual penyusunan aset tetap

- d. Cash Management: Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya

Formula:

$$\frac{\text{Nilai realisasi SiLPA}}{\text{total belanja anggaran tahun sebelumnya}} \times 100\%$$

Dokumen pendukung:

- Rekap anggaran tahun terkait dan tahun n-1

e. Informasi tentang Sumber daya yang Tersedia untuk Pelayanan: Informasi terkait sumber daya anggaran beserta realisasi anggaran yang dipakai dalam belanja pemerintah daerah.

Formula:

(Realisasi Belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda / Anggaran Belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda) *100%

Dokumen pendukung:

- LRA tahun n-1

f. Akses Publik terhadap Informasi Keuangan Daerah: Ketersediaan serta keteraksesan dokumen pemerintah yang dapat diakses secara mudah oleh Masyarakat.

Formula:

Jumlah dokumen yang dipublikasikan di website Pemda / Jumlah total dokumen yang telah dirinci) *100%

Dokumen pendukung:

- Ringkasan RKA SKPD, Raperda APBD, Raperda Perubahan APBD, Perda APBD, Perda Perubahan APBD, Ringkasan DPA SKPD, LRA seluruh SKPD, LKPD Yang Sudah Di Audit, Opini atas LKPD

g. Persentase realisasi belanja urusan pelayanan dasar: persentase dari realisasi yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah.

(realisasi belanja urusan pelayanan dasar tahun n/ anggaran belanja urusan dasar tahun n)*100%

Dokumen pendukung:

- LRA tahun n

h. Persentase Penurunan SILPA

Formula:

$$((\text{Nilai SILPA tahun } n - \text{Nilai SILPA } (n-1)) / \text{Nilai SILPA } (n-1)) * 100\%$$

Dokumen pendukung:

- LRA tahun n

i. Pertambahan Nilai Aset Tetap: persentase dari pertambahan nilai aset pada tahun bersangkutan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Formula:

$$((\text{Nilai aset tetap tahun } n - \text{Nilai aset tetap } (n-1)) / \text{Nilai aset tetap } (n-1)) * 100\%$$

Dokumen pendukung:

- Dokumen nilai aset tetap

Tujuan dan sasaran Renja BPKPD setiap tahun mempunyai indikator yang berbeda seperti tahun 2023 dengan proyeksi tahun 2024 dan target tahun 2023. Pada tahun 2023 realisasi indikator kinerja nilai SAKIP Perangkat daerah adalah 83,05, sedangkan di tahun 2024 dan 2025 bertambah beberapa indikator kinerja lainnya. Tujuan/sasaran/SPM/IKK dan indikator kinerja realisasi tahun 2023, proyeksi tahun 2024, serta target untuk tahun 2025 dirinci dalam tabel 3.2.A berikut:

Tabel 3.2.A

**Tujuan dan Sasaran Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan
Pendapatan Daerah**

Tujuan/ Sasaran/ SPM/ IKK	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Proyeksi 2024	Target 2025
Tujuan				
Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	71.048	71,05	72
	Indeks Pengelolaan Aset		85	90
	Persentase kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah	22,56	22,60	22,65
Sasaran				
Meningkatnya Perencanaan penganggaran keuangan daerah	Persentase hasil verifikasi dokumen perencanaan SKPD yang berkualitas.		90%	95%
Meningkatnya penatausahaan keuangan daerah	Persentase laporan keuangan daerah SKPD yang sesuai SAP dan terkumpul selesai tepat waktu		95%	97%
Meningkatnya Manajemen aset yang akuntabel	Persentase SKPD yang melakukan pengelolaan aset sesuai ketentuan		96%	98%
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase peningkatan PAD		3.5%	3.75%
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	83,05	83.5	84
IKK				
Rasio belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	Jumlah belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan / Jumlah Belanja APBD) *100%	6,06%	9,17%	9,26%
Rasio PAD	(Jumlah PAD / Jumlah Pendapatan nonmigas) *100%	22,56%	20,04%	20,23%
Rasio belanja urusan pemerintahan umum	(Jumlah belanja urusan pemerintahan - transfer expenditures /	65,58%	77,08%	77,34%

Tujuan/ Sasaran/ SPM/ IKK	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Proyeksi 2024	Target 2025
(dikurangi transfer expenditure)	Jumlah belanja APBD) *100%			
Opini Laporan Keuangan		WTP	WTP	WTP
Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Nilai absolut ((Realisasi Belanja / Anggaran belanja APBD) - 1) *100%	-4,58%	-7,85%	-7,50%
Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	Nilai absolut ((Realisasi Pendapatan / Anggaran Pendapatan APBD) - 1) *100%	21,26%	1,50%	1,85%
Manajemen Aset		4	2.790.105	2.851.487
Apakah ada daftar aset tetap? (Ya/Tidak)		ya	Ya	Ya
Apakah ada manual untuk menyusun daftar aset tetap? (Ya/Tidak)		ya	Ya	Ya
Apakah ada proses inventarisasi aset tahunan? (Ya/Tidak)		ya	Ya	Ya
Apakah nilai aset tercantum dalam laporan anggaran? (Ya/Tidak)		ya	Ya	Ya
Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	Nilai Realisasi SiLPA / Anggaran belanja tahun sebelumnya	7,9586	1,98%	2,14%
IKK tambahan				
Persentase realisasi belanja urusan pelayanan dasar tahun 2022	(realisasi belanja urusan pelayanan dasar tahun 2022/ anggaran belanja urusan dasar tahun 2022)*100%	93,88%		
Persentase Penurunan SILPA	((Nilai SILPA tahun n - Nilai SILPA (n-1))/ Nilai SILPA (n-1))*100%	-27,166		

Tujuan/ Sasaran/ SPM/ IKK	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Proyeksi 2024	Target 2025
Pertambahan Nilai Aset Tetap	$((\text{Nilai aset tetap tahun } n - \text{Nilai aset tetap } (n-1)) / \text{Nilai aset tetap } (n-1)) * 100\%$	5,4571		

Pada tabel tujuan dan sasaran BPKPD terdapat beberapa indikator kinerja baru sehingga belum terdapat realisasi pada tahun 2023. Indikator baru tersebut meliputi indeks pengelolaan aset yang menjadi indikator dalam tujuan BPKPD dengan target pada tahun 2025 yaitu 90. Dalam indikator sasaran, indikator baru yaitu Persentase hasil verifikasi dokumen perencanaan SKPD yang berkualitas dengan target capaian pada tahun 2025 sebesar 95%, Persentase laporan keuangan daerah SKPD yang sesuai SAP dan terkumpul selesai tepat waktu dengan target capaian 97%, Persentase SKPD yang melakukan pengelolaan aset sesuai ketentuan dengan target capaian 98%, dan Persentase peningkatan PAD sebesar 3,75%.

Setelah diketahui tujuan dan sasaran BPKPD terutama untuk taget capaian pada tahun 2025, maka dalam memenuhi capaian serta untuk menentukan capaian tujuan dan sasaran renja tersebut, juga dilakukan sinkronisasi antara Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2025 dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025. Formulasi dalam RPD yaitu opini BPK dengan kriteria kesesuaian dengan SAP, kecukupan pengungkapan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Sedangkan formulasi dalam IKU diuraikan dalam tabel 3.2.B yaitu sinkronisasi RPD dan IKU.

Tabel 3.2.B
Sinkronisasi Indikator Sasaran RPD dan IKU

Indikator Sasaran RPD			IKU			Program
Indikator	Formulasi	Target 2025	Indikator	Formulasi	Target 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Opini BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah	Opini BPK Opini BPK didasarkan pada kriteria: 1. Kesesuaian dengan SAP 2. Kecukupan pengungkapan 3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan	WTP	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Skor Seluruh Dimensi	72	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
				Dimensi Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran = 15*Skor Rata-rata Indikator		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
				Indikator Kesesuaian nomenklatur program RPJMD dengan RKPD = Jumlah Program dengan Nomenklatur yang Sesuai / jumlah Program		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Indikator Sasaran RPD			IKU			Program
Indikator	Formulasi	Target 2025	Indikator	Formulasi	Target 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Indikator Kesesuaian nomenklatur program RKPD dengan KUAPPAS = Jumlah Program dengan Nomenklatur yang Sesuai / jumlah Program		
				Indikator Kesesuaian nomenklatur program KUAPPAS dan APBD = Jumlah Program dengan Nomenklatur yang Sesuai / jumlah Program		
				Indikator Kesesuaian Pagu RKPD dengan KUAPPAS = Jumlah Program dengan Pagu yang Sesuai / Jumlah Program		
				Indikator Kesesuaian pagu KUAPPAS dengan APBD = Jumlah Program dengan Pagu yang Sesuai / Jumlah Program		
				Dimensi Pengalokasian Anggaran Belanja Dalam APBD = 20*Skor Rata-rata Indikator		
				Indikator Alokasi Jumlah Belanja untuk Fungsi Pendidikan minimal 20% dari APBD = 1 (jika memenuhi) ; 0 (jika tidak memenuhi)		

Indikator Sasaran RPD			IKU			Program
Indikator	Formulasi	Target 2025	Indikator	Formulasi	Target 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Indikator Jumlah Belanja untuk Urusan Kesehatan minimal 10% dari APBD di luar gaji = 1 (jika memenuhi) ; 0 (jika tidak memenuhi)		
				Indikator Alokasi Jumlah Belanja untuk Infrastruktur yang Langsung dalam Alokasi Dana Transfer minimal 25% dari Dana Transfer Umum = 1 (jika memenuhi) ; 0 (jika tidak memenuhi)		
				Dimensi Transparansi pengelolaan keuangan daerah = 15* Rata-rata (Skor Indikator Ketepatan Waktu dan Skor Indikator Keteraksesan)		
				Indikator Ketepatan Waktu = Jumlah Skor Ketepatan Waktu Seluruh Dokumen		
				Indikator Keteraksesan = Jumlah Skor Keteraksesan Seluruh Dokumen		
				Dimensi Penyerapan anggaran =		
				20*Skor Rata-rata Indikator		

Indikator Sasaran RPD			IKU			Program
Indikator	Formulasi	Target 2025	Indikator	Formulasi	Target 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Indikator Penyerapan Anggaran Belanja Pegawai = Nilai 1 (Jika penyerapan $\geq 80\%$) ; Nilai 0 (Jika penyerapan $< 80\%$)		
				Indikator Penyerapan Anggaran Belanja Bunga = Nilai 1 (Jika penyerapan $\geq 80\%$) ; Nilai 0 (Jika penyerapan $< 80\%$)		
				Indikator Penyerapan Anggaran Belanja Subsidi = Nilai 1 (Jika penyerapan $\geq 80\%$) ; Nilai 0 (Jika penyerapan $< 80\%$)		
				Indikator Penyerapan Anggaran Belanja Hibah = Nilai 1 (Jika penyerapan $\geq 80\%$) ; Nilai 0 (Jika penyerapan $< 80\%$)		
				Indikator Penyerapan Anggaran Belanja Bantuan Sosial = Nilai 1 (Jika penyerapan $\geq 80\%$) ; Nilai 0 (Jika penyerapan $< 80\%$)		
				Indikator Penyerapan Anggaran Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan =		

Indikator Sasaran RPD			IKU			Program
Indikator	Formulasi	Target 2025	Indikator	Formulasi	Target 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Nilai 1 (Jika penyerapan $\geq 80\%$) ; Nilai 0 (Jika penyerapan $< 80\%$)		
				Indikator Penyerapan Anggaran Belanja Tidak Terduga = Nilai 1 (Jika penyerapan $\geq 80\%$) ; Nilai 0 (Jika penyerapan $< 80\%$)		
				Indikator Penyerapan Anggaran Belanja Barang dan Jasa=Nilai 1 (Jika penyerapan $\geq 80\%$) ; Nilai 0 (Jika penyerapan $< 80\%$)		
				Indikator Penyerapan Anggaran Belanja Modal Nilai 1 (Jika penyerapan $\geq 80\%$) ; Nilai 0 (Jika penyerapan $< 80\%$)		
				Dimensi Kondisi keuangan daerah = 15*Rata-rata Indikator		
				Indikator Kemandirian Keuangan =		
				(nilai aktual - nilai minimum) / (nilai maksimum - nilai minimum)		
				Indikator Fleksibilitas Keuangan =		

Indikator Sasaran RPD			IKU			Program
Indikator	Formulasi	Target 2025	Indikator	Formulasi	Target 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				(Pendapatan - DAK) / (Total Kewajiban + Belanja Pegawai)		
				Indikator Solvabilitas Operasional =		
				(Total Pendapatan LO - Pendapatan DAK LO) / Beban LO		
				Indikator Solvabilitas Jangka Pendek =		
				(Kas dan Setara Kas + Investasi Jangka Pendek) / Kewajiban Lancar		
				Indikator Solvabilitas Jangka Panjang =		
				Aset Tetap / Kewajiban Jangka Panjang		
				Indikator Solvabilitas Layanan =		
				Aset Tetap / Jumlah Penduduk		
				Dimensi Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah =		

Indikator Sasaran RPD			IKU			Program
Indikator	Formulasi	Target 2025	Indikator	Formulasi	Target 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				15*Nilai Indikator Opini BPK atas LKPD		
			Indeks Pengelolaan Aset	Skor Pengelolaan BMD yang akuntabel dan produktif + Skor Kepatuhan pengelolaan BMD terhadap Peraturan perundangan + Skor Pengawasan dan pengendalian BMD yang efektif + Skor Administrasi BMD yang handal	90	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
			Persentase kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah	(Jumlah PAD / Jumlah Pendapatan Daerah)*100%	22,65%	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
			Persentase hasil verifikasi dokumen perencanaan SKPD yang berkualitas.	Nilai Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD + Nilai Ketepatan prosedur tahapan penyusunan dokumen anggaran	95%	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
			Persentase laporan keuangan daerah SKPD yang sesuai SAP dan terkumpul selesai tepat waktu		97%	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Indikator Sasaran RPD			IKU			Program
Indikator	Formulasi	Target 2025	Indikator	Formulasi	Target 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Persentase SKPD yang melakukan pengelolaan aset sesuai ketentuan	(Jumlah SKPD mengelola aset sesuai ketentuan / Jumlah SKPD)*100%	98%	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
				((Jumlah laporan perencanaan aset yang tepat waktu)/(jumlah laporan perencanaan aset secara keseluruhan)*50%) + ((Jumlah SKPD yang melakukan pengelolaan aset berkelanjutan)/(jumlah SKPD secara keseluruhan) *50%)		
			Persentase peningkatan PAD	((Jumlah PAD tahun berjalan – Jumlah PAD tahun 2022)/Jumlah PAD Tahun 2022)*100%	3,75%	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	nilai komponen perencanaan kinerja + nilai komponen pengukuran kinerja + nilai komponen pelaporan kinerja + nilai komponen evaluasi kinerja internal	84	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Dalam tabel sinkronisasi RPD dan IKU tersebut menguraikan formulasi RPD dan formulasi IKU dalam menentukan nilai dan capaian target tahun 2025. Pada indikator indeks pengelolaan keuangan daerah formulasi IKU yang digunakan mempunyai beberapa dimensi dengan jumlah skor seluruh dimensi yaitu 72. Dimensi tersebut meliputi kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran yang diperoleh dari skor rata-rata indikator dikalikan 15, dimensi pengalokasian anggaran belanja dalam APBD dari skor rata-rata indikator dikalikan 20, dimensi transparansi pengelolaan keuangan daerah dari skor rata-rata indikator dikalikan 15, dimensi penyerapan anggaran dari skor rata-rata indikator dikalikan 20, dimensi kondisi keuangan daerah dari skor rata-rata indikator dikalikan 15 dan dimensi atas Opini BPK terhadap laporan keuangan yang diperoleh dari nilai indikator opini BPK atas LKPD dikalikan 15. Dengan tabel tersebut, maka dapat diperoleh sinkronisasi antara RPD dan IKU terutama terhadap program-program yang diselenggarakan oleh BPKPD.

3.3. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

3.3.1. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2025

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah pada tahun 2024 memiliki 4 program, 13 kegiatan, serta 65 sub kegiatan. Seluruh sub kegiatan kecuali sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN serta sub kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah, dibiayai menggunakan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sedangkan untuk sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN dibiayai menggunakan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp443.678.523.299,00 Sub kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah direncanakan sebesar Rp669.638.824.285,00 yang terdiri dari

beberapa sumber pendanaan baik dari dana bagi hasil, bantuan keuangan, dan sumber dana lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan mempunyai total nilai anggaran Rp584.893.706.680,00, untuk sub kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak sebesar Rp30.000.000.000,00, dan pada sub kegiatan Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota sebesar Rp50.459.294.582,00. Berdasarkan dari sisa sumber dana tersebut, total nilai sumber dana yang berasal dari PAD sebesar Rp7.465.276.422,00. Total kebutuhan anggaran pada BPKPD Tahun 2025 adalah Rp1.121.411.325.806,00.

Program, Kegiatan dan sub kegiatan BPKPD di tahun 2025 dapat dirinci sebagai berikut:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, meliputi Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
- b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
- b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;

- b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
- d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
- f. Fasilitas Kunjungan Tamu;
- g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
- b. Pengadaan Mebel;

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
- b. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
- b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan
- c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
- d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

II. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

1. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

- a. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS;
- b. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS;

- c. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD;
- d. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD;
- e. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD;
- f. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
- g. Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota;

2. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

- a. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah;
- b. Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya;
- c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK);
- d. Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait;
- e. Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan;
- f. Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota.

3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

- a. Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah;
- b. Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban;
- c. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
- d. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota;
- e. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah;
- f. Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota.

4. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah

- a. Analisis Investasi Pemerintah Daerah;
- b. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan;
- c. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak;
- d. Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota.

III. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

1. Pengelolaan Barang Milik Daerah

- a. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah;
- b. Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah
- c. Penatausahaan Barang Milik Daerah;
- d. Pengamanan Barang Milik Daerah;
- e. Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah

- f. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah;
- g. Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah;
- h. Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah;

IV. PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

1. Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah

- a. Perencanaan pengelolaan pajak daerah;
- b. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah;
- c. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah;
- d. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah;
- e. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah;
- f. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- g. Penetapan Wajib Pajak Daerah;
- h. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah;
- i. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah;
- j. Penagihan Pajak Daerah;
- k. Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah;
- l. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah;
- m. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah.

Dalam program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan dalam Renja tahun 2025 tersebut, baik kode klasifikasi, kinerja, indikator dan formulasi indikator serta satuan terdapat pemutakhiran

bahkan penonaktifan. Pada program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2025 mengalami pemetaan nomenklatur dengan SIPD atau penyesuaian nomenklatur yang terdapat pada Renstra dengan nomenklatur pada SIPD. Sehingga dapat terjadi perbedaan antara nomenklatur pada Renstra dengan Renja tahun 2025. Berikut merupakan tabel pemetaan nomenklatur program, kegiatan, dan sub kegiatan terhadap SIPD.

Tabel 3.3.1

**Pemetaan Nomenklatur Prog/Keg/Subkeg pada Dokumen Perencanaan Strategis Perangkat Daerah
Terhadap SIPD**

Perangkat Daerah : Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah

Urusan : Penunjang

DOKUMEN RENSTRA PD 2024-2026						SIPD tahun 2025				
KODE KLASIFIKASI	Nomenklatur	Kinerja	1) Indikator 2) Formulasi Indikator	Satuan indikator	Pemutakhiran atau Penonaktifan	KODE KLASIFIKASI	Nomenklatur	Kinerja	1) Indikator 2) Formulasi Indikator	Satuan indikator
	1) Bidang Urusan						1) Bidang Urusan			
	2) Program						2) Program			
	3) Kegiatan						3) Kegiatan			
	4) Subkegiatan						4) Subkegiatan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
5	Urusan Penunjang					5	Urusan Penunjang			
5.02	Keuangan					5.02	Keuangan			
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel	1. Persentase penyusunan dokumen penganggaran yang baik secara tepat waktu dan sesuai regulasi yang berlaku Jumlah dokumen penganggaran yang sesuai	Persen		5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel	1. Persentase penyusunan dokumen penganggaran yang baik secara tepat waktu dan sesuai regulasi yang berlaku Jumlah dokumen penganggaran	Persen

DOKUMEN RENSTRA PD 2024-2026						SIPD tahun 2025				
KODE KLASIFIKASI	Nomenklatur	Kinerja	1) Indikator 2) Formulasi Indikator	Satuan indikator	Pemutakhiran atau Penonaktifan	KODE KLASIFIKASI	Nomenklatur	Kinerja	1) Indikator 2) Formulasi Indikator	Satuan indikator
	1) Bidang Urusan						1) Bidang Urusan			
	2) Program						2) Program			
	3) Kegiatan						3) Kegiatan			
	4) Subkegiatan						4) Subkegiatan			
			regulasi dan tepat waktu ----- x100% Jumlah dokumen penganggaran keseluruhan 2. Pengelolaan pendapatan dan belanja daerah sesuai ketentuan yang berlaku Jumlah dokumen pengelolaan pendapatan dan belanja yang sesuai ketentuan ----- x100% Jumlah dokumen pengelolaan pendapatan dan belanja keseluruhan 3. Persentase kelengkapan						yang sesuai regulasi dan tepat waktu ----- x100% Jumlah dokumen penganggaran keseluruhan 2. Pengelolaan pendapatan dan belanja daerah sesuai ketentuan yang berlaku Jumlah dokumen pengelolaan pendapatan dan belanja yang sesuai ketentuan ----- x100% Jumlah dokumen pengelolaan	

DOKUMEN RENSTRA PD 2024-2026						SIPD tahun 2025				
KODE KLASIFIKASI	Nomenklatur	Kinerja	1) Indikator 2) Formulasi Indikator	Satuan indikator	Pemutakhiran atau Penonaktifan	KODE KLASIFIKASI	Nomenklatur	Kinerja	1) Indikator 2) Formulasi Indikator	Satuan indikator
	1) Bidang Urusan						1) Bidang Urusan			
	2) Program						2) Program			
	3) Kegiatan						3) Kegiatan			
	4) Subkegiatan						4) Subkegiatan			
			dokumen LKPD yang selesai tepat waktu Jumlah dokumen kelengkapan LKPD yang selesai tepat waktu ----- x100% Jumlah dokumen kelengkapan LKPD keseluruhan						pendapatan dan belanja keseluruhan 3. Persentase kelengkapan dokumen LKPD yang selesai tepat waktu Jumlah dokumen kelengkapan LKPD yang selesai tepat waktu ----- x100% Jumlah dokumen kelengkapan LKPD keseluruhan	
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Meningkatnya verifikasi penyelesaian dokumen	persentase Penyelesaian verifikasi penyusunan dokumen	Persen		5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Meningkatnya verifikasi penyelesaian dokumen	persentase Penyelesaian verifikasi penyusunan dokumen	Persen

DOKUMEN RENSTRA PD 2024-2026						SIPD tahun 2025				
KODE KLASIFIKASI	Nomenklatur	Kinerja	1) Indikator 2) Formulasi Indikator	Satuan indikator	Pemutakhiran atau Penonaktifan	KODE KLASIFIKASI	Nomenklatur	Kinerja	1) Indikator 2) Formulasi Indikator	Satuan indikator
	1) Bidang Urusan						1) Bidang Urusan			
	2) Program						2) Program			
	3) Kegiatan						3) Kegiatan			
	4) Subkegiatan						4) Subkegiatan			
		anggaran tepat waktu	anggaran daerah tepat waktu Jumlah dokumen anggaran yang selesai di verifikasi tepat waktu ----- x100% Jumlah dokumen anggaran yang diverifikasi					anggaran tepat waktu	anggaran daerah tepat waktu Jumlah dokumen anggaran yang selesai di verifikasi tepat waktu ----- x100% Jumlah dokumen anggaran yang diverifikasi	
5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Tersusunnya KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Dokumen	Pemutakhiran	5.02.02.2.01.00 01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Tersusunnya KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Dokumen
5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Tersusunnya Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Dokumen	Pemutakhiran	5.02.02.2.01.00 02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Tersusunnya Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Dokumen

DOKUMEN RENSTRA PD 2024-2026						SIPD tahun 2025				
KODE KLASIFIKASI	Nomenklatur	Kinerja	1) Indikator 2) Formulasi Indikator	Satuan indikator	Pemutakhiran atau Penonaktifan	KODE KLASIFIKASI	Nomenklatur	Kinerja	1) Indikator 2) Formulasi Indikator	Satuan indikator
	1) Bidang Urusan						1) Bidang Urusan			
	2) Program						2) Program			
	3) Kegiatan						3) Kegiatan			
	4) Subkegiatan						4) Subkegiatan			
5.02.02.2.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Terlaksananya Verifikasi RKASKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	Pemutakhiran	5.02.02.2.01.00 03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Terlaksananya Verifikasi RKASKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen
5.02.02.2.01.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Terlaksananya Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	Pemutakhiran	5.02.02.2.01.00 04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Terlaksananya Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen
5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Dokumen	Pemutakhiran	5.02.02.2.01.00 07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Dokumen

DOKUMEN RENSTRA PD 2024-2026						SIPD tahun 2025				
KODE KLASIFIKASI	Nomenklatur	Kinerja	1) Indikator 2) Formulasi Indikator	Satuan indikator	Pemutakhiran atau Penonaktifan	KODE KLASIFIKASI	Nomenklatur	Kinerja	1) Indikator 2) Formulasi Indikator	Satuan indikator
	1) Bidang Urusan						1) Bidang Urusan			
	2) Program						2) Program			
	3) Kegiatan						3) Kegiatan			
	4) Subkegiatan						4) Subkegiatan			
5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Dokumen	Pemutakhiran	5.02.02.2.01.00 08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Dokumen
5.02.02.2.01.10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Dokumen	Pemutakhiran	5.02.02.2.01.00 10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Dokumen
5.02.02.2.01.13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	Pemutakhiran	5.02.02.2.01.00 13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang

DOKUMEN RENSTRA PD 2024-2026						SIPD tahun 2025				
KODE KLASIFIKASI	Nomenklatur	Kinerja	1) Indikator 2) Formulasi Indikator	Satuan indikator	Pemutakhiran atau Penonaktifan	KODE KLASIFIKASI	Nomenklatur	Kinerja	1) Indikator 2) Formulasi Indikator	Satuan indikator
	1) Bidang Urusan						1) Bidang Urusan			
	2) Program						2) Program			
	3) Kegiatan						3) Kegiatan			
	4) Subkegiatan						4) Subkegiatan			
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Terlaksananya a dokumen hasil koordinasi dan pengelolaan perbendaharaa n kas daerah	persentase dokumen pendapatan dan belanja daerah yang terselesaikan Jumlah dokumen pengelolaan pendapatan dan belanja yang selesai ----- x100% Jumlah dokumen pengelolaan pendapatan dan belanja keseluruhan	Persen		5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Terlaksananya dokumen hasil koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan kas daerah	persentase dokumen pendapatan dan belanja daerah yang terselesaikan Jumlah dokumen pengelolaan pendapatan dan belanja yang selesai ----- x100% Jumlah dokumen pengelolaan pendapatan dan belanja keseluruhan	Persen
5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Dokumen	Pemutakhiran	5.02.02.2.02.00 01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Dokumen

DOKUMEN RENSTRA PD 2024-2026						SIPD tahun 2025				
KODE KLASIFIKASI	Nomenklatur	Kinerja	1) Indikator 2) Formulasi Indikator	Satuan indikator	Pemutakhiran atau Penonaktifan	KODE KLASIFIKASI	Nomenklatur	Kinerja	1) Indikator 2) Formulasi Indikator	Satuan indikator
	1) Bidang Urusan						1) Bidang Urusan			
	2) Program						2) Program			
	3) Kegiatan						3) Kegiatan			
	4) Subkegiatan						4) Subkegiatan			
5.02.02.2.02.05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Terlaksananya Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Dokumen	Pemutakhiran	5.02.02.2.02.00 05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Terlaksananya Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Dokumen

5.02.02.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Laporan	Pemutakhiran	5.02.02.2.02.00 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Laporan
-----------------	---	---	---	---------	--------------	--------------------	---	---	---	---------

DOKUMEN RENSTRA PD 2024-2026						SIPD tahun 2025				
KODE KLASIFIKASI	Nomenklatur	Kinerja	1) Indikator 2) Formulasi Indikator	Satuan indikator	Pemutakhiran atau Penonaktifan	KODE KLASIFIKASI	Nomenklatur	Kinerja	1) Indikator 2) Formulasi Indikator	Satuan indikator
	1) Bidang Urusan						1) Bidang Urusan			
	2) Program						2) Program			
	3) Kegiatan						3) Kegiatan			
	4) Subkegiatan						4) Subkegiatan			
5.02.02.2.02.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Terlaksananya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Dokumen	Pemutakhiran	5.02.02.2.02.00 09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Terlaksananya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Dokumen

DOKUMEN RENSTRA PD 2024-2026						SIPD tahun 2025				
KODE KLASIFIKASI	Nomenklatur	Kinerja	1) Indikator 2) Formulasi Indikator	Satuan indikator	Pemutakhiran atau Penonaktifan	KODE KLASIFIKASI	Nomenklatur	Kinerja	1) Indikator 2) Formulasi Indikator	Satuan indikator
	1) Bidang Urusan						1) Bidang Urusan			
	2) Program						2) Program			
	3) Kegiatan						3) Kegiatan			
	4) Subkegiatan						4) Subkegiatan			
5.02.02.2.02.10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Tersedianya Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Dokumen	Pemutakhiran	5.02.02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Tersedianya Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Dokumen
5.02.02.2.02.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	Pemutakhiran	5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang

DOKUMEN RENSTRA PD 2024-2026						SIPD tahun 2025				
KODE KLASIFIKASI	Nomenklatur	Kinerja	1) Indikator 2) Formulasi Indikator	Satuan indikator	Pemutakhiran atau Penonaktifan	KODE KLASIFIKASI	Nomenklatur	Kinerja	1) Indikator 2) Formulasi Indikator	Satuan indikator
	1) Bidang Urusan						1) Bidang Urusan			
	2) Program						2) Program			
	3) Kegiatan						3) Kegiatan			
	4) Subkegiatan						4) Subkegiatan			
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Tersusunnya laporan keuangan SKPD tepat waktu dan sesuai standar	Persentase Laporan Keuangan disusun tepat waktu dan sesuai standar jumlah laporan keuangan yang tepat waktu dan sesuai standar ----- x100% jumlah laporan keuangan	Persen		5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Tersusunnya laporan keuangan SKPD tepat waktu dan sesuai standar	Persentase Laporan Keuangan disusun tepat waktu dan sesuai standar jumlah laporan keuangan yang tepat waktu dan sesuai standar ----- x100% jumlah laporan keuangan	Persen
5.02.02.2.03.01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Laporan	Pemutakhiran	5.02.02.2.03.00 01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Laporan

DOKUMEN RENSTRA PD 2024-2026						SIPD tahun 2025				
KODE KLASIFIKASI	Nomenklatur	Kinerja	1) Indikator 2) Formulasi Indikator	Satuan indikator	Pemutakhiran atau Penonaktifan	KODE KLASIFIKASI	Nomenklatur	Kinerja	1) Indikator 2) Formulasi Indikator	Satuan indikator
	1) Bidang Urusan						1) Bidang Urusan			
	2) Program						2) Program			
	3) Kegiatan						3) Kegiatan			
	4) Subkegiatan						4) Subkegiatan			
5.02.02.2.03.02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Dokumen	Pemutakhiran	5.02.02.2.03.00 02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Dokumen
5.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Laporan	Pemutakhiran	5.02.02.2.03.00 04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Laporan

DOKUMEN RENSTRA PD 2024-2026						SIPD tahun 2025				
KODE KLASIFIKASI	Nomenklatur	Kinerja	1) Indikator 2) Formulasi Indikator	Satuan indikator	Pemutakhiran atau Penonaktifan	KODE KLASIFIKASI	Nomenklatur	Kinerja	1) Indikator 2) Formulasi Indikator	Satuan indikator
	1) Bidang Urusan						1) Bidang Urusan			
	2) Program						2) Program			
	3) Kegiatan						3) Kegiatan			
	4) Subkegiatan						4) Subkegiatan			
5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Dokumen	Pemutakhiran	5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Dokumen

DOKUMEN RENSTRA PD 2024-2026						SIPD tahun 2025				
KODE KLASIFIKASI	Nomenklatur	Kinerja	1) Indikator 2) Formulasi Indikator	Satuan indikator	Pemutakhiran atau Penonaktifan	KODE KLASIFIKASI	Nomenklatur	Kinerja	1) Indikator 2) Formulasi Indikator	Satuan indikator
	1) Bidang Urusan						1) Bidang Urusan			
	2) Program						2) Program			
	3) Kegiatan						3) Kegiatan			
	4) Subkegiatan						4) Subkegiatan			
5.02.02.2.03.07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Dokumen	Pemutakhiran	5.02.02.2.03.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Dokumen
5.02.02.2.03.09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Tersedianya Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Dokumen	Pemutakhiran	5.02.02.2.03.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Tersedianya Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Dokumen

DOKUMEN RENSTRA PD 2024-2026						SIPD tahun 2025				
KODE KLASIFIKASI	Nomenklatur	Kinerja	1) Indikator 2) Formulasi Indikator	Satuan indikator	Pemutakhiran atau Penonaktifan	KODE KLASIFIKASI	Nomenklatur	Kinerja	1) Indikator 2) Formulasi Indikator	Satuan indikator
	1) Bidang Urusan						1) Bidang Urusan			
	2) Program						2) Program			
	3) Kegiatan						3) Kegiatan			
	4) Subkegiatan						4) Subkegiatan			
5.02.02.2.03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	Pemutakhiran	5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya penyelesaian dokumen urusan kewenangan keuangan daerah	persentase dokumen urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah yang selesai jumlah dokumen urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah yang selesai ----- x100% jumlah dokumen urusan kewenangan	Persen		5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya penyelesaian dokumen urusan kewenangan keuangan daerah	persentase dokumen urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah yang selesai jumlah dokumen urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah yang selesai	Persen

DOKUMEN RENSTRA PD 2024-2026						SIPD tahun 2025				
KODE KLASIFIKASI	Nomenklatur	Kinerja	1) Indikator 2) Formulasi Indikator	Satuan indikator	Pemutakhiran atau Penonaktifan	KODE KLASIFIKASI	Nomenklatur	Kinerja	1) Indikator 2) Formulasi Indikator	Satuan indikator
	1) Bidang Urusan						1) Bidang Urusan			
	2) Program						2) Program			
	3) Kegiatan						3) Kegiatan			
	4) Subkegiatan						4) Subkegiatan			
			pengelolaan daerah						----- x100% jumlah dokumen dokumen urusan kewenangan pengelolaan daerah	
5.02.02.2.04.02	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Terlaksananya Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Laporan	Pemutakhiran	5.02.02.2.04.00 02	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Terlaksananya Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Laporan
5.02.02.2.04.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Tersedianya Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Laporan	Pemutakhiran	5.02.02.2.04.00 08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Tersedianya Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Laporan

DOKUMEN RENSTRA PD 2024-2026						SIPD tahun 2025				
KODE KLASIFIKASI	Nomenklatur	Kinerja	1) Indikator 2) Formulasi Indikator	Satuan indikator	Pemutakhiran atau Penonaktifan	KODE KLASIFIKASI	Nomenklatur	Kinerja	1) Indikator 2) Formulasi Indikator	Satuan indikator
	1) Bidang Urusan						1) Bidang Urusan			
	2) Program						2) Program			
	3) Kegiatan						3) Kegiatan			
	4) Subkegiatan						4) Subkegiatan			
5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Terkelolanya Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Laporan	Pemutakhiran	5.02.02.2.04.00 09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Terkelolanya Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Laporan
5.02.02.2.04.10	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Terkelolanya Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Laporan	Pemutakhiran	5.02.02.2.04.00 10	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Terkelolanya Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Laporan
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Meningkatnya pengelolaan BMD berstatus	Persentase penggunaan BMD SKPD yang berstatus Jumlah penggunaan BMD yang berstatus -----*100% Jumlah penggunaan BMD	Persen		5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Meningkatnya pengelolaan BMD berstatus	Persentase penggunaan BMD SKPD yang berstatus Jumlah penggunaan BMD yang berstatus -----*100% Jumlah penggunaan BMD	Persen

DOKUMEN RENSTRA PD 2024-2026						SIPD tahun 2025				
KODE KLASIFIKASI	Nomenklatur	Kinerja	1) Indikator 2) Formulasi Indikator	Satuan indikator	Pemutakhiran atau Penonaktifan	KODE KLASIFIKASI	Nomenklatur	Kinerja	1) Indikator 2) Formulasi Indikator	Satuan indikator
	1) Bidang Urusan						1) Bidang Urusan			
	2) Program						2) Program			
	3) Kegiatan						3) Kegiatan			
	4) Subkegiatan						4) Subkegiatan			
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Meningkatnya penyusunan Dokumen dan Laporan Barang Milik Daerah yang sesuai standar	Persentase penyusunan Dokumen dan Laporan Barang Milik Daerah yang sesuai standar jumlah laporan BMD yang sesuai standar -----x100% Jumlah laporan BMD	Persen		5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Meningkatnya penyusunan Dokumen dan Laporan Barang Milik Daerah yang sesuai standar	Persentase penyusunan Dokumen dan Laporan Barang Milik Daerah yang sesuai standar jumlah laporan BMD yang sesuai standar -----x100% Jumlah laporan BMD	Persen
5.02.03.2.01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen	Pemutakhiran	5.02.03.2.01.00 03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen
5.02.03.2.01.04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tersedianya Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dokumen	Pemutakhiran	5.02.03.2.01.00 04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tersedianya Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dokumen

DOKUMEN RENSTRA PD 2024-2026						SIPD tahun 2025				
KODE KLASIFIKASI	Nomenklatur	Kinerja	1) Indikator 2) Formulasi Indikator	Satuan indikator	Pemutakhiran atau Penonaktifan	KODE KLASIFIKASI	Nomenklatur	Kinerja	1) Indikator 2) Formulasi Indikator	Satuan indikator
	1) Bidang Urusan						1) Bidang Urusan			
	2) Program						2) Program			
	3) Kegiatan						3) Kegiatan			
	4) Subkegiatan						4) Subkegiatan			
5.02.03.2.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Penatausaha an Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan	Pemutakhiran	5.02.03.2.01.00 05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausaha an Barang Milik Daerah	Laporan
5.02.03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Laporan	Pemutakhiran	5.02.03.2.01.00 07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Laporan
5.02.03.2.01.09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Laporan	Pemutakhiran	5.02.03.2.01.00 09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Laporan

DOKUMEN RENSTRA PD 2024-2026						SIPD tahun 2025				
KODE KLASIFIKASI	Nomenklatur	Kinerja	1) Indikator 2) Formulasi Indikator	Satuan indikator	Pemutakhiran atau Penonaktifan	KODE KLASIFIKASI	Nomenklatur	Kinerja	1) Indikator 2) Formulasi Indikator	Satuan indikator
	1) Bidang Urusan						1) Bidang Urusan			
	2) Program						2) Program			
	3) Kegiatan						3) Kegiatan			
	4) Subkegiatan						4) Subkegiatan			
5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Dokumen	Pemutakhiran	5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Dokumen
5.02.03.2.01.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Laporan	Pemutakhiran	5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Laporan
5.02.03.2.01.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	Laporan	Pemutakhiran	5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	Laporan

DOKUMEN RENSTRA PD 2024-2026						SIPD tahun 2025				
KODE KLASIFIKASI	Nomenklatur	Kinerja	1) Indikator 2) Formulasi Indikator	Satuan indikator	Pemutakhiran atau Penonaktifan	KODE KLASIFIKASI	Nomenklatur	Kinerja	1) Indikator 2) Formulasi Indikator	Satuan indikator
	1) Bidang Urusan						1) Bidang Urusan			
	2) Program						2) Program			
	3) Kegiatan						3) Kegiatan			
	4) Subkegiatan						4) Subkegiatan			
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Meningkatnya Peningkatan Pendapatan pajak dan retribusi Daerah	persentase Peningkatan Pendapatan pajak dan retribusi Daerah (pendapatan pajak dan retribusi tahun n – (n-1)) : pendapatan pajak dan retribusi tahun (n-1) *100%	Persen		5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Meningkatnya Peningkatan Pendapatan pajak dan retribusi Daerah	persentase Peningkatan Pendapatan pajak dan retribusi Daerah (pendapatan pajak dan retribusi tahun n – (n- 1)) : pendapatan pajak dan retribusi tahun (n-1) *100%	Persen
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Meningkatnya pengelolaan data wajib pajak	1. Jumlah Wajib Pajak	Orang		5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Meningkatnya pengelolaan data wajib pajak	1. Jumlah Wajib Pajak	Orang
		Meningkatnya pengelolaan pajak dan retribusi	2. Peningkatan kontribusi pajak dan retribusi terhadap PAD Jumlah kontribusi pajak	Persen				Meningkatnya pengelolaan pajak dan retribusi	2. Peningkatan kontribusi pajak dan retribusi terhadap PAD	Persen

DOKUMEN RENSTRA PD 2024-2026						SIPD tahun 2025				
KODE KLASIFIKASI	Nomenklatur	Kinerja	1) Indikator 2) Formulasi Indikator	Satuan indikator	Pemutakhiran atau Penonaktifan	KODE KLASIFIKASI	Nomenklatur	Kinerja	1) Indikator 2) Formulasi Indikator	Satuan indikator
	1) Bidang Urusan						1) Bidang Urusan			
	2) Program						2) Program			
	3) Kegiatan						3) Kegiatan			
	4) Subkegiatan						4) Subkegiatan			
			dan retribusi terhadap PAD n – (n-1)) : jumlah kontribusi pajak dan retribusi terhadap PAD (n-1) *100%						Jumlah kontribusi pajak dan retribusi terhadap PAD n – (n-1)) : jumlah kontribusi pajak dan retribusi terhadap PAD (n-1) *100%	
5.02.04.2.01.01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Tersedianya Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Dokumen	Pemutakhiran	5.02.04.2.01.00 01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Tersedianya Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Dokumen
5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Tersedianya Hasil Analis Pajak Daerah serta Terlaksananya Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Dokumen	Pemutakhiran	5.02.04.2.01.00 02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Tersedianya Hasil Analis Pajak Daerah serta Terlaksananya Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Dokumen

DOKUMEN RENSTRA PD 2024-2026						SIPD tahun 2025				
KODE KLASIFIKASI	Nomenklatur	Kinerja	1) Indikator 2) Formulasi Indikator	Satuan indikator	Pemutakhiran atau Penonaktifan	KODE KLASIFIKASI	Nomenklatur	Kinerja	1) Indikator 2) Formulasi Indikator	Satuan indikator
	1) Bidang Urusan						1) Bidang Urusan			
	2) Program						2) Program			
	3) Kegiatan						3) Kegiatan			
	4) Subkegiatan						4) Subkegiatan			
5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan	Pemutakhiran	5.02.04.2.01.00 03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan
5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Tersedianya Data Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	Pemutakhiran	5.02.04.2.01.00 05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Tersedianya Data Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan
5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Laporan	Pemutakhiran	5.02.04.2.01.00 06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Laporan

DOKUMEN RENSTRA PD 2024-2026						SIPD tahun 2025				
KODE KLASIFIKASI	Nomenklatur	Kinerja	1) Indikator 2) Formulasi Indikator	Satuan indikator	Pemutakhiran atau Penonaktifan	KODE KLASIFIKASI	Nomenklatur	Kinerja	1) Indikator 2) Formulasi Indikator	Satuan indikator
	1) Bidang Urusan						1) Bidang Urusan			
	2) Program						2) Program			
	3) Kegiatan						3) Kegiatan			
	4) Subkegiatan						4) Subkegiatan			
5.02.04.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Terpenuhinya Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Objek Pajak	Pemutakhiran	5.02.04.2.01.00 07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Terpenuhinya Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Objek Pajak
5.02.04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Tersedianya Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Dokumen	Pemutakhiran	5.02.04.2.01.00 08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Tersedianya Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Dokumen
5.02.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Tersedianya Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Layanan	Pemutakhiran	5.02.04.2.01.00 09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Tersedianya Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Layanan
5.02.04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Terlaksananya Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Laporan	Pemutakhiran	5.02.04.2.01.00 10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Terlaksananya Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Laporan

DOKUMEN RENSTRA PD 2024-2026						SIPD tahun 2025				
KODE KLASIFIKASI	Nomenklatur	Kinerja	1) Indikator 2) Formulasi Indikator	Satuan indikator	Pemutakhiran atau Penonaktifan	KODE KLASIFIKASI	Nomenklatur	Kinerja	1) Indikator 2) Formulasi Indikator	Satuan indikator
	1) Bidang Urusan						1) Bidang Urusan			
	2) Program						2) Program			
	3) Kegiatan						3) Kegiatan			
	4) Subkegiatan						4) Subkegiatan			
5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Dokumen	Pemutakhiran	5.02.04.2.01.00 11	Penagihan Pajak Daerah	Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Dokumen
5.02.04.2.01.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Terlaksananya Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Dokumen	Pemutakhiran	5.02.04.2.01.00 12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Terlaksananya Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Dokumen
5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Terlaksannnya a Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Dokumen	Pemutakhiran	5.02.04.2.01.00 13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Terlaksannnya a Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Dokumen
5.02.04.2.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	Pemutakhiran	5.02.04.2.01.00 14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan

DOKUMEN RENSTRA PD 2024-2026						SIPD tahun 2025				
KODE KLASIFIKASI	Nomenklatur	Kinerja	1) Indikator 2) Formulasi Indikator	Satuan indikator	Pemutakhiran atau Penonaktifan	KODE KLASIFIKASI	Nomenklatur	Kinerja	1) Indikator 2) Formulasi Indikator	Satuan indikator
	1) Bidang Urusan						1) Bidang Urusan			
	2) Program						2) Program			
	3) Kegiatan						3) Kegiatan			
	4) Subkegiatan						4) Subkegiatan			
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA	Terlaksananya a administrasi tata kelola PD dengan baik	Persentase dokumen administrasi PD yang baik Jumlah lap/dok administrasi PD yang akurat/sesuai regulasi -----x100% Jumlah lap/dok administrasi PD yang harus dipenuhi	Persen		5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA	Terlaksananya administrasi tata kelola PD dengan baik	Persentase dokumen administrasi PD yang baik Jumlah lap/dok administrasi PD yang akurat/sesuai regulasi ----- x100% Jumlah lap/dok administrasi PD yang harus dipenuhi	Persen
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang selaras	Persentase konsistensi indikator kinerja program/kegiatan /subkegiatan pada dok. Rencana, anggaran, dan evaluasi	Persen		5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang selaras	Persentase konsistensi indikator kinerja program/kegia tan/subkegiat an pada dok. Rencana, anggaran, dan evaluasi	Persen

DOKUMEN RENSTRA PD 2024-2026						SIPD tahun 2025				
KODE KLASIFIKASI	Nomenklatur	Kinerja	1) Indikator 2) Formulasi Indikator	Satuan indikator	Pemutakhiran atau Penonaktifan	KODE KLASIFIKASI	Nomenklatur	Kinerja	1) Indikator 2) Formulasi Indikator	Satuan indikator
	1) Bidang Urusan						1) Bidang Urusan			
	2) Program						2) Program			
	3) Kegiatan						3) Kegiatan			
	4) Subkegiatan						4) Subkegiatan			
			Jumlah indikator kinerja program/kegiatan /sub kegiatan yang konsisten pada dokumen perencanaan, anggaran dan evaluasi -----x100% jumlah indikator kinerja program/kegiatan /sub kegiatan						Jumlah indikator kinerja program/kegiatan /sub kegiatan yang konsisten pada dokumen perencanaan, anggaran dan evaluasi -----x100% jumlah indikator kinerja program/kegiatan /sub kegiatan	
5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Pemutakhiran	5.02.01.2.01.00 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase konsistensi indikator kinerja program/kegiatan/subkegiatan pada dok. Rencana, anggaran, dan evaluasi	Dokumen

DOKUMEN RENSTRA PD 2024-2026						SIPD tahun 2025				
KODE KLASIFIKASI	Nomenklatur	Kinerja	1) Indikator 2) Formulasi Indikator	Satuan indikator	Pemutakhiran atau Penonaktifan	KODE KLASIFIKASI	Nomenklatur	Kinerja	1) Indikator 2) Formulasi Indikator	Satuan indikator
	1) Bidang Urusan						1) Bidang Urusan			
	2) Program						2) Program			
	3) Kegiatan						3) Kegiatan			
	4) Subkegiatan						4) Subkegiatan			
									Jumlah indikator kinerja program/kegiatan/sub kegiatan yang konsisten pada dokumen perencanaan, anggaran dan evaluasi -----x100% jumlah indikator kinerja program/kegiatan/sub kegiatan	
5.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	Pemutakhiran	5.02.01.2.01.00 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan

DOKUMEN RENSTRA PD 2024-2026						SIPD tahun 2025				
KODE KLASIFIKASI	Nomenklatur	Kinerja	1) Indikator 2) Formulasi Indikator	Satuan indikator	Pemutakhiran atau Penonaktifan	KODE KLASIFIKASI	Nomenklatur	Kinerja	1) Indikator 2) Formulasi Indikator	Satuan indikator
	1) Bidang Urusan						1) Bidang Urusan			
	2) Program						2) Program			
	3) Kegiatan						3) Kegiatan			
	4) Subkegiatan						4) Subkegiatan			
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya laporan keuangan yang akurat	Persentase laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan Jumlah laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan Jumlah laporan yang harus dipenuhi	Persen		5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya laporan keuangan yang akurat	Persentase laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan Jumlah laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan Jumlah laporan yang harus dipenuhi	Persen
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Pemutakhiran	5.02.01.2.02.00 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan

DOKUMEN RENSTRA PD 2024-2026						SIPD tahun 2025				
KODE KLASIFIKASI	Nomenklatur	Kinerja	1) Indikator 2) Formulasi Indikator	Satuan indikator	Pemutakhiran atau Penonaktifan	KODE KLASIFIKASI	Nomenklatur	Kinerja	1) Indikator 2) Formulasi Indikator	Satuan indikator
	1) Bidang Urusan						1) Bidang Urusan			
	2) Program						2) Program			
	3) Kegiatan						3) Kegiatan			
	4) Subkegiatan						4) Subkegiatan			
5.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	Pemutakhiran	5.02.01.2.02.00 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya a administrasi kepegawaian dengan baik	Persentase dokumen kepegawaian yang akurat dan sesuai ketentuan $\frac{\text{Jumlah dokumen kepegawaian yang akurat dan sesuai ketentuan}}{\text{Jumlah dokumen kepegawaian yang harus dibuat}}$	Persen		5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi kepegawaian dengan baik	Persentase dokumen kepegawaian yang akurat dan sesuai ketentuan $\frac{\text{Jumlah dokumen kepegawaian yang akurat dan sesuai ketentuan}}{\text{Jumlah dokumen kepegawaian yang harus dibuat}}$	Persen

DOKUMEN RENSTRA PD 2024-2026						SIPD tahun 2025				
KODE KLASIFIKASI	Nomenklatur	Kinerja	1) Indikator 2) Formulasi Indikator	Satuan indikator	Pemutakhiran atau Penonaktifan	KODE KLASIFIKASI	Nomenklatur	Kinerja	1) Indikator 2) Formulasi Indikator	Satuan indikator
	1) Bidang Urusan						1) Bidang Urusan			
	2) Program						2) Program			
	3) Kegiatan						3) Kegiatan			
	4) Subkegiatan						4) Subkegiatan			
5.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	Pemutakhiran	5.02.01.2.05.00 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya kebutuhan umum perangkat daerah	Persentase dokumen kepegawaian yang akurat dan sesuai ketentuan Jumlah kebutuhan umum PD yang dipenuhi -----x100% Jumlah rencana kebutuhan yang harus dipenuhi	Persen		5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya kebutuhan umum perangkat daerah	Persentase dokumen kepegawaian yang akurat dan sesuai ketentuan Jumlah kebutuhan umum PD yang dipenuhi -----x100% Jumlah rencana kebutuhan yang harus dipenuhi	Persen

DOKUMEN RENSTRA PD 2024-2026						SIPD tahun 2025				
KODE KLASIFIKASI	Nomenklatur	Kinerja	1) Indikator 2) Formulasi Indikator	Satuan indikator	Pemutakhiran atau Penonaktifan	KODE KLASIFIKASI	Nomenklatur	Kinerja	1) Indikator 2) Formulasi Indikator	Satuan indikator
	1) Bidang Urusan						1) Bidang Urusan			
	2) Program						2) Program			
	3) Kegiatan						3) Kegiatan			
	4) Subkegiatan						4) Subkegiatan			
5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Pemutakhiran	5.02.01.2.06.00 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket
5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Pemutakhiran	5.02.01.2.06.00 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket
5.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Pemutakhiran	5.02.01.2.06.00 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket
5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Pemutakhiran	5.02.01.2.06.00 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket

DOKUMEN RENSTRA PD 2024-2026						SIPD tahun 2025				
KODE KLASIFIKASI	Nomenklatur	Kinerja	1) Indikator 2) Formulasi Indikator	Satuan indikator	Pemutakhiran atau Penonaktifan	KODE KLASIFIKASI	Nomenklatur	Kinerja	1) Indikator 2) Formulasi Indikator	Satuan indikator
	1) Bidang Urusan						1) Bidang Urusan			
	2) Program						2) Program			
	3) Kegiatan						3) Kegiatan			
	4) Subkegiatan						4) Subkegiatan			
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Pemutakhiran	5.02.01.2.06.00 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket
5.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	Pemutakhiran	5.02.01.2.06.00 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Pemutakhiran	5.02.01.2.06.00 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksanya pengadaan BMD	Persentase pengelolaan BMD yang terealisasi Jumlah unit yang direalisasi -----x100% Jumlah unit yang direncanakan	Persen		5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksanya pengadaan BMD	Persentase pengelolaan BMD yang terealisasi Jumlah unit yang direalisasi -----x100%	Persen

DOKUMEN RENSTRA PD 2024-2026						SIPD tahun 2025				
KODE KLASIFIKASI	Nomenklatur	Kinerja	1) Indikator 2) Formulasi Indikator	Satuan indikator	Pemutakhiran atau Penonaktifan	KODE KLASIFIKASI	Nomenklatur	Kinerja	1) Indikator 2) Formulasi Indikator	Satuan indikator
	1) Bidang Urusan						1) Bidang Urusan			
	2) Program						2) Program			
	3) Kegiatan						3) Kegiatan			
	4) Subkegiatan						4) Subkegiatan			
									Jumlah unit yang direncanakan	
5.02.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	Pemutakhiran	5.02.01.2.07.00 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit
5.02.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	Pemutakhiran	5.02.01.2.07.00 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit
5.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	Pemutakhiran	5.02.01.2.07.00 05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket

DOKUMEN RENSTRA PD 2024-2026						SIPD tahun 2025				
KODE KLASIFIKASI	Nomenklatur	Kinerja	1) Indikator 2) Formulasi Indikator	Satuan indikator	Pemutakhiran atau Penonaktifan	KODE KLASIFIKASI	Nomenklatur	Kinerja	1) Indikator 2) Formulasi Indikator	Satuan indikator
	1) Bidang Urusan						1) Bidang Urusan			
	2) Program						2) Program			
	3) Kegiatan						3) Kegiatan			
	4) Subkegiatan						4) Subkegiatan			
5.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan Mesin dan lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	Pemutakhiran	5.02.01.2.07.00 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit
5.02.01.2.07.10	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	Pemutakhiran	5.02.01.2.07.00 10	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya penunjang operasioal kantor	Persentase jasa penunjang operasional kantor yang tersedia Jumlah jasa penunjang operasional kantor yang tersedia -----x100% Jumlah jasa penunjanag operasional	Persen		5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya penunjang operasioal kantor	Persentase jasa penunjang operasional kantor yang tersedia Jumlah jasa penunjang operasional kantor yang tersedia -----x100% Jumlah jasa penunjanag	Persen

DOKUMEN RENSTRA PD 2024-2026						SIPD tahun 2025				
KODE KLASIFIKASI	Nomenklatur	Kinerja	1) Indikator 2) Formulasi Indikator	Satuan indikator	Pemutakhiran atau Penonaktifan	KODE KLASIFIKASI	Nomenklatur	Kinerja	1) Indikator 2) Formulasi Indikator	Satuan indikator
	1) Bidang Urusan						1) Bidang Urusan			
	2) Program						2) Program			
	3) Kegiatan						3) Kegiatan			
	4) Subkegiatan						4) Subkegiatan			
			kantor yang ditargetkan						operasional kantor yang ditargetkan	
5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	Pemutakhiran		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Pemutakhiran		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan
5.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kanto	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	Pemutakhiran	5.02.01.2.08.00 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kanto	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan

DOKUMEN RENSTRA PD 2024-2026						SIPD tahun 2025				
KODE KLASIFIKASI	Nomenklatur	Kinerja	1) Indikator 2) Formulasi Indikator	Satuan indikator	Pemutakhiran atau Penonaktifan	KODE KLASIFIKASI	Nomenklatur	Kinerja	1) Indikator 2) Formulasi Indikator	Satuan indikator
	1) Bidang Urusan						1) Bidang Urusan			
	2) Program						2) Program			
	3) Kegiatan						3) Kegiatan			
	4) Subkegiatan						4) Subkegiatan			
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Pemutakhiran	5.02.01.2.08.00 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya BMD yang dapat beroperasi dengan baik	Persentase BMD kondisi baik Jumlah BMD kondisi baik ----100% Jumlah BMD yang teregister	Persen		5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya BMD yang dapat beroperasi dengan baik	Persentase BMD kondisi baik Jumlah BMD kondisi baik ----100% Jumlah BMD yang teregister	Persen
5.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Pemutakhiran	5.02.01.2.09.00 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit

DOKUMEN RENSTRA PD 2024-2026						SIPD tahun 2025				
KODE KLASIFIKASI	Nomenklatur	Kinerja	1) Indikator 2) Formulasi Indikator	Satuan indikator	Pemutakhiran atau Penonaktifan	KODE KLASIFIKASI	Nomenklatur	Kinerja	1) Indikator 2) Formulasi Indikator	Satuan indikator
	1) Bidang Urusan						1) Bidang Urusan			
	2) Program						2) Program			
	3) Kegiatan						3) Kegiatan			
	4) Subkegiatan						4) Subkegiatan			
5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Pemutakhiran	5.02.01.2.09.00 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit
5.02.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	Pemutakhiran	5.02.01.2.09.00 05	Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit
5.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Pemutakhiran	5.02.01.2.09.00 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit

DOKUMEN RENSTRA PD 2024-2026						SIPD tahun 2025				
KODE KLASIFIKASI	Nomenklatur	Kinerja	1) Indikator 2) Formulasi Indikator	Satuan indikator	Pemutakhiran atau Penonaktifan	KODE KLASIFIKASI	Nomenklatur	Kinerja	1) Indikator 2) Formulasi Indikator	Satuan indikator
	1) Bidang Urusan						1) Bidang Urusan			
	2) Program						2) Program			
	3) Kegiatan						3) Kegiatan			
	4) Subkegiatan						4) Subkegiatan			
5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Pemutakhiran	5.02.01.2.09.00 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi	Unit

Berdasarkan tabel 3.3.1 pemetaan nomenklatur SIPD, pada program, kegiatan, sub kegiatan, beserta kinerja, indikator dan satuan hanya mengalami pemutakhiran pada kode klasifikasi. Terdapat penambahan kode menjadi (00XX) pada kode subkegiatan. Selain itu tidak terdapat penonaktifan nomenklatur dan sesuai dengan Renstra BPKPD Tahun 2024 – 2026.

3.3.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Prioritas Daerah Tahun 2025

Berkaitan dengan prioritas pembangunan daerah di tahun 2025, BPKPD berperan dalam prioritas pembangunan daerah ke-4 yaitu "Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Berdampak" dengan fokus sebagai pendukung peningkatan tata kelola aset pemda (tanah dan bangunan) serta Peningkatan RB tematik serta akuntabilitas kinerja dan keuangan. Sebagai pendukung peningkatan tata kelola aset pemda (tanah dan bangunan), lebih khususnya hal ini dilakukan oleh Bidang Aset. Sebagai pendukung Peningkatan RB tematik serta akuntabilitas kinerja dan keuangan, dilakukan oleh bidang Anggaran dan Belanja serta bidang Akuntansi. Program, kegiatan, dan subkegiatan yang berkaitan dengan prioritas pembangunan diuraikan dalam tabel 3.3 yaitu program, kegiatan, dan subkegiatan pendukung prioritas daerah tahun 2025.

Tabel 3.3.2
Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Pendukung Prioritas Daerah Tahun 2025

IKU	Tema 2025	Prioritas Pembangunan		Sub Kegiatan	Kegiatan	Program	Proyek Strategis
		Prioritas Pembangunan	Sub Prioritas				
Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Peningkatan Kualitas Sdm Dan Daya Saing Daerah	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang berdampak berbasis elektronik	Peningkatan tata Kelola aset pemda	Pengamanan Barang Milik Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengelolaan Kawasan Pariwisata AATP
				Pengamanan Barang Milik Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Revitalisasi bang kodir untuk CO Working Space industri kreatif
				Pengamanan Barang Milik Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pembangunan infrastruktur perkotaan Bangil

Pada tabel 3.3.2 Program, Kegiatan, Dan Sub Kegiatan Pendukung Prioritas Daerah Tahun 2025, BPKPD termasuk dalam prioritas pembangunan peningkatan tata kelola pemerintahan yang berdampak berbasis elektronik dengan subprioritas yaitu peningkatan tata kelola aset pemda. Peran BPKPD dalam mendukung prioritas daerah diutamakan dalam pengelolaan aset pemda sehingga masuk dalam program pengelolaan Barang Milik Daerah. Pada program tersebut terdapat kegiatan pengelolaan BMD dengan sub kegiatan pengamanan BMD. BPKPD terutama bidang aset selaku pengelola aset pemda akan melakukan pemeriksaan dan penelitian pada aset pemda untuk kemudian dilakukan sertifikasi terhadap aset yang belum bersertifikat maupun aset yang belum jelas terkait kepemilikannya. Proses sertifikasi ini juga dilakukan pada seluruh aset pemda namun dalam prioritas pembangunan tahun 2025 terdapat beberapa proyek strategis yang menjadi prioritas utama. Proyek strategis yang melibatkan BPKPD atau bidang aset dalam pengelolaan BMD yaitu pada pengelolaan kawasan pariwisata AATP, revitalisasi bang kodir untuk co-working space industri kreatif, dan pembangunan infrastruktur perkotaan Bangil.

3.3.2. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Proyek Strategis

Pada tabel 3.3.2 menyebutkan keterlibatan BPKPD dalam pembangunan proyek strategis tahun 2025, pada tabel 3.4 akan menguraikan matriks perencanaan pembangunan tahunan pada RKPD Tahun 2025. Matriks tersebut menjelaskan indikator dan target pada subkegiatan BPKPD yang terkait dalam pelaksanaan proyek strategis termasuk pagu yang dianggarkan dan sumber pendanaan

yang akan digunakan dalam mendukung proyek strategis tersebut.

Matriks perencanaan pembangunan tahunan pada RKPD Tahun 2025 diuraikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.4 (3.3.3)

Matriks Perencanaan Pembangunan Tahunan Pada RKPD Tahun 2024-2026

No	Uraian Proyek strategis	Perangkat Daerah Pelaksana	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target Indikator Sub Kegiatan	Nilai Pagu Anggaran	Sumber Dana	Lokasi Sasaran		
										titik koordinat (Sistim Geografis dalam satuan derajat menit detik) **)	Desa/ Kelurahan	Kecamatan
	Pengelolaan Kawasan Pariwisata AATP	BPKPD	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan	210.000.000	PAD	7°46'38.3"S 112°39'57.4"E	Dusun Kukur, Desa Sumberejo, Kecamatan Purwosari	Purwosari
	Revitalisasi bang kodir untuk co working space industri kreatif	BPKPD	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan	75.000.000	PAD	7°35'43.5"S 112°46'20.0"E	Kecamatan Bangil	Bangil
	Pembangunan Infrastruktur Perkotaan Bangil	BPKPD	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	8 Laporan	50.000.000	PAD	7°35'51.8"S 112°47'04.6"E	Kecamatan Bangil	Bangil

Pada Tabel 3.4 Matriks Perencanaan Pembangunan Tahunan pada RKPD Tahun 2024 – 2026, total nilai pagu anggaran untuk mendukung proyek strategis yaitu Rp335.000.000,00. Proyek strategis pengelolaan kawasan pariwisata AATP yang terletak di desa Sumberejo, Kecamatan Purwosari, untuk proses sertifikasi atau pengamanan BMD mempunyai pagu Rp210.000.000,00 yang didanai melalui sumber dana Pendapatan Asli Daerah (PAD). Revitalisasi bangkodik untuk co-working space industri kreatif yang terletak di Kelurahan gempeng, Kecamatan Bangil dengan sumber dana PAD, pagu yang dianggarkan senilai Rp75.000.000,00 sedangkan pengamanan BMD pembangunan infrastruktur perkotaan Bangil, pagu yang dianggarkan senilai Rp50.000.000,00 dengan sumber dana juga melalui PAD.

3.3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Inovasi BPKPD

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Inovasi daerah juga diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui:

- a. peningkatan Pelayanan Publik;
- b. pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan
- c. peningkatan daya saing Daerah.

Menindaklanjuti peraturan tersebut, seluruh pemerintah daerah didorong untuk melakukan inovasi guna meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. BPKPD telah memiliki 3 inovasi yang bergerak pada bidang akuntansi dan pendapatan. Inovasi di bidang Akuntansi bernama SIMoniK (Sistem Informasi dan

Monitoring Keuangan Daerah). Suatu sistem yang dibuat pada tahun 2023 dan digunakan untuk proses monitoring keuangan. Inovasi di bidang Pendapatan yaitu SIP TRANSPARAN (Sistem Informasi Perekaman Transaksi Pajak Daerah secara Elektronik) dan LAPAK SANTRI (Lapor Pajak Secara Mandiri dengan Transaksi Non Tunai). Inovasi tersebut diuraikan dalam tabel 3.5 program pendukung inovasi BPKPD Kabupaten Pasuruan.

Tabel 3.5
Program Pendukung Inovasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2025

Inovasi	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Anggaran
SIP TRANSPARAN (Sistem Informasi Perekaman Transaksi Pajak Daerah secara Elektronik)	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Rp269.569.818
SIMoniK (Sistem Informasi dan Monitoring Keuangan Daerah)	Program Pengelolaan Keuangan Dearah	Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Rp75.833.890
LAPAK SANTRI (Lapor Pajak Secara Mandiri dengan Transaksi Non Tunai)	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daera	Rp568.523.020

Pada tabel program pendukung inovasi, terdapat tiga inovasi BPKPD yang mendukung beberapa kegiatan di BPKPD. Kegiatan pengelolaan pendapatan daerah yaitu SIP TRANSPARAN terutama pada subkegiatan pengendalian pemeriksaan dan pengawan pajak daerah berfungsi sebagai perekaman terhadap transaksi pajak daerah sehingga sudah berbasis elektronik. Kegiatan Koordinasi dan

Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah atau bidang Akuntansi BPKPD mempunyai inovasi SIMONIK yang digunakan yang dapat memberikan informasi dan melakukan monitoring terhadap pengelolaan keuangan daerah sehingga dapat digunakan juga untuk melakukan konsolidasi laporan keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Saat ini, inovasi SIMONIK sedang dalam tahap pengembangan lagi agar dapat sinkron dengan SIPD-RI. Ketiga yaitu inovasi untuk mendukung pengelolaan pendapata daerah yaitu LAPAK SANTRI yang berfungsi agar wajib pajak dapat melaporkan pajak secara mandiri dengan transaksi non tunai.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi, sedangkan program pembangunan daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Sedangkan kegiatan yang selanjutnya disebut kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.

Rencana program dan kegiatan prioritas BPKPD Tahun 2025 berisi program dan kegiatan, baik untuk mencapai secara langsung sasaran pembangunan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program dan kegiatan prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD). Rencana kerja berupa program dan kegiatan pembangunan seluruh perangkat daerah sebagai instrumen pelaksana dari program perangkat daerah Tahun 2025 dan prakiraan maju Tahun 2026. Rumusan rencana program dan kegiatan beserta kebutuhan dana dan target capaian tahun 2025 dan prakiraan maju tahun 2026 diuraikan dalam tabel 4.1 (T-C.33)

Tabel 4.1 (T-C.33)

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan BPKPD Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11
	KEUANGAN							1.121.411.325.806				
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Terlaksananya administrasi tata kelola PD dengan baik	Persentase dokumen/lapora n administrasi PD yang baik/sesuai regulasi	Kab. Pasuruan	97%			447.070.053.185	PAD		100%	94.021.050.652
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang selaras	Persentase konsistensi indikator kinerja program/kegiatan /subkegiatan pada dok. rencana, anggaran, dan evaluasi	Kab. Pasuruan	100%			86.556.478	PAD		100%	417.219.000
5.02.01.2.01.00 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Pasuruan	12 Dokumen			65.920.000	PAD		12 Dokumen	237.247.000
						Belanja operasi		:	65.920.000			237.247.000
							Belanja Pegawai	:	-			-

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025							Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7				8	9	10	11
							Belanja barang dan jasa	:	65.920.000				237.247.000
						Belanja Modal		:	-				-
						Belanja Tidak terduga		:	-				-
						Belanja Transfer		:	-				-
							Belanja Bagi Hasil	:	-				-
							Belanja Bantuan Keuangan	:	-				-
5.02.01.2.01.00 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Pasuruan	2 Laporan				20.636.478	PAD		2 Laporan	179.972.000
						Belanja operasi		:	20.636.478				179.972.000
							Belanja Pegawai	:	-				-
							Belanja barang dan jasa	:	20.636.478				179.972.000
						Belanja Modal		:	-				-

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025							Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7				8	9	10	11
						Belanja Tidak terduga		:	-				-
						Belanja Transfer		:	-				-
							Belanja Bagi Hasil	:	-				-
							Belanja Bantuan Keuangan	:	-				-
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya laporan keuangan yang akurat	Persentase laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggungjaw abkan	Kab. Pasuruan	100%				444.881.503.299	PAD dan DAU		100%	88.784.555.544
5.02.01.2.02.00 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pasuruan	81 Orang/bln				444.378.523.299	DAU		98 Org/Bln	86.360.920.344
						Belanja operasi			:	444.378.523.299			86.360.920.344
							Belanja Pegawai	:	443.274.349.506				80.685.909.144
							Belanja barang dan jasa	:	1.104.173.793				5.675.011.200
						Belanja Modal		:	-				-

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025							Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7				8	9	10	11
						Belanja Tidak terduga		:	-				-
						Belanja Transfer		:	-				-
							Belanja Bagi Hasil	:	-				-
							Belanja Bantuan Keuangan	:	-				-
5.02.01.2.02.00 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Pasuruan	75 Dokumen				502.980.000	PAD		75 Dokumen	2.423.635.200
						Belanja operasi			:	502.980.000			2.423.635.200
							Belanja Pegawai	:	64.980.000				190.728.000
							Belanja barang dan jasa	:	438.000.000				2.232.907.200
						Belanja Modal		:	-				-
						Belanja Tidak terduga		:	-				-
						Belanja Transfer		:	-				-

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025							Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7				8	9	10	11
							Belanja Bagi Hasil	:	-				-
							Belanja Bantuan Keuangan	:	-				-
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi kepegawaian dengan baik	Persentase dokumen kepegawaian yang akurat dan sesuai ketentuan	Kab. Pasuruan	100%				134.852.000	PAD		100%	651.381.000
5.02.01.2.05.00 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Pasuruan	160 Orang				134.852.000	PAD		160 orang	651.381.000
						Belanja operasi			:	134.852.000			651.381.000
							Belanja Pegawai	:	-				-
							Belanja barang dan jasa	:	134.852.000				651.381.000
						Belanja Modal		:	-				-
						Belanja Tidak terduga		:	-				-

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025							Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7				8	9	10	11
						Belanja Transfer		:	-				-
							Belanja Bagi Hasil	:	-				-
							Belanja Bantuan Keuangan	:	-				-
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya kebutuhan umum perangkat daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan umum PD	Kab. Pasuruan	100%				195.117.120	PAD		100%	938.087.541
5.02.01.2.06.00 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Pasuruan	20 Paket				10.733.700	PAD		20 Paket	51.936.200
						Belanja operasi		:	10.733.700				51.936.200
							Belanja Pegawai	:	-				-
							Belanja barang dan jasa	:	10.733.700				51.936.200
						Belanja Modal		:	-				-

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025							Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7				8	9	10	11
						Belanja Tidak terduga		:	-				-
						Belanja Transfer		:	-				-
							Belanja Bagi Hasil	:	-				-
							Belanja Bantuan Keuangan	:	-				-
5.02.01.2.06.00 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Pasuruan	30 Paket				25.941.000	PAD		30 Paket	125.052.360
						Belanja operasi		:	7.441.000				42.352.360
							Belanja Pegawai	:	-				-
							Belanja barang dan jasa	:	7.441.000				42.352.360
						Belanja Modal		:	18.500.000				82.700.000
						Belanja Tidak terduga		:	-				-

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025							Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7				8	9	10	11
						Belanja Transfer		:	-				-
							Belanja Bagi Hasil	:	-				-
							Belanja Bantuan Keuangan	:	-				-
5.02.01.2.06.00 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Pasuruan	50 Paket				19.102.000	PAD		50 Paket	91.937.307
						Belanja operasi		:	19.102.000				82.048.000
							Belanja Pegawai	:	-				-
							Belanja barang dan jasa	:	19.102.000				82.048.000
						Belanja Modal		:	-				9.889.307
						Belanja Tidak terduga		:	-				-
						Belanja Transfer		:	-				-
							Belanja Bagi Hasil	:	-				-

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025							Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7				8	9	10	11
							Belanja Bantuan Keuangan	:	-				-
5.02.01.2.06.00 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Pasuruan	50 Paket				21.128.080	PAD		50 Paket	101.926.774
						Belanja operasi		:	21.128.080				101.926.774
							Belanja Pegawai	:	-				-
							Belanja barang dan jasa	:	21.128.080				101.926.774
						Belanja Modal		:	-				-
						Belanja Tidak terduga		:	-				-
						Belanja Transfer		:	-				-
							Belanja Bagi Hasil	:	-				-
							Belanja Bantuan Keuangan	:	-				-

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11
5.02.01.2.06.00 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Pasuruan	20 Paket			18.689.490	PAD		20 Paket	90.075.900
						Belanja operasi			:	18.689.490		90.075.900
							Belanja Pegawai	:	-			-
							Belanja barang dan jasa	:	18.689.490			90.075.900
							Belanja Modal	:	-			-
							Belanja Tidak terduga	:	-			-
							Belanja Transfer	:	-			-
							Belanja Bagi Hasil	:	-			-
							Belanja Bantuan Keuangan	:	-			-
5.02.01.2.06.00 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Pasuruan	30 Laporan			8.892.850	PAD		25 Laporan	40.159.000
						Belanja operasi			:	8.892.850		40.159.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7				8	9	10	11
							Belanja Pegawai	:	-				-
							Belanja barang dan jasa	:	8.892.850				40.159.000
						Belanja Modal		:	-				-
						Belanja Tidak terduga		:	-				-
						Belanja Transfer		:	-				-
							Belanja Bagi Hasil	:	-				-
							Belanja Bantuan Keuangan	:	-				-
5.02.01.2.06.00 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Pasuruan	180 Laporan				90.630.000	PAD		180 Laporan	437.000.000
						Belanja operasi			:	90.630.000			437.000.000
							Belanja Pegawai	:	-				-

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11
							Belanja barang dan jasa	:	90.630.000			437.000.000
						Belanja Modal		:	-			-
						Belanja Tidak terduga		:	-			-
						Belanja Transfer		:	-			-
							Belanja Bagi Hasil	:	-			-
							Belanja Bantuan Keuangan	:	-			-
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksana pengadaan BMD	Persentase pengadaan BMD yag terealisasi	Kab. Pasuruan	100%				7.265.000	PAD		35.770.335
5.02.01.2.07.00 05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Pasuruan	3 Unit				7.265.000	PAD	Target Kinerja pada tahun 2025 menyes uaikan	35.770.335

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025							Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7				8	9	10	11
											dengan keadaa n anggara n.		
						Belanja operasi			:	-			-
							Belanja Pegawai		:	-			-
							Belanja barang dan jasa		:	-			-
						Belanja Modal			:	7.265.000			35.770.335
						Belanja Tidak terduga			:	-			-
						Belanja Transfer			:	-			-
							Belanja Bagi Hasil		:	-			-
							Belanja Bantuan Keuangan		:	-			-
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya penunjang operasioal kantor	Persentase jasa penunjang operasional kantor yang tersedia	Kab. Pasuruan	98%					1.516.908.288	PAD	98%	1.250.066.172

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11
5.02.01.2.08.00 01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Pasuruan	30 Laporan			1.465.455.288	PAD		30 Laporan	1.002.062.772
						Belanja operasi		:	1.465.455.288			1.002.062.772
							Belanja Pegawai	:	-			-
							Belanja barang dan jasa	:	1.465.455.288			1.002.062.772
						Belanja Modal		:	-			-
						Belanja Tidak terduga		:	-			-
						Belanja Transfer		:	-			-
							Belanja Bagi Hasil	:	-			-
							Belanja Bantuan Keuangan	:	-			-

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11
5.02.01.2.08.00 02	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kanto	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Pasuruan	10 Laporan			600.000	PAD		10 Laporan	3.000.000
						Belanja operasi		:	600.000			3.000.000
							Belanja Pegawai	:	-			-
							Belanja barang dan jasa	:	600.000			3.000.000
							Belanja Modal	:	-			-
							Belanja Tidak terduga	:	-			-
							Belanja Transfer	:	-			-
							Belanja Bagi Hasil	:	-			-
							Belanja Bantuan Keuangan	:	-			-

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11
5.02.01.2.08.00 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Pasuruan	50 Laporan			50.853.000	PAD		50 Laporan	245.003.400
						Belanja operasi		:	50.853.000			245.003.400
							Belanja Pegawai	:	-			-
							Belanja barang dan jasa	:	50.853.000			245.003.400
						Belanja Modal		:	-			-
						Belanja Tidak terduga		:	-			-
						Belanja Transfer		:	-			-
							Belanja Bagi Hasil	:	-			-
							Belanja Bantuan Keuangan	:	-			-

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025							Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7				8	9	10	11	
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya BMD yang dapat beroperasi dengan baik	Persentase BMD kondisi baik	Kab. Pasuruan	100%					247.851.000	PAD		100%	1.207.568.200
5.02.01.2.09.00 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Pasuruan	25 Unit					15.570.000	PAD		25 Unit	74.928.600
						Belanja operasi			:	15.570.000				74.928.600
							Belanja Pegawai	:		-				-
							Belanja barang dan jasa	:		15.570.000				74.928.600
						Belanja Modal		:		-				-
						Belanja Tidak terduga		:		-				-

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025							Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7				8	9	10	11
						Belanja Transfer		:	-				-
							Belanja Bagi Hasil	:	-				-
							Belanja Bantuan Keuangan	:	-				-
5.02.01.2.09.00 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Pasuruan	80 Unit				124.229.500	PAD		80 Unit	598.909.600
						Belanja operasi		:	124.229.500				598.909.600
							Belanja Pegawai	:	-				-
							Belanja barang dan jasa	:	124.229.500				598.909.600
						Belanja Modal		:	-				-
						Belanja Tidak terduga		:	-				-

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025							Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7				8	9	10	11
						Belanja Transfer		:	-				-
							Belanja Bagi Hasil	:	-				-
							Belanja Bantuan Keuangan	:	-				-
5.02.01.2.09.00 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Pasuruan	100 Unit				38.051.500	PAD		100 Unit	183.500.000
						Belanja operasi			:	38.051.500			183.500.000
							Belanja Pegawai	:	-				-
							Belanja barang dan jasa	:	38.051.500				183.500.000
						Belanja Modal		:	-				-
						Belanja Tidak terduga		:	-				-
						Belanja Transfer		:	-				-
							Belanja Bagi Hasil	:	-				-

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025							Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7				8	9	10	11
							Belanja Bantuan Keuangan	:		-			-
5.02.01.2.09.00 09	Pemeliharaan/Reh abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi	Kab. Pasuruan	5 Unit					70.000.000	PAD	5 Unit	341.680.000
						Belanja operasi		:		70.000.000			341.680.000
							Belanja Pegawai	:					341.680.000
							Belanja barang dan jasa	:		70.000.000			-
						Belanja Modal		:		-			-
						Belanja Tidak terduga		:		-			-
						Belanja Transfer		:		-			-
							Belanja Bagi Hasil	:		-			-
							Belanja Bantuan Keuangan	:		-			-

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif					Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7				8	9	10	11
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Meningkatny a pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel	1. Porsentase penyusunan dokumen penganggaran yang baik secara tepat waktu dan sesuai regulasi yang berlaku	Kab. Pasuruan	97%				670.868.039.784	PAD, BK, Dana Darurat dan DBH		95%	718.488.090.525
			2. Pengelolaan pendapatan dan belanja daerah sesuai ketentuan yang berlaku	Kab. Pasuruan	100%				-	PAD		100%	-
			3. Porsentase kelengkapan dokumen LKPD yang selesai tepat waktu	Kab. Pasuruan	100%				-	PAD		100%	-
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Meningkatny a verifikasi penyelesaian dokumen anggaran tepat waktu	Prosentase Penyelesaian verifikasi penyusunan dokumen anggaran daerah tepat waktu	Kab. Pasuruan	100%				588.903.298	PAD		100%	2.838.580.609
5.02.02.2.01.00 01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Tersusunnya KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Kab. Pasuruan	4 Dokumen				124.413.925	PAD		4 Dokumen	599.689.094
						Belanja operasi		:	124.413.925				599.689.094

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7				8	9	10	11
							Belanja Pegawai	:	-				-
							Belanja barang dan jasa	:	124.413.925				599.689.094
						Belanja Modal		:	-				-
						Belanja Tidak terduga		:	-				-
						Belanja Transfer		:	-				-
							Belanja Bagi Hasil	:	-				-
							Belanja Bantuan Keuangan	:	-				-
5.02.02.2.01.00 02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Tersusunnya Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Kab. Pasuruan	4 Dokumen				51.707.967	PAD		4 Dokumen	249.239.576
						Belanja operasi		:	51.707.967				249.239.576
							Belanja Pegawai	:	-				-

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025							Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7				8	9	10	11
							Belanja barang dan jasa	:	51.707.967				249.239.576
						Belanja Modal		:	-				-
						Belanja Tidak terduga		:	-				-
						Belanja Transfer		:	-				-
							Belanja Bagi Hasil	:	-				-
							Belanja Bantuan Keuangan	:	-				-
5.02.02.2.01.00 03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD	Terlaksananya Verifikasi RKASKPD	Jumlah RKA- SKPD yang Diverifikasi	Kab. Pasuruan	57 Dokumen				30.917.827	PAD	jumlah target menyes uaikan dengan jumlah SKPD yang ada di Kab. Pasuru an	60 Dokumen	149.030.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025							Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7				8	9	10	11
						Belanja operasi		:	30.917.827				149.030.000
							Belanja Pegawai	:	-				-
							Belanja barang dan jasa	:	30.917.827				149.030.000
						Belanja Modal		:	-				-
						Belanja Tidak terduga		:	-				-
						Belanja Transfer		:	-				-
							Belanja Bagi Hasil	:	-				-
							Belanja Bantuan Keuangan	:	-				-
5.02.02.2.01.00 04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA- SKPD	Terlaksananya Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA- SKPD yang Diverifikasi	Kab. Pasuruan	57 Dokumen				32.858.767	PAD	jumlah target menyes uaikan dengan jumlah SKPD yang ada di Kab.	60 Dokumen	158.381.800

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025							Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7				8	9	10	11
											Pasuru an		
						Belanja operasi		:	32.858.767				158.381.800
							Belanja Pegawai	:	-				-
							Belanja barang dan jasa	:	32.858.767				158.381.800
						Belanja Modal		:	-				-
						Belanja Tidak terduga		:	-				-
						Belanja Transfer		:	-				-
							Belanja Bagi Hasil	:	-				-
							Belanja Bantuan Keuangan	:	-				-

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025							Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7				8	9	10	11	
5.02.02.2.01.00 07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kab. Pasuruan	2 Dokumen					242.152.000	PAD		2 Dokumen	1.167.196.894
						Belanja operasi			:	214.273.240				1.040.954.374
							Belanja Pegawai	:	56.294.406					560.620.000
							Belanja barang dan jasa	:	157.978.834					480.334.374
						Belanja Modal		:	27.878.760					126.242.520
						Belanja Tidak terduga		:	-					-
						Belanja Transfer		:	-					-
							Belanja Bagi Hasil	:	-					-
							Belanja Bantuan Keuangan	:	-					-

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025							Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7				8	9	10	11	
5.02.02.2.01.00 08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kab. Pasuruan	2 Dokumen					54.801.071	PAD		2 Dokumen	264.147.770
						Belanja operasi			:	54.801.071				264.147.770
							Belanja Pegawai	:		-				-
							Belanja barang dan jasa	:		54.801.071				264.147.770
						Belanja Modal		:		-				-
						Belanja Tidak terduga		:		-				-
						Belanja Transfer		:		-				-
							Belanja Bagi Hasil	:		-				-
							Belanja Bantuan Keuangan	:		-				-

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025							Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7				8	9	10	11
5.02.02.2.01.00 13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	100 Orang				52.051.741	PAD		100 Orang	250.895.475
						Belanja operasi		:	52.051.741				250.895.475
							Belanja Pegawai	:	-				-
							Belanja barang dan jasa	:	52.051.741				250.895.475
						Belanja Modal		:	-				-
						Belanja Tidak terduga		:	-				-
						Belanja Transfer		:	-				-
							Belanja Bagi Hasil	:	-				-
							Belanja Bantuan Keuangan	:	-				-

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Terlaksananya dokumen hasil koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan kas daerah	Prosentase dokumen pendapatan dan belanja daerah yang terselesaikan	Kab. Pasuruan	100%			356.794.800	PAD		100%	1.719.803.025
5.02.02.2.02.00 01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Kab. Pasuruan	12 Dokumen			84.386.046	PAD		12 Dokumen	406.758.739
						Belanja operasi			:	84.386.046		310.810.639
							Belanja Pegawai	:	25.080.000			-
							Belanja barang dan jasa	:	59.306.046			310.810.639
						Belanja Modal		:				95.948.100
						Belanja Tidak terduga		:	-			-
						Belanja Transfer		:	-			-
							Belanja Bagi Hasil	:	-			-
							Belanja Bantuan Keuangan	:	-			-

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif					Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7				8	9	10	11
5.02.02.2.02.00 05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Terlaksananya Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Kab. Pasuruan	50 Dokumen				207.335.000	PAD		50 Dokumen	999.374.286
						Belanja operasi			:	207.335.000			999.374.286
							Belanja Pegawai		:	9.660.000			9.660.000
							Belanja barang dan jasa		:	197.675.000			989.714.286
						Belanja Modal			:	-			-
						Belanja Tidak terduga			:	-			-
						Belanja Transfer			:	-			-
							Belanja Bagi Hasil		:	-			-

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025							Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7				8	9	10	11
							Belanja Bantuan Keuangan	:		-			-
5.02.02.2.02.00 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pe motongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pem otongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pem otongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Kab. Pasuruan	2 Laporan					6.884.000	PAD	2 Laporan	33.183.000
						Belanja operasi		:		6.884.000			33.183.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7				8	9	10	11
							Belanja Pegawai	:	-				-
							Belanja barang dan jasa	:	6.884.000				33.183.000
						Belanja Modal		:	-				-
						Belanja Tidak terduga		:	-				-
						Belanja Transfer		:	-				-
							Belanja Bagi Hasil	:	-				-
							Belanja Bantuan Keuangan	:	-				-
5.02.02.2.02.00 09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Terlaksananya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Kab. Pasuruan	268 Dokumen				8.094.754	PAD		268 Dokumen	39.019.000
						Belanja operasi		:	8.094.754				39.019.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025							Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7				8	9	10	11
							Belanja Pegawai	:	-				-
							Belanja barang dan jasa	:	8.094.754				39.019.000
						Belanja Modal		:	-				-
						Belanja Tidak terduga		:	-				-
						Belanja Transfer		:	-				-
							Belanja Bagi Hasil	:	-				-
							Belanja Bantuan Keuangan	:	-				-
5.02.02.2.02.00 10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawab an Sub Kegiatan	Tersedianya Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawab an Sub Kegiatan	Kab. Pasuruan	1 Dokumen				10.683.000	PAD		1 Dokumen	51.493.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025							Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7				8	9	10	11
		Pertanggungja waban Sub Kegiatan											
						Belanja operasi		:	10.683.000				51.493.000
							Belanja Pegawai	:	-				-
							Belanja barang dan jasa	:	10.683.000				51.493.000
						Belanja Modal		:	-				-
						Belanja Tidak terduga		:	-				-
						Belanja Transfer		:	-				-
							Belanja Bagi Hasil	:	-				-
							Belanja Bantuan Keuangan	:	-				-

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11
5.02.02.2.02.00 11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	100 Orang			39.412.000	PAD		100 Orang	189.975.000
						Belanja operasi		:	39.412.000			189.975.000
							Belanja Pegawai	:	-			-
							Belanja barang dan jasa	:	39.412.000			189.975.000
						Belanja Modal		:	-			-
						Belanja Tidak terduga		:	-			-
						Belanja Transfer		:	-			-
							Belanja Bagi Hasil	:	-			-
							Belanja Bantuan Keuangan	:	-			-

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025							Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7				8	9	10	11
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Tersusunnya laporan keuangan SKPD tepat waktu dan sesuai standar	Persentase Laporan Keuangan disusun tepat waktu dan sesuai standar	Kab. Pasuruan	100%				283.517.401	PAD		100%	1.283.285.179
5.02.02.2.03.00 01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Kab. Pasuruan	12 Laporan				13.368.873	PAD		12 Laporan	64.437.894
						Belanja operasi			:	13.368.873			64.437.894
							Belanja Pegawai	:					7.980.000
							Belanja barang dan jasa	:	13.368.873				56.457.894
						Belanja Modal		:	-				-
						Belanja Tidak terduga		:	-				-
						Belanja Transfer		:	-				-

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025							Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7				8	9	10	11
							Belanja Bagi Hasil	:	-				-
							Belanja Bantuan Keuangan	:	-				-
5.02.02.2.03.00 02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Kab. Pasuruan	4 Dokumen				17.299.850	PAD		4 Dokumen	83.448.000
						Belanja operasi		:	17.299.850				83.448.000
							Belanja Pegawai	:	-				-
							Belanja barang dan jasa	:	17.299.850				83.448.000
						Belanja Modal		:	-				-

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025							Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7				8	9	10	11
						Belanja Tidak terduga		:	-				-
						Belanja Transfer		:	-				-
							Belanja Bagi Hasil	:	-				-
							Belanja Bantuan Keuangan	:	-				-
5.02.02.2.03.00 04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Kab. Pasuruan	7 Laporan				75.833.890	PAD		7 Laporan	365.570.500
						Belanja operasi		:	75.833.890				321.680.500
							Belanja Pegawai	:	7.980.000				10.620.000
							Belanja barang dan jasa	:	67.853.890				311.060.500
						Belanja Modal		:	-				43.890.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025							Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7				8	9	10	11
						Belanja Tidak terduga		:	-				-
						Belanja Transfer		:	-				-
							Belanja Bagi Hasil	:	-				-
							Belanja Bantuan Keuangan	:	-				-
5.02.02.2.03.00 05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungja waban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kot a dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungja waban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kot a	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	4 Dokumen				40.931.950	PAD		4 Dokumen	197.299.200

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025							Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7				8	9	10	11
						Belanja operasi		:	40.931.950				197.299.200
							Belanja Pegawai	:	-				-
							Belanja barang dan jasa	:	40.931.950				197.299.200
						Belanja Modal		:	-				-
						Belanja Tidak terduga		:	-				-
						Belanja Transfer		:	-				-
							Belanja Bagi Hasil	:	-				-
							Belanja Bantuan Keuangan	:	-				-
5.02.02.2.03.00 07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Kab. Pasuruan	4 Dokumen				38.917.838	PAD		4 Dokumen	187.596.305

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11	
						Belanja operasi		:	38.917.838			187.596.305	
							Belanja Pegawai	:	-			-	
							Belanja barang dan jasa	:	38.917.838			187.596.305	
						Belanja Modal		:	-			-	
						Belanja Tidak terduga		:	-			-	
						Belanja Transfer		:	-			-	
							Belanja Bagi Hasil	:	-			-	
							Belanja Bantuan Keuangan	:	-			-	
5.02.02.2.03.00 11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	57 Orang				97.165.000	PAD		57 Orang	468.381.280

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025							Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7				8	9	10	11
						Belanja operasi		:	97.165.000				468.381.280
							Belanja Pegawai	:	-				-
							Belanja barang dan jasa	:	97.165.000				468.381.280
						Belanja Modal		:	-				-
						Belanja Tidak terduga		:	-				-
						Belanja Transfer		:	-				-
							Belanja Bagi Hasil	:	-				-
							Belanja Bantuan Keuangan	:	-				-
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya penyelesaian dokumen urusan kewenangan keuangan daerah	Prosentase dokumen urusan kewenangan pengelolaan keuangan daeran	Kab. Pasuruan	100%				669.638.824.285	PAD, BK, Dana Darurat dan DBH		100%	712.646.421.712

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025							Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7				8	9	10	11
5.02.02.2.04.00 02	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Terlaksananya Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Kab. Pasuruan	2 Laporan				70.698.200	PAD		2 Laporan	340.820.450
						Belanja operasi			:	70.698.200			340.820.450
							Belanja Pegawai	:	-				-
							Belanja barang dan jasa	:	70.698.200				340.820.450
						Belanja Modal		:	-				-
						Belanja Tidak terduga		:	-				-
						Belanja Transfer		:	-				-
							Belanja Bagi Hasil	:	-				-
							Belanja Bantuan Keuangan	:	-				-

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025							Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7				8	9	10	11	
5.02.02.2.04.00 08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Tersedianya Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Kab. Pasuruan	7 Laporan					584.893.706.680	BK		7 Laporan	634.846.306.680
						Belanja operasi			:	-				-
							Belanja Pegawai	-		-			-	-
							Belanja barang dan jasa	-		-			-	-
						Belanja Modal		-		-			-	-
						Belanja Tidak terduga		-		-			-	-
						Belanja Transfer		:		584.893.706.680				634.846.306.680
							Belanja Bagi Hasil	:		-				-
							Belanja Bantuan Keuangan	:		584.893.706.680				634.846.306.680

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025							Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7				8	9	10	11
5.02.02.2.04.00 09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Terkelolanya Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kab. Pasuruan	10 Laporan				30.000.000.000	Dana Darurat		10 Laporan	27.000.000.000
						Belanja operasi		:	-				-
							Belanja Pegawai	:	-				-
							Belanja barang dan jasa	:	-				-
						Belanja Modal		:	-				-
						Belanja Tidak terduga		:	30.000.000.000				27.000.000.000
						Belanja Transfer		:	-				-
							Belanja Bagi Hasil	:	-				-
							Belanja Bantuan Keuangan	:	-				-
5.02.02.2.04.00 10	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Terkelolanya Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	3 Laporan				54.674.419.405	DBH		3 Laporan	50.459.294.582
						Belanja operasi		:	-				-

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025							Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7				8	9	10	11
							Belanja Pegawai	-	-			-	-
							Belanja barang dan jasa	-	-			-	-
						Belanja Modal		-	-			-	-
						Belanja Tidak terduga		-	-			-	-
						Belanja Transfer		:	54.674.419.405				50.459.294.582
							Belanja Bagi Hasil	:	54.674.419.405				50.459.294.582
							Belanja Bantuan Keuangan	:	-				-
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Meningkatnya pengelolaan BMD berstatus	Persentase penggunaan BMD SKPD yang berstatus	Kab. Pasuruan	100%				909.496.325	PAD		100%	4.384.093.697
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Meningkatnya penyusunan Dokumen dan Laporan Barang Milik Daerah	Persentase penyusunan Dokumen dan Laporan Barang Milik Daerah yang sesuai standar	Kab. Pasuruan	100%				909.496.325	PAD		100%	4.384.093.697

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11
		yang sesuai standar										
5.02.03.2.01.00 03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kab. Pasuruan	112 Dokumen			22.250.000	PAD		112 Dokumen	107.249.938
						Belanja operasi		:	22.250.000			107.249.938
							Belanja Pegawai	:	-			-
							Belanja barang dan jasa	:	22.250.000			107.249.938
						Belanja Modal		:	-			-
						Belanja Tidak terduga		:	-			-
						Belanja Transfer		:	-			-
							Belanja Bagi Hasil	:	-			-

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025							Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7				8	9	10	11	
							Belanja Bantuan Keuangan	:		-			-	
5.02.03.2.01.00 04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tersedianya Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab. Pasuruan	12 Dokumen					21.384.000	PAD		12 Dokumen	103.073.270
						Belanja operasi		:		21.384.000				103.073.270
							Belanja Pegawai	:		-				-
							Belanja barang dan jasa	:		21.384.000				103.073.270
						Belanja Modal		:		-				-
						Belanja Tidak terduga		:		-				-
						Belanja Transfer		:		-				-
							Belanja Bagi Hasil	:		-				-
							Belanja Bantuan Keuangan	:		-				-

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025							Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7				8	9	10	11	
5.02.03.2.01.00 05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kab. Pasuruan	4 Laporan					209.853.490	PAD		4 Laporan	1.011.742.555
						Belanja operasi			:	209.853.490				1.011.742.555
							Belanja Pegawai	:	10.620.000					-
							Belanja barang dan jasa	:	199.233.490					1.011.742.555
						Belanja Modal		:	-					-
						Belanja Tidak terduga		:	-					-
						Belanja Transfer		:	-					-
							Belanja Bagi Hasil	:	-					-
							Belanja Bantuan Keuangan	:	-					-

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11
5.02.03.2.01.00 07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Kab. Pasuruan	500 Laporan			531.068.764	PAD		500 Laporan	2.559.807.273
						Belanja operasi			:	531.068.764		2.559.807.273
							Belanja Pegawai	:	9.660.000			11.700.000
							Belanja barang dan jasa	:	521.408.764			2.548.107.273
						Belanja Modal		:	-			-
						Belanja Tidak terduga		:	-			-
						Belanja Transfer		:	-			-
							Belanja Bagi Hasil	:	-			-
							Belanja Bantuan Keuangan	:	-			-
5.02.03.2.01.00 09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan	Kab. Pasuruan	12 Laporan			9.293.821	PAD		12 Laporan	44.798.200

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025							Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7				8	9	10	11
		Barang Milik Daerah	Barang Milik Daerah										
						Belanja operasi		:	9.293.821				44.798.200
							Belanja Pegawai	:	-				-
							Belanja barang dan jasa	:	9.293.821				44.798.200
						Belanja Modal		:	-				-
						Belanja Tidak terduga		:	-				-
						Belanja Transfer		:	-				-
							Belanja Bagi Hasil	:	-				-
							Belanja Bantuan Keuangan	:	-				-

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif					Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7				8	9	10	11
5.02.03.2.01.00 10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangan n, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangan n, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Kab. Pasuruan	226 Dokumen				65.897.000	PAD		226 Dokumen	317.629.931
						Belanja operasi			:	65.897.000			317.629.931
							Belanja Pegawai	:	-				8.820.000
							Belanja barang dan jasa	:	65.897.000				308.809.931
						Belanja Modal		:	-				-
						Belanja Tidak terduga		:	-				-
						Belanja Transfer		:	-				-
							Belanja Bagi Hasil	:	-				-

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025							Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7				8	9	10	11
							Belanja Bantuan Keuangan	:	-				-
5.02.03.2.01.00 11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kab. Pasuruan	4 Laporan				21.693.250	PAD		4 Laporan	104.560.910
						Belanja operasi		:	21.693.250				104.560.910
							Belanja Pegawai	:	-				-
							Belanja barang dan jasa	:	21.693.250				104.560.910
						Belanja Modal		:	-				-
						Belanja Tidak terduga		:	-				-
						Belanja Transfer		:	-				-
							Belanja Bagi Hasil	:	-				-

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025							Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7				8	9	10	11
							Belanja Bantuan Keuangan	:	-				-
5.02.03.2.01.00 12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	Kab. Pasuruan	4 Laporan				28.056.000	PAD		4 Laporan	135.231.620
						Belanja operasi		:	28.056.000				104.560.910
							Belanja Pegawai	:	-				-
							Belanja barang dan jasa	:	28.056.000				135.231.620
						Belanja Modal		:	-				-
						Belanja Tidak terduga		:	-				-
						Belanja Transfer		:	-				-
							Belanja Bagi Hasil	:	-				-
							Belanja Bantuan Keuangan	:	-				-

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Meningkatnya Peningkatan Pendapatan pajak dan retribusi Daerah	Prosentase Peningkatan Pendapatan pajak dan retribusi Daerah	Kab. Pasuruan	2%			2.563.736.512	PAD		1,50%	12.357.482.583
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Meningkatnya pengelolaan data wajib pajak	1. Jumlah Wajib Pajak	Kab. Pasuruan	250 Orang			2.563.736.512	PAD		150 Orang	12.357.482.583
		Meningkatnya pengelolaan pajak dan retribusi	2. Peningkatan kontribusi pajak dan retribusi terhadap PAD	Kab. Pasuruan	1,5%			-	PAD		1%	-
5.02.04.2.01.00 01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Tersedianya Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Kab. Pasuruan	2 Dokumen			29.044.694	PAD		2 Dokumen	139.999.970
						Belanja operasi		:	29.044.694			139.999.970
							Belanja Pegawai	:	-			-
							Belanja barang dan jasa	:	29.044.694			139.999.970
						Belanja Modal		:	-			-

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025							Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7				8	9	10	11
						Belanja Tidak terduga		:	-				-
						Belanja Transfer		:	-				-
							Belanja Bagi Hasil	:	-				-
							Belanja Bantuan Keuangan	:	-				-
5.02.04.2.01.00 02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Tersedianya Hasil Analisis Pajak Daerah serta Terlaksananya Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Kab. Pasuruan	20 Dokumen				135.919.500	PAD		12 Dokumen	655.143.375
						Belanja operasi		:	135.919.500				655.143.375
							Belanja Pegawai	:	-				-
							Belanja barang dan jasa	:	135.919.500				655.143.375
						Belanja Modal		:	-				-

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025							Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7				8	9	10	11
						Belanja Tidak terduga		:	-				-
						Belanja Transfer		:	-				-
							Belanja Bagi Hasil	:	-				-
							Belanja Bantuan Keuangan	:	-				-
5.02.04.2.01.00 03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kab. Pasuruan	8 Laporan				139.684.224	PAD		8 Laporan	673.289.361
						Belanja operasi			:	139.684.224			-
							Belanja Pegawai	:	-				10.620.000
							Belanja barang dan jasa	:	139.684.224				662.669.361
						Belanja Modal		:	-				-
						Belanja Tidak terduga		:	-				-

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025							Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7				8	9	10	11
						Belanja Transfer		:	-				-
							Belanja Bagi Hasil	:	-				-
							Belanja Bantuan Keuangan	:	-				-
5.02.04.2.01.00 05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Tersedianya Data Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Kab. Pasuruan	12 Laporan				568.523.020	PAD		12 Laporan	2.740.340.190
						Belanja operasi		:	568.523.020				2.740.340.190
							Belanja Pegawai	:	9.660.000				11.700.000
							Belanja barang dan jasa	:	558.863.020				2.728.640.190
						Belanja Modal		:	-				-
						Belanja Tidak terduga		:	-				-

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025							Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7				8	9	10	11
						Belanja Transfer		:	-				-
							Belanja Bagi Hasil	:	-				-
							Belanja Bantuan Keuangan	:	-				-
5.02.04.2.01.00 06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Kab. Pasuruan	12 Laporan				164.236.834	PAD		12 Laporan	791.638.749
						Belanja operasi			:	164.236.834			
							Belanja Pegawai	:					
							Belanja barang dan jasa	:	164.236.834				557.235.609
						Belanja Modal		:					234.403.140
						Belanja Tidak terduga		:	-				-
						Belanja Transfer		:	-				-

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025							Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7				8	9	10	11
							Belanja Bagi Hasil	:	-				-
							Belanja Bantuan Keuangan	:	-				-
5.02.04.2.01.00 07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Terpenuhi Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Kab. Pasuruan	8262 Objek Pajak				413.013.990	PAD		7868 Objek Pajak	1.990.776.355
						Belanja operasi		:	413.013.990				1.940.776.355
							Belanja Pegawai	:					
							Belanja barang dan jasa	:	413.013.990				1.940.776.355
						Belanja Modal		:	-				50.000.000
						Belanja Tidak terduga		:	-				-
						Belanja Transfer		:	-				-

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025							Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7				8	9	10	11
							Belanja Bagi Hasil	:	-				-
							Belanja Bantuan Keuangan	:	-				-
5.02.04.2.01.00 08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Tersedianya Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Kab. Pasuruan	1.007.902 Dokumen				159.325.894	PAD		918744 Dokumen	767.970.376
						Belanja operasi		:	159.325.894				
							Belanja Pegawai	:	10.620.000				10.620.000
							Belanja barang dan jasa	:	148.705.894				757.350.376
						Belanja Modal		:	-				-
						Belanja Tidak terduga		:	-				-
						Belanja Transfer		:	-				-
							Belanja Bagi Hasil	:	-				-

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025							Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7				8	9	10	11
							Belanja Bantuan Keuangan	:	-				-
5.02.04.2.01.00 09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Tersedianya Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Kab. Pasuruan	2 Layanan				75.678.878	PAD		2 Layanan	364.778.786
						Belanja operasi		:	75.678.878				364.778.786
							Belanja Pegawai	:	-				-
							Belanja barang dan jasa	:	75.678.878				364.778.786
						Belanja Modal		:	-				-
						Belanja Tidak terduga		:	-				-
						Belanja Transfer		:	-				-
							Belanja Bagi Hasil	:	-				-
							Belanja Bantuan Keuangan	:	-				-

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025							Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7				8	9	10	11
5.02.04.2.01.00 10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Terlaksananya Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Kab. Pasuruan	12 Laporan				235.210.917	PAD		12 Laporan	1.133.740.554
						Belanja operasi			:	235.210.917			1.107.440.214
							Belanja Pegawai	:	665.000				10.620.000
							Belanja barang dan jasa	:	234.545.917				1.096.820.214
						Belanja Modal		:	-				26.300.340
						Belanja Tidak terduga		:	-				-
						Belanja Transfer		:	-				-
							Belanja Bagi Hasil	:	-				-
							Belanja Bantuan Keuangan	:	-				-

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11
5.02.04.2.01.00 11	Penagihan Pajak Daerah	Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Kab. Pasuruan	9100 Dokumen			322.289.940	PAD		8990 Dokumen	1.553.471.820
						Belanja operasi		:	322.289.940			1.553.471.820
							Belanja Pegawai	:	8.820.000			10.620.000
							Belanja barang dan jasa	:	313.469.940			1.542.851.820
						Belanja Modal		:	-			-
						Belanja Tidak terduga		:	-			-
						Belanja Transfer		:	-			-
							Belanja Bagi Hasil	:	-			-
							Belanja Bantuan Keuangan	:	-			-
5.02.04.2.01.00 12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Terlaksananya Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Kab. Pasuruan	11 Dokumen			16.135.950	PAD		11 Dokumen	77.775.255

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025							Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7				8	9	10	11
						Belanja operasi		:	16.135.950				77.775.255
							Belanja Pegawai	:	-				-
							Belanja barang dan jasa	:	16.135.950				77.775.255
						Belanja Modal		:	-				-
						Belanja Tidak terduga		:	-				-
						Belanja Transfer		:	-				-
							Belanja Bagi Hasil	:	-				-
							Belanja Bantuan Keuangan	:	-				-
5.02.04.2.01.00 13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Terlaksanannya Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Kab. Pasuruan	55 Dokumen				269.569.818	PAD		53 Dokumen	1.299.357.324

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11	
						Belanja operasi		:	269.569.818			1.299.357.324	
							Belanja Pegawai	:	9.790.200			11.788.200	
							Belanja barang dan jasa	:	259.779.618			1.287.569.124	
						Belanja Modal		:	-			-	
						Belanja Tidak terduga		:	-			-	
						Belanja Transfer		:	-			-	
							Belanja Bagi Hasil	:	-			-	
							Belanja Bantuan Keuangan	:	-			-	
5.02.04.2.01.00 14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kab. Pasuruan	2 Laporan				35.102.853	PAD		2 Laporan	169.200.468
						Belanja operasi		:	35.102.853				169.200.468

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025							Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7				8	9	10	11
							Belanja Pegawai	:	-				-
							Belanja barang dan jasa	:	35.102.853				169.200.468
						Belanja Modal		:	-				-
						Belanja Tidak terduga		:	-				-
						Belanja Transfer		:	-				-
							Belanja Bagi Hasil	:	-				-
							Belanja Bantuan Keuangan	:	-				-

Berdasarkan tabel 4.1, dapat disimpulkan rencana total belanja BPKPD tahun 2025 yaitu Rp 1.121.411.325.806,00. Kebutuhan dana pada setiap jenis belanja antara lain:

<i>Total Belanja operasi</i>	:	451.789.555.961
Belanja pegawai	:	443.498.179.112
Belanja barang dan jasa	:	8.291.376.849
Belanja bunga	:	0
Belanja subsidi	:	0
Belanja hibah	:	0
Belanja bantuan sosial	:	0
<i>Total Belanja modal</i>	:	53.643.760
<i>Total Belanja tidak terduga</i>	:	30.000.000.000
<i>Total Belanja transfer</i>	:	639.568.126.085
Belanja Bagi Hasil	:	54.674.419.405
Belanja Bantuan Keuangan	:	584.893.706.680
Total Belanja BPKPD	:	1.121.411.325.806

Sedangkan, Pendanaan tahun 2025 pada Renstra yaitu sebesar Rp759.814.926.323. Dalam pendanaan diatas, sudah termasuk pendanaan untuk proyek strategis, program prioritas serta program inovasi. Pendanaan proyek strategis terdapat pada sub kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah. Pendanaan program Prioritas terdapat pada Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Koordinasi dan Pengelolaan perbendaharaan daerah. Untuk inovasi yang berjalan, pendanaan terkait inovasi lapak Santri terdapat pada sub kegiatan pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah . Pendanaan terkait inovasi SIP transparan didanai oleh anggaran pada

sub kegiatan Pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah serta penyusunan kebijakan pajak daerah. Terkait inovasi Simonik, pelaksanaan kelanjutannya masih dipertimbangkan dikarenakan adanya perubahan aplikasi yang mempengaruhi penggunaan Simonik.

Perbedaan SIPD dan Renja
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan BPKPD Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026

No	SIPD			Anggaran	RENJA			Anggaran
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target		Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
	URUSAN PENUNJANG				URUSAN PENUNJANG			
	KEUANGAN				KEUANGAN			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen Administrasi PD yang Baik	97%	447.070.053.185	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase dokumen administrasi PD yang baik	97%	447.070.053.185
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase konsistensi indikator kinerja program/kegiatan/s ubkegiatan pada dok. Rencana, anggaran, dan evaluasi	100%	86.556.478	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase konsistensi indikator kinerja program/kegiatan/s ubkegiatan pada dok. Rencana, anggaran, dan evaluasi	100%	86.556.478
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	65.920.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	65.920.000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	20.636.478	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	20.636.478

No	SIPD			Anggaran	RENJA			Anggaran
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target		Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan	100%	444.881.503.299	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan	100%	444.881.503.299
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	81 Orang/Bulan	444.378.523.299	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	81 Orang/Bulan	444.378.523.299
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	75 Dokumen	502.980.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	75 Dokumen	502.980.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	134.852.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase dokumen kepegawaian yang akurat dan sesuai ketentuan	100%	134.852.000
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	160 Orang	134.852.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	160 Orang	134.852.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan umum PD	100%	195.117.120	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan umum PD	100%	195.117.120

No	SIPD			Anggaran	RENJA			Anggaran
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target		Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket	10.733.700	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket	10.733.700
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30 Paket	25.941.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30 Paket	25.941.000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	50 Paket	19.102.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	50 Paket	19.102.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	50 Paket	21.128.080	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	50 Paket	21.128.080
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	20 Paket	18.689.490	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	20 Paket	18.689.490
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	25 Laporan	8.892.850	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	30 Laporan	8.892.850
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	180 Laporan	90.630.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	180 Laporan	90.630.000

No	SIPD			Anggaran	RENJA			Anggaran
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target		Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan BMD yang terealisasi	100%	7.265.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan BMD yang terealisasi	100%	7.265.000
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit	7.265.000	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	7.265.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang operasional kantor yang tersedia	98%	1.516.908.288	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang operasional kantor yang tersedia	98%	1.516.908.288
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	30 Laporan	1.465.455.288	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	30 Laporan	1.465.455.288
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Laporan	600.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Laporan	600.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	50 Laporan	50.853.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	50 Laporan	50.853.000

No	SIPD			Anggaran	RENJA			Anggaran
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target		Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD kondisi baik	100%	247.851.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD kondisi baik	100%	247.851.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	25 Unit	15.570.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	25 Unit	15.570.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	80 Unit	124.229.500	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	80 Unit	124.229.500
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 Unit	38.051.500	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 Unit	38.051.500
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	70.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	70.000.000

No	SIPD			Anggaran	RENJA			Anggaran
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target		Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	1. Persentase penyusunan dokumen penganggaran yang baik secara tepat waktu dan sesuai regulasi yang berlaku	97%	670.868.039.784	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	1. Persentase penyusunan dokumen penganggaran yang baik secara tepat waktu dan sesuai regulasi yang berlaku	97%	670.868.039.784
		2. Pengelolaan pendapatan dan belanja daerah sesuai ketentuan yang berlaku	100%	-		2. Pengelolaan pendapatan dan belanja daerah sesuai ketentuan yang berlaku	100%	-
		3. Porsentase kelengkapan dokumen LKPD yang selesai tepat waktu	100%	-		3. Porsentase kelengkapan dokumen LKPD yang selesai tepat waktu	100%	-
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Prosentase Penyelesaian verifikasi penyusunan dokumen anggaran daerah tepat waktu	100%	588.903.298	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Prosentase Penyelesaian verifikasi penyusunan dokumen anggaran daerah tepat waktu	100%	588.903.298
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	4 Dokumen	124.413.925	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	4 Dokumen	124.413.925
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	4 Dokumen	51.707.967	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	4 Dokumen	51.707.967

No	SIPD			Anggaran	RENJA			Anggaran
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target		Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	60 Dokumen	30.917.827	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	57 Dokumen	30.917.827
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	60 Dokumen	32.858.767	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	57 Dokumen	32.858.767
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	242.152.000	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	242.152.000
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	54.801.071	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	54.801.071
	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	100 Orang	52.051.741	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	100 Orang	52.051.741

No	SIPD			Anggaran	RENJA			Anggaran
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target		Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	-	-	356.794.800	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Prosentase dokumen pendapatan dan belanja daerah yang terselesaikan	100%	356.794.800
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12 Dokumen	84.386.046	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12 Dokumen	84.386.046
	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	50 Dokumen	207.335.000	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	50 Dokumen	207.335.000

No	SIPD			Anggaran	RENJA			Anggaran
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target		Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pematangan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pematangan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pematangan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	2 Laporan	6.884.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pematangan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pematangan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pematangan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	2 Laporan	6.884.000
	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan atas SP2D dengan Instansi Terkait	268 Dokumen	8.094.754	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan atas SP2D dengan Instansi Terkait	268 Dokumen	8.094.754

No	SIPD			Anggaran	RENJA			Anggaran
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target		Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 Dokumen	10.683.000	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 Dokumen	10.683.000
	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	100 Orang	39.412.000	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	100 Orang	39.412.000
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Laporan Keuangan disusun tepat waktu dan sesuai standar	100%	283.517.401	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Laporan Keuangan disusun tepat waktu dan sesuai standar	100%	283.517.401
	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	12 Laporan	13.368.873	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	12 Laporan	13.368.873

No	SIPD			Anggaran	RENJA			Anggaran
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target		Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	4 Dokumen	17.299.850	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	4 Dokumen	17.299.850
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	7 Laporan	75.833.890	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	7 Laporan	75.833.890
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	4 Dokumen	40.931.950	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	4 Dokumen	40.931.950

No	SIPD			Anggaran	RENJA			Anggaran
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target		Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	4 Dokumen	38.917.838	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	4 Dokumen	38.917.838
	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	57 Orang	97.165.000	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	57 Orang	97.165.000
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase pelaksanaan penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah	100%	669.638.824.285	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Prosentase dokumen urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah	100%	669.638.824.285
	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	2 Laporan	70.698.200	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	2 Laporan	70.698.200
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	7 Laporan	584.893.706.680	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	7 Laporan	584.893.706.680

No	SIPD			Anggaran	RENJA			Anggaran
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target		Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	10 Laporan	30.000.000.000	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	10 Laporan	30.000.000.000
	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	3 Laporan	54.674.419.405	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	3 Laporan	54.674.419.405
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase penggunaan BMD SKPD yang berstatus	100%	909.496.325	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase penggunaan BMD SKPD yang berstatus	100%	909.496.325
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	-	909.496.325	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase penyusunan Dokumen dan Laporan Barang Milik Daerah yang sesuai standar	100%	909.496.325
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	112 Dokumen	22.250.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	112 Dokumen	22.250.000
	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	12 Dokumen	21.384.000	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	12 Dokumen	21.384.000
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	4 Laporan	209.853.490	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	4 Laporan	209.853.490

No	SIPD			Anggaran	RENJA			Anggaran
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target		Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	500 Laporan	531.068.764	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	500 Laporan	531.068.764
	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	12 Laporan	9.293.821	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	12 Laporan	9.293.821
	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	226 Dokumen	65.897.000	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	226 Dokumen	65.897.000
	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	4 Laporan	21.693.250	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	4 Laporan	21.693.250
	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	4 Laporan	28.056.000	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	4 Laporan	28.056.000
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Prosentase Peningkatan Pendapatan pajak dan retribusi Daerah	2%	2.563.736.512	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Prosentase Peningkatan Pendapatan pajak dan retribusi Daerah	2,00%	2.563.736.512

No	SIPD			Anggaran	RENJA			Anggaran
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target		Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1. Jumlah Wajib Pajak	250 Orang	2.563.736.512	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1. Jumlah Wajib Pajak	250 Orang	2.563.736.512
		2. Peningkatan kontribusi pajak dan retribusi terhadap PAD	1,50%	-		2. Peningkatan kontribusi pajak dan retribusi terhadap PAD	2%	-
	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Dokumen	29.044.694	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Dokumen	29.044.694
	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	15 Dokumen	135.919.500	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	20 Dokumen	135.919.500
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	8 Laporan	139.684.224	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	8 Laporan	139.684.224
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	568.523.020	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	568.523.020

No	SIPD			Anggaran	RENJA			Anggaran
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target		Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	12 Laporan	164.236.834	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	12 Laporan	164.236.834
	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	8262 Obyek Pajak	413.013.990	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	8262 Objek Pajak	413.013.990
	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	1.007.902 Dokumen	159.325.894	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	1.007.902 Dokumen	159.325.894
	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	2 Layanan	75.678.878	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	2 Layanan	75.678.878
	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	12 Dokumen	235.210.917	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	12 Laporan	235.210.917
	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	9100 Dokumen	322.289.940	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	9100 Dokumen	322.289.940

No	SIPD			Anggaran	RENJA			Anggaran
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target		Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	11 Dokumen	16.135.950	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	11 Dokumen	16.135.950
	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	55 Dokumen	269.569.818	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	55 Dokumen	269.569.818
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	2 Laporan	35.102.853	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	2 Laporan	35.102.853

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2025.

Apabila dalam pelaksanaan tahun berjalan Renja Tahun 2025 menunjukkan adanya ketidaksesuaian akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian dalam bentuk Renja Perubahan dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.1 Catatan Penting yang perlu diperhatikan

1. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
2. Kode sub kegiatan, kinerja sub kegiatan dan indikator sub kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
3. Kode Program/Kegiatan pada Rencana Kerja (Renja) Tahunan Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Peraturan Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Program dan kegiatan yang merupakan usulan langsung dan berasal dari masyarakat (*bottom up*) maupun dari stakeholder terkait diupayakan dapat tertampung lewat Musrenbang Kecamatan ataupun melalui Forum Perangkat Daerah pada masing-masing Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai fungsi yang dapat menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran daerah. Disamping itu, penyusunan Renja Tahun 2025 ini merupakan bagian dari alur pengelolaan keuangan daerah dan juga sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan RKA (Rencana Kerja Anggaran) Perangkat Daerah karena sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 89 ayat 1. Penyusunan RKA ini mengacu pada Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Seluruh Pejabat dan Staf pada Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
 - a. Melaksanakan Renja Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
 - b. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;

2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2025.

5.3. RENCANA TINDAK LANJUT

1. Sumbang saran, pemikiran dan informasi serta dukungan dari berbagai pihak yang terkait (stakeholders) sangat dibutuhkan agar dalam proses pengambilan kebijakan administrasi publik, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dapat sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kemampuan anggaran daerah;
2. Meningkatkan atau optimalisasi koordinasi dan sinkronisasi berbagai kebijakan serta program dan kegiatan Perangkat Daerah, sejak pendataan, perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian dan pengawasan, sebagai bahan penyusunan rencana selanjutnya;
3. Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah. Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian atau penyimpangan, Kepala Perangkat Daerah mengambil langkah-langkah penyempurnaan agar penyusunan RKA Perangkat Daerah sesuai dengan Renja Perangkat Daerah. Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil pemantauan dan supervisi kepada Bupati melalui Kepala BAPPELITBANGDA (Pasal 291 dan Pasal 292 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017);
4. Hasil pemantauan dan supervise digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, dana indikatif dan indikator kinerja serta kelompok sasarannya disusun dalam RKA dengan Renja Perangkat Daerah.

Pj. BUPATI PASURUAN,

ttd.

ANDRIYANTO